



**DINAMIKA PERJUANGAN DPC SARBUMUSI JEMBER  
PADA TAHUN 2001-2020**

**SKRIPSI**

Oleh

**Beny Widia Putra  
130110301036**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**



**DINAMIKA PERJUANGAN DPC SARBUMUSI JEMBER  
PADA TAHUN 2001-2020**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Humaniora

oleh

**Beny Widia Putra  
130110301036**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

## MOTTO

“Jika kamu menginginkan segalanya, kamu tidak akan memiliki apapun. Namun jika kamu tidak menginginkan apapun, kamu akan memiliki segalanya.”  
(Kak Dani Bangsa)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Beny Widia Putra

NIM : 130110301036

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini, yang berjudul “Dinamika Perjuangan DPC Sarbumusi Jember Pada Tahun 2001-2020” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2020  
Yang menyatakan,

Beny Widia Putra  
NIM 130110301036

## PERSETUJUAN

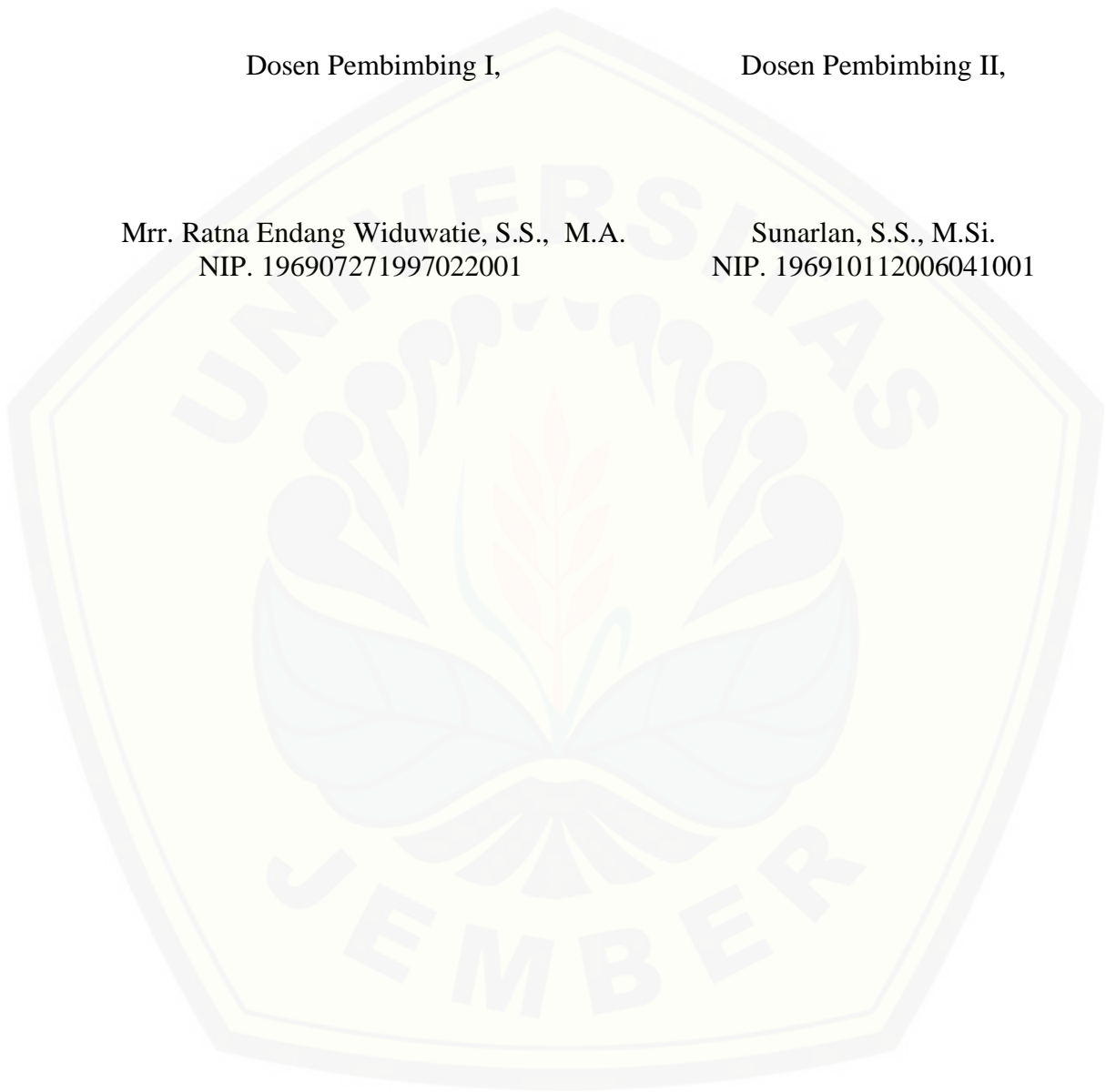
Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Mrr. Ratna Endang Widuwatie, S.S., M.A.  
NIP. 196907271997022001

Sunarlan, S.S., M.Si.  
NIP. 196910112006041001



## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Dinamika Perjuangan DPC Sarbumusi Jember Pada Tahun 2001-2020” telah diuji dan disahkan oleh Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember pada:

Hari, Tanggal : Oktober 2020

Tempat : Faklta Ilmu Budaya Universitas Jember

Tim Penguji

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Mrr. Ratna Endang Widuwatie, S.S., M.A.  
NIP. 196907271997022001

Sunarlan, S.S., M.Si.  
NIP. 196910112006041001

Anggota 1,

Anggota 2,

Dra. Latifatul Izzah, M. Hum.  
NIP. 196606101991032001

Drs. I.G. Krisnadi, M. Hum.  
NIP. 196202281989201001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Prof. Dr.H. Sukarno, M.Litt.  
NIP. 196211081989021001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmad dan kasih sayangNya yang telah memudahkan dan melancarkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Skripsi ini hendak saya persembahkan kepada:

1. Ibu saya tercantik, Lilis Army Prasetyawati dan Almarhum Ayah saya yang paling saya banggakan Djoko Widiarto yang telah membesarkan saya penuh cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materiil yang tidak akan mampu saya balas sampai kapanpun. Semoga dengan ini saya mampu memberikan kebahagiaan dan kebanggaan atas perjuangan menyelesaikan studi ini;
2. Kakak saya satu-satunya, Resita Feli Anda yang sudah mau sabra menunggu kepulangan saya dengan terus mendoakan saya dan membantu menjaga Ibu tercinta saya.
3. Kepada jajaran Dekanat Fakultas Ilmu Budaya, yang telah memberikan saya semangat dan bantuan untuk menyelesaikan studi kuliah ini;
4. Kepada Jurusan Ilmu Sejarah yang telah memberi ilmu, membimbing, dan membantu untuk penyelesaian tugas akhir ini;
5. Kepada Bapak Umar Faruk, Bapak Wahyu Adi, Bapak Iswinarso dan seluruh jajaran pengurus harian DPC Sarbumusi Jember beserta seluruh anggotanya, yang mau memberikan banyak sekali informasi, data, arsip serta doa dalam proses menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Seluruh saudaraku di UKM Dewan Kesenian Kampus yang telah memberi banyak sekali ilmu dan pengalaman;
7. Aulia Masbahah, yang telah membantu dan menemani dalam pengerjaan tugas akhir ini;
8. Rizki Nur Widiati, yang telah banyak memberi semangat, dukungan serta doa selama pengerjaan tugas akhir ini;

9. Saudara saudaraku, Rio Priatma, Rizky Ardiasyah Prayogo, Ilham Ruslan, Fikri, Maulana, Putra Bahtiar, Elmi Aulia Bayu Purna, Fauzi Ramadhani, Ghuiral yang selalu memotivasi dan saling menguatkan dalam masa kuliah hingga penyelesaian skripsi ini;
10. Sahabat-sahabatku, Gherindra Ade Akbar, Agur Irawan, Wahyu Ari Wibowo, Ali Ferdi Abdillah, Ahmad Topan Wijianto dan Adi Firmansyah;
11. Kepada orang yang saya hormati, Cak Dodon, Om Kebo, Pak Taufik Jowo Trisno, Om Eby, Om Revo, Kak Dani Bangsa, Mas Ayik Kalianyar, Mbah Bul Bendoarum, Mas Penk, Mas Saka Wesley, yang telah banyak memberi nasihat, pembelajaran serta menuntutn saya;
12. Teman teman prodi sejarah angkatan 2013 yang telah menjadi teman menimba ilmu, berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini;
13. Teman-teman kompleks UKM Fakultas Ilmu Budaya, Swapenka, Ideas, Porsa, Imasind, BKMS, EDSA, PSM, Himafisi, Lekfas yang telah menjadi teman berdiskusi selama berada di organisasi;
14. Cak Busar, cak Marsono, cak Mamad, Cak Heri, satuan Satpam, Cleaning service dan karyawan fakultas ilmu budaya yang telah memberikan semangat dan menjadi orang tua selama kuliah di fakultas ilmu budaya;
15. Teman- teman Kost Bangka 3 yang selalu menjadi penyemangat dalam mengerjakan dan partner sharing dan curhat.



## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dinamika Perjuangan Sarbumusi Jember pada Tahun 2001-2020”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr.H. Sukarno, M.Litt., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya;
2. Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Sejarah;
3. Mrr. Ratna Endang Widuati S.S., M.A. selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah mengarahkan dengan cermat dan meluangkan waktu, pikiran, serta perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Sunarlan, S.S., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah memberikan saran, masukan serta pengarahan dengan sabar dan cermat;
5. Dra. Latifatul Izzah, M. Hum. dan Drs. I.G Krisnadi, M.Hum selaku Dosen Penguji Satu dan Dua yang telah memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, yang telah memberikan berbagai ilmu, dan pengalaman hidup yang tidak ternilai oleh apapun.

Penulis dengan segala kerendahan hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya .

Jember, Oktober 2020

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b>	<b>xviii</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xix</b>
<b>SUMMARY</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
1.4 Ruang Lingkup	13
1.5 Tinjauan Pustaka	16
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori	18
1.7 Metode Penelitian	20
1.8 Sistematika Penulisan	23

<b>BAB 2 LATAR BELAKANG BERDIRINYA SARBUMUSI DI JEMBER</b>	27
2.1 Selayang Pandang Perkumpulan Buruh di Indonesia sebelum Tahun 2001	27
2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Jember sebelum Tahun 2001	42
2.3 Kondisi Perburuhan di Jember sebelum Tahun 2001	51
2.4 Sejarah Berdirinya DPC Sarbumusi di Jember	59
2.4.1 Proses Berdirinya DPC Sarbumusi di Jember	59
2.4.2 Mekanisme Keorganisasian DPC Sarbumusi Jember	65
<b>BAB 3 KEBIJAKAN PIMPINAN DPC SARBUMUSI JEMBER PERIODE 2001-2020 SERTA DAMPAK KEBERADAAN DPC SARBUMUSI JEMBER</b>	77
3.1 Kebijakan Pimpinan DPC Sarbumusi Jember Periode 2001-2020	77
3.1.1 Periode Kepemimpinan Kholili pada Tahun 2001-2004	77
3.1.2 Periode Kepemimpinan Iswinarso pada Tahun 2004-2010	82
3.1.3 Periode Kepemimpinan Umar Faruk pada Tahun 2010-2020	88
3.2 Dampak yang Ditimbulkan dari Aktivitas DPC Sarbumusi di Jember	98
3.2.1 Dampak Bagi Anggota DPC Sarbumusi Jember	98
3.2.2 Dampak Bagi Masyarakat Secara Umum	101
3.2.3 Dampak Bagi Pemerintah Daerah	104
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	106
4.1 Kesimpulan	106
4.2 Saran	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	111
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	114

## DAFTAR SINGKATAN

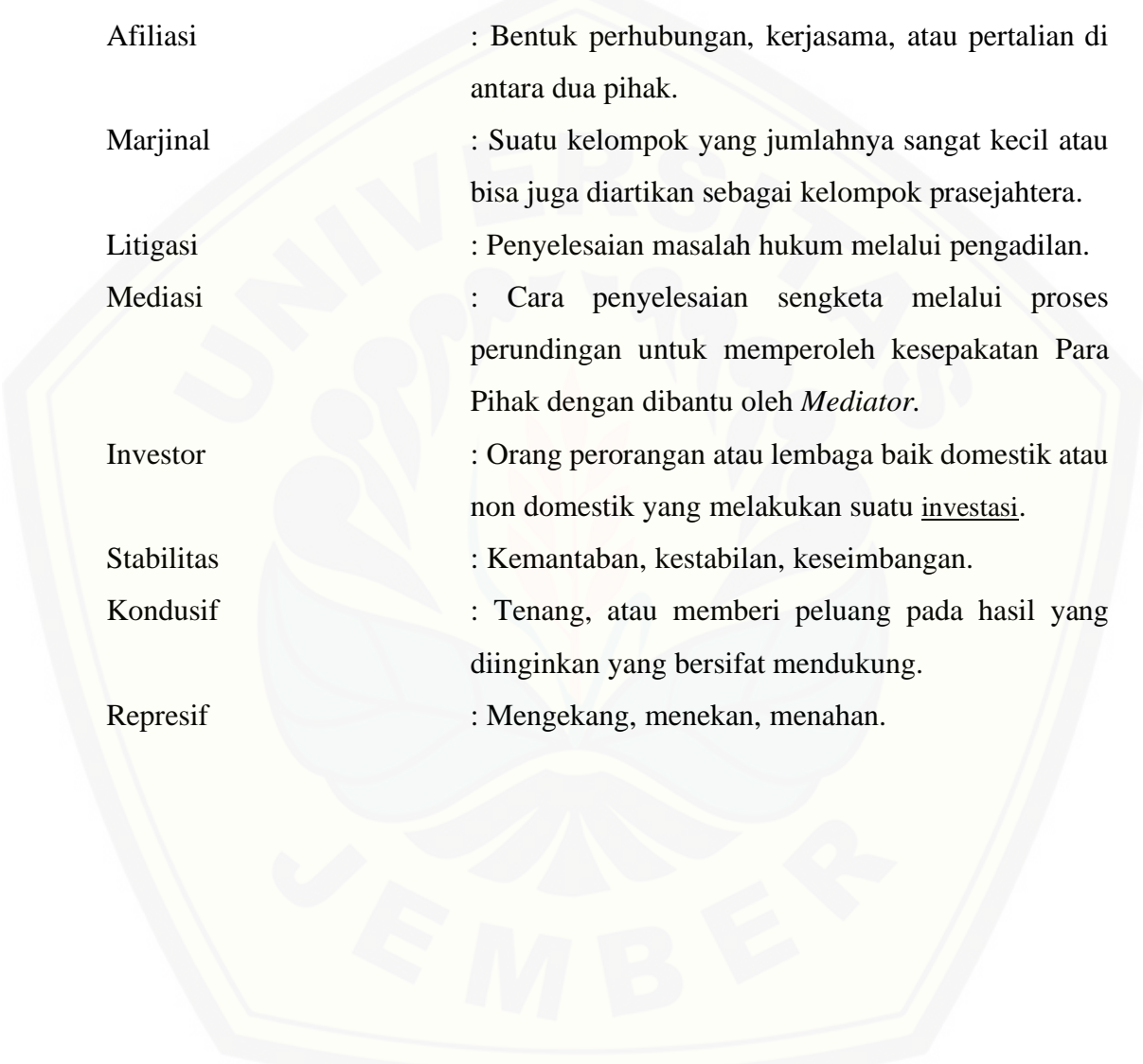
AD ART	: Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga
Bakin	: Badan Koordinasi Intelejen Negara
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
CSI	: Centraal Serikat Islam
DPC	: Dewan Perwakilan Cabang
DPP	: Dewan Perwakilan Pusat
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
G30S	: Gerakan 30 September
GASBI	: Gabungan Serikat Buruh Indonesia
Gasbri	: Gabungan Sarikat Buruh Revolusioner Indonesia
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GOBSII	: Gabungan Organisasi Buruh Sarekat Islam Indonesia
GSBV	: Gabungan Serikat Buruh Vertikal
Hissbi	: Himpunan Serikat-Serikat Buruh Seluruh Indonesia
HPP	: Hubungan Perburuhan Pancasila
IBNU	: Ikatan Buruh Nahdlatul Ulama
ICFTU	: International Confederation of Free Trade Unions
ILO	: International Labour Organization
KABI	: Kesatuan Aksi Buruh Indonesia
KBKI	: Konfederasi Buruh Kerakyatan Indonesia
KBSI	: Kongres Buruh Seluruh Indonesia
KBM	: Konfederasi Buruh Merdeka
KODIM	: Komando Distrik Militer
Kopegtel	: Koperasi Pegawai Telkom
LP2TKI	: Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MIAI	: Majelis Islam A'laa Indonesia
Nasakom	: Nasional, Islam dan Komunis



OB Pancasila	: Organisasi Buruh Pancasila
VSTP	: Vereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
PFB	: Personeel Fabriek Bond
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PR PRT	: Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PARKINDO	: Partai Kristen Indonesia
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PN	: Perusahaan Nasional
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PP	: Peraturan Perusahaan
PGHB	: Persatuan Guru Hindia-Belanda
Putera	: Pusat Tenaga Rakyat
PETA	: Pembela Tanah Air
P4D	: Panitia Penyelenggara Perselisihan Perbaruan Daerah
PHI	: Pengadilan Hukum Industri
SPSI	: Sentral Pekerja Seluruh Indonesia
SBII	: Sarikat Buruh Islam Indonesia
Sarbumusi	: Serikat Buruh Muslimin Indonesia
SBKI	: Sarekat Buruh Kristen Indonesia
SOKSI	: Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia
SBNU	: Serikat Buruh Nahdlatul Ulama
SDM	: Sumber Daya Manusia
SI	: Serikat Islam
TLH	: Tenaga Lepas Harian
VIPBOW	: Vereeniging Inlandsche Personeel Burgelijke Oopenbare Worken
WFTU	: World Federation of Free Trade Union

## DAFTAR ISTILAH

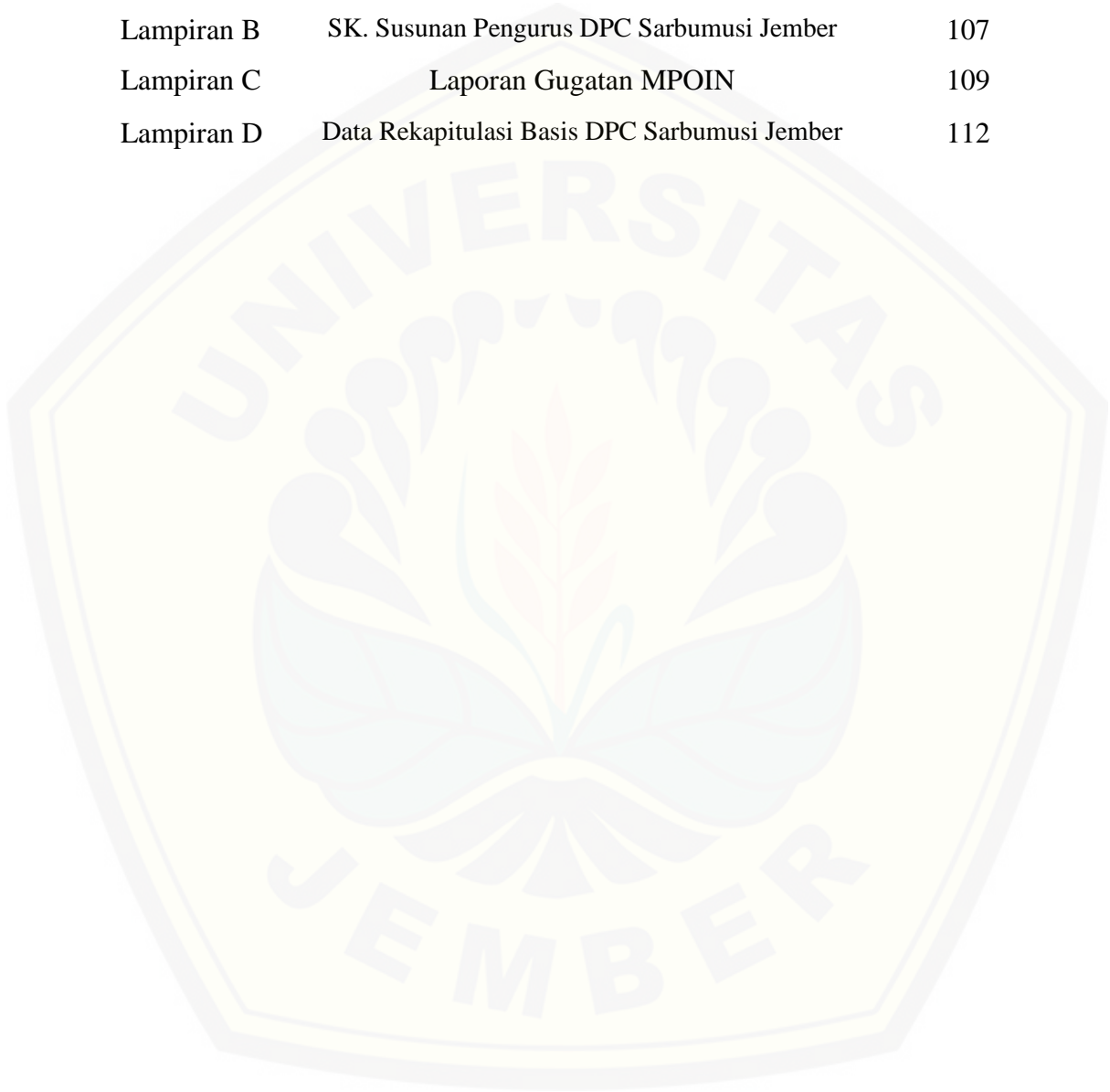
Muktamar	: Pertemuan permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi.
Sokoguru Revolusi	: Tiang utama sebuah perubahan atau menuju perubahan.
Badan Otonom	: Unit kegiatan yang bertugas mengurus kelompok tertentu.
SI Merah	: Serikat Islam yang berhaluan sosialis kiri atau condong pada paham komunis.
SI Putih	: Serikat islam yang berhaluan islamis murni.
Primordial Keagamaan	: Penciptaan ukuran moralitas internal/diri sendiri dalam memandang sebuah agama
Konversi	: Perubahan dari satu system pengetahuan ke system yang lain.
Kubu Kiri	: Kelompok yang biasanya dihubungkan dengan aliran sosialis atau demokrasi sosial
Kubu Kanan	: Kelompok yang biasanya dihubungkan dengan aliran keagamaan.
Pemberangusan	: Tata cara, kegiatan, perbuatan penutupan.
Advokasi	: Suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif.
Konferensi	: Rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Eksistensi	: Apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa yang dialami.



Etos	: Semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.
Hak Normatif	: Hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Afiliasi	: Bentuk perhubungan, kerjasama, atau pertalian di antara dua pihak.
Marjinal	: Suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok prasejahtera.
Litigasi	: Penyelesaian masalah hukum melalui pengadilan.
Mediasi	: Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh <i>Mediator</i> .
Investor	: Orang perorangan atau lembaga baik domestik atau non domestik yang melakukan suatu <u>investasi</u> .
Stabilitas	: Kemantaban, kestabilan, keseimbangan.
Kondusif	: Tenang, atau memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung.
Represif	: Mengekang, menekan, menahan.

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Nomor</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran A	Tanda Bukti Pencatatan Dinas Tenaga Kerja	106
Lampiran B	SK. Susunan Pengurus DPC Sarbumusi Jember	107
Lampiran C	Laporan Gugatan MPOIN	109
Lampiran D	Data Rekapitulasi Basis DPC Sarbumusi Jember	112





## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang dinamika perjuangan DPC Sarbumusi Jember semenjak berdirinya yakni tahun 2001 hingga tahun 2020. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Mengapa DPC Sarbumusi dibentuk di Jember? (2) Apa saja yang dilakukan DPC Sarbumusi Jember dalam kurun waktu 2001-2020? (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang pernah dilakukan oleh DPC Sarbumusi Jember ?. Teori yang digunakan adalah teori marxisme dengan pendekatan sosiologi politik dan metode yang digunakan adalah metode sejarah. DPC Sarbumusi merupakan sebuah serikat buruh di bawah badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri di Jember pada tanggal 15 Juni 2001. DPC Sarbumusi Jember dibentuk atas dasar mewadahi sebuah pergerakan kelompok buruh Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel) agar secara kekuatan hukum memiliki legalitas dan memiliki visi misi nyata yang selama ini di miliki oleh Sarbumusi. DPC Sarbumusi Jember tumbuh dan berkembang sebagai sebuah serikat buruh yang pada tahun 2001 hanya memiliki 5 basis dan 400 anggota, hingga pada tahun 2020 mampu memiliki 75 basis dan 7500 anggota. Selama berdirinya DPC Sarbumusi Jember, telah berhasil memberi pendampingan dan bantuan dalam kurang lebih 400 kasus permasalahan buruh di Jember. DPC Sarbumusi Jember sebagai sebuah kekuatan social baru bagi masyarakat memiliki mekanisme keorganisasian dan sumber daya manusia yang sangat kuat. DPC Sarbumusi Jember mendedikasikan dirinya sebagai serikat yang memberi pendampingan, pengawasan, edukasi dan memberi advokasi kepada buruh pada setiap permasalahan perburuhan dan ketenagakerjaan.

**Kata Kunci :** DPC Sarbumusi Jember, Serikat Buruh.

## ABSTRACT

This study discusses the dynamics of the DPC Sarbumusi Jember struggle since its establishment, namely 2001 to 2020. The problems in this study are (1) Why was DPC Sarbumusi formed in Jember? (2) What did DPC Sarbumusi Jember do in the 2001-2020 period? (3) What was the impact of the activities carried out by DPC Sarbumusi Jember? The theory used is the theory of Marxism with a political sociology approach and the method used is a historical method. DPC Sarbumusi is a labor union under the autonomous body Nahdlatul Ulama (NU) which was established in Jember on June 15, 2001. DPC Sarbumusi Jember was formed on the basis of accommodating a movement of the Telkom Employees Cooperative (Kopegtel) labor group so that legally it had legality and ownership. The real vision and mission that Sarbumusi has had. DPC Sarbumusi Jember grew and developed as a labor union which in 2001 only had 5 bases and 400 members, until by 2020 it was able to have 75 bases and 7500 members. During the establishment of DPC Sarbumusi Jember, it has succeeded in providing assistance and assistance in approximately 400 cases of labor problems in Jember. DPC Sarbumusi Jember as a new social force for the community had a very strong organizational mechanism and human resources. DPC Sarbumusi Jember dedicated itself as a union that provided assistance, supervision, education and advocacy to workers on every labor and employment issue.

**Keywords:** DPC Sarbumusi Jember, Labor Union.

## RINGKASAN

**Dinamika Perjuangan DPC Sarbumusi Jember pada Tahun 2001-2020,**  
Beny Widia Putra, 130110301036; 2013; Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu  
Budaya, Universitas Jember.

Tumbuh kembang gerakan buruh di Indonesia berjalan selaras dengan semangat nasionalisme yang muncul di Indonesia. Pada situasi dan kondisi tertentu, gerakan buruh di Indonesia menjadi barometer keberhasilan regenerasi kaum nasionalis. pasca kefakumannya Sarbumusi di masa Orde Baru 1998, Sarbumusi berusaha memperluas pengaruh dan kekuatannya sebagai serikat buruh dengan membentuk wadah serikat baru di wilayah cabang daerah Jember, yaitu DPC Sarbumusi Jember. Pembentukan DPC Sarbumusi Jember ini juga dalam rangka memberi perlindungan dan kekuatan baru pada kelompok pergerakan buruh Kopegtel Jember yang dipimpin oleh Iswinarso dalam usahanya memperjuangkan hak nofmatif para buruh Tenaga Lepas Harian Kopegtel.

Pada tanggal 15 Juni 2001 DPC Sarbumusi berdiri di Jember. diketuai pertama kali oleh Kholili, yang sebelumnya menjabat sebagai ketua LP2TKI sebagai lembaga yang bergerak di dunia buruh imigran Indonesia. Kholili dirasa memiliki kemampuan dan pengalaman, itulah alasan dia dijadikan ketua pertama DPC Sarbumusi saat itu. Namun selama 3 tahun masa jabatannya, Kholili hanya mampu mengembangkan DPC Sarbumusi sampai memiliki 5 basis dengan sekitar 400 anggota. Iswinarso yang saat itu menjabat sebagai sekretaris akhirnya menggantikan posisi Kholili, sesuai dengan hasil Konfercab Luar Biasa yang menyepakati terpilihnya Iswinarso dengan cara aklamasi. Dibawah kepemimpinan Iswinarso dari tahun 2004 hingga 2010, DPC Sarbumusi mampu berkembang pesat hingga bisa memiliki 55 basis dengan total anggota mencapai 4000 anggota. Perkembangan ini lalu dilanjutkan di masa kepemimpinan Umar Faruk,

pada tahun 2010 hingga 2020 sebagai ketua ketiga DPC Sarbumusi Jember, yang mampu mengembangkan DPC Sarbumusi menjadi 75 basis dengan total anggota 7500.

Perkembangan DPC Sarbumusi Jember pada tiap tahunnya di bawah kepemimpinan Iswinarso dan Umar Faruk menandakan eksistensi serikat buruh Sarbumusi di Jember yang sangat tinggi. Mampu memperluas pengaruh dan menambah kekuatan dari banyak sektor industry, juga semakin mendorong dunia perburuhan kearah yang lebih baik.

Sesuai dengan tugas dan fungsi serikat buruh, yaitu mengawal, mengawasi, mengedukasi dan memberi advokasi kepada para buruh dan tenaga kerja. Berdirinya DPC Sarbumusi di Jember, dari awal adalah untuk memberi kekuatan baru kepada buruh dalam memperjuangkan hak hidup sejahtera mereka. Menjadi penengah, pembela dan juga secara nyata berjuang bersama para buruh. Membangun sebuah kekuatan sosial baru ditengah masyarakat secara luas. Turut menjaga, mengawasi dan mengontrol stabilitas dan kondusifitas pada dunia perburuhan dan ketenagakerjaan di Jember. Bersama dengan buruh, membangun kekuatan sosial baru ditengah masyarakat luas untuk berani, kritis dan secara cerdas mengkritisi segala kebijakan dan keputusan pengusaha ataupun pemerintah yang itu dirasa tidak sesuai dan merugikan para buruh. Memupuk dan mengembangkan pemahaman tadi bersama pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai buruh dan tenaga kerja di Indonesia dan Jember khususnya.

Segala usaha yang di upayakan Sarbumusi di Jember, sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para buruh. Dengan adanya pengawasan dan perlindungan kepada buruh dari setiap basis di perusahaan, akan meningkatkan mawas diri dari pribadi para buruh, secara cerdas dan teliti mengenali dan memahami setiap kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan, dan menjaga etos kerja demi nama baik serikat Sarbumusi. Pemahaman dan kesadaran yang mulai tumbuh, nantinya akan menumbuhkan rasa memiliki dan berani menyuarakan dan

memperjuangkan adanya ketidakadilan dan ketidak sesuaian yang terjadi yang itu melenceng dari keinginan para buruh untuk hidup sejahtera sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Buruh yang juga Sebagian dari masyarakat akan menjadi sosok baru, elemen masyarakat yang memiliki kekuatan secara hukum, keberanian secara cerdas dan teliti dalam mengkritisi suatu permasalahan dan kepedulian yang tinggi dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan para buruh.

Kondisi yang semakin tertata secara mandiri dalam tiap perusahaan ini akan membangun kondisi yang cukup stabil dan kondusif jika di imbangi dengan kesadaran pada tiap perusahaan dan meningkatnya perhatian pemerintah. DPC Sarbumusi secara tidak langsung dalam upayanya mengawasi, melindungi dan memberi edukasi kepada para buruh, juga menjaga dan mempertahankan kondisi itu tadi, karena stabilitas di dunia perburuhan dan ketenagakerjaan juga menguntungkan bagi Sarbumusi dan para buruh serta masyarakat khususnya, karena bisa menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya dan membuka perusahaan di Jember dalam rangka meningkatkan perekonomian Jember dari sektor industry. Akan menjamin kesejahteraan masyarakat dan buruh serta meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk lebih bisa mengetahui secara kronologis dinamika perjuangan DPC Sarbumusi di Jember, dalam penulisan ini menggunakan metode sejarah sebagai dasar penyusunannya. Melalui tahap pencarian sumber yang otentik dan kredibel dan teruji keasliannya dan penyusunan yang kronologis, akan bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya Sarbumusi di Jember, dengan tujuan dan upayanya dalam mengawal, mengawasi dan berjuang bersama para buruh. Keberadaanya pun sebagai salah satu serikat buruh di Jember menggambarkan seberapa besar eksistensinya selama ini, mampu ikut membangun pemahaman dan kesadaran kepada para buruh agar tidak hanya kerja dan dapat upah yang mereka tau, tapi betapa pentingnya mengetahui alasan dibuatnya peraturan ketenagakerjaan untuk mendisiplinkan pengusaha dan perusahaannya dalam setiap kebijakan

mereka agar tidak merugikan buruh. Buruh pun akan lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sesuai peraturan ketenagakerjaan demi membangun etos kerja dan rasa cinta mereka pada dunia kerja mereka.

Perjuangan DPC Sarbumusi Jember bersama para buruh dengan raturan kasus permasalahan buruh dengan pengusaha yang melibatkan pemerintah daerah didalamnya, memberi banyak dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan Sarbumusi. Dari banyaknya gesekan akan muncul kesadaran dan perjuangan. DPC Sarbumusi Jember dalam kontribusinya membawa banyak keberhasilan pembelaan dan perjuangannya bersama buruh, memberi banyak dampak positif bagi para buruh yang tergabung dalam DPC Sarbumusi, masyarakat secara umum dan juga bagi pemerintah daerah. Membangun kekuatan sosial baru sebagai serikat buruh berideologi Islam ditengah pertumbuhan dan perkembangan dunia perburuhan dan ketenagakerjaan di Jember.

## SUMMARY

**The Struggle Dynamics of DPC Sarbumusi Jember in 2001-2020**, Beny Widia Putra, 130110301036; 2013; History Study Program, Faculty of Humanities, University of Jember.

The growth and development of the labor movement in Indonesia went hand in hand with the spirit of nationalism that has emerged in Indonesia. In certain situations and conditions, the labor movement in Indonesia has become a barometer of the success of nationalist regeneration. After Sarbumusi's popularity during the New Order era in 1998, Sarbumusi tried to expand its influence and power as a labor union by forming a new union forum in the Jember regional branch, namely DPC Sarbumusi Jember. The formation of the DPC Sarbumusi Jember was also in order to provide protection and new strength to the Kopectel Jember labor movement group led by Iswinarso in an effort to fight for the nonfmatif rights of Kopectel Daily Freelance workers.

On 15 June 2001 DPC Sarbumusi was established in Jember. Chaired for the first time by Kholili, who previously served as chairman of LP2TKI as an institution engaged in the world of Indonesian immigrant workers. Kholili was felt to have the ability and experience, that is the reason he was made the first chairman of DPC Sarbumusi at that time. However, during his 3-year tenure, Kholili was only able to develop DPC Sarbumusi to have 5 bases with around 400 members. Iswinarso, who at that time served as secretary, eventually replaced Kholili, according to the results of the Extraordinary Conference which agreed to the election of Iswinarso by way of acclamation. Under Iswinarso's leadership from 2004 to 2010, DPC Sarbumusi was able to grow rapidly so that it could have 55 bases with a total membership of 4000 members. This development was then continued during Umar Faruk's leadership, from 2010 to 2020 as the third chairman of the Jember Sarbumusi DPC, which was able to develop DPC Sarbumusi into 75 bases with a total of 7500 members.

The development of the DPC Sarbumusi Jember each year under the leadership of Iswinarso and Umar Faruk indicated the very high existence of the Sarbumusi labor union in Jember. Able to expand influence and increase the strength of many industrial sectors, as well as to further encourage the world of labor towards a better direction.

In accordance with the duties and functions of the labor union, namely overseeing, supervising, educating and providing advocacy to workers and laborers. The establishment of DPC Sarbumusi in Jember, from the start, was to give new strength to workers in fighting for their right to live a prosperous life. Become a mediator, defender and also actually fight with the workers. It tried to build a new social force in the midst of society at large, also to maintain, supervise and control stability and conduciveness in the world of labor and employment in Jember. Together with workers, building new social forces in the midst of society at large to be brave, critical and intelligently criticize all policies and decisions of employers or the government that are deemed inappropriate and detrimental to workers. It tried to cultivate and develop this understanding together with an understanding of their rights and obligations as laborers and workers in Indonesia and Jember in particular.

All the efforts made by Sarbumusi in Jember were in accordance with what the workers want and need. With the supervision and protection of workers from every base in the company, it will increase the personal introspection of the workers, intelligently and thoroughly recognize and understand every policy applied by the company, and maintain the work ethic for the good name of the Sarbumusi union. Understanding and awareness that begin to grow, will later foster a sense of belonging and the courage to speak out and fight for the injustice and discrepancies that occur, which deviate from the workers' desire to live in prosperity in accordance with applicable labor regulations. Workers who are also part of society will become new figures, elements of society who have the power of law, courage intelligently and thoroughly in criticizing a problem and high concern in voicing and fighting for the interests of workers.



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Buruh<sup>1</sup> atau pekerja adalah orang yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan sebagai karyawan dengan mendapatkan upah. Dalam bahasa kasarnya adalah sebutan bagi seseorang yang bekerja kepada orang lain atau majikan untuk mendapatkan upah atau gaji. Perlakuan yang kasar serta perampasan hak-hak manusiawi baik dari sosial, ekonomi, dan politik seorang buruh, pada dasarnya sangat sering terjadi dalam sejarah panjang perburuhan manakala nilai hak asasi manusia banyak dipandang senilai dengan bobot kerja dan upah yang pantas mereka terima, sehingga akan muncul masalah ketidakadilan dan kesejahteraan pekerja.

Manusia pada dasarnya hanya menuntut kesetaraan dan hak normatifnya ketika berada di lingkungan kerja ataupun di tengah masyarakat, semua disesuaikan terhadap seberapa besar kontribusi mereka terhadap lingkungan dan perusahaan. Hal ini akan menjadi sulit ketika buruh bergerak dan berjuang sendiri, kasusnya akan semakin merugikan buruh ketika penghasilan satu-satunya harus dipertaruhkan. Dari kondisi seperti itu dibutuhkan sebuah naungan yang mampu merangkul para buruh, membangun rasa kepedulian bersama demi kesejahteraan

---

<sup>1</sup> KBBI. [online] dalam [kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/Buruh](http://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/Buruh) diunduh pada tanggal 10 Mei 2020.

buruh, sebuah perserikatan untuk para buruh demi memperjuangkan hak-hak mereka dan demi menegakkan keadilan untuk para buruh. Serikat buruh, sebagai bentuk adaptasi kepada negara Indonesia sebagai negara pluralis dengan beragam suku bangsa, ras dan agama, menempatkan segala bentuk perbedaan sebagai kekayaan Indonesia mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara.

Kaum buruh di Indonesia juga merupakan salah satu bagian dari masyarakat dan secara hak asasi manusia juga memiliki hak untuk berorganisasi, berkumpul, berserikat, berpendapat, memberikan saran mendirikan organisasi, dan mengurus sebuah organisasi. Sangat jelas bahwa buruh bisa membentuk sebuah perserikatan untuk para buruh atau serikat pekerja itu sendiri. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk buruh mendapatkan haknya untuk bertanya, memberi saran, memberi masukan secara lisan maupun tertulis, bahkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>2</sup> Dalam setiap kurun waktu, gerakan buruh selalu mempunyai persamaan umum di setiap wilayah Indonesia yakni menuntut hak-hak normatif. Serikat buruh juga tidak terlepas dari pengaruh iklim perpolitikan nasional, hal inilah yang menyebabkan munculnya serikat buruh.<sup>3</sup> Perserikatan buruh atau serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para buruh itu sendiri, baik dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan yang memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna menggerakkan para buruh untuk memperjuangkan hak para buruh untuk memperoleh pembelaan, perlindungan, dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.

Awal berdirinya serikat buruh di Indonesia tercatat sejak masa kolonialisme Hindia Belanda. Pada tahun 1945 sampai dengan 1960 serikat buruh terus berdiri dan berkembang di Indonesia, ditambah lagi pada tahun-tahun itu juga semua partai politik masing-masing mendirikan serikat buruh. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengumpulkan jumlah anggota partai sebanyak-banyaknya, terutama menjelang

---

<sup>2</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Buruh Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 1.

<sup>3</sup> Amalya Isa Yulianti, *Sejarah Perjuangan SARBUMUSI Terhadap Kaum Buruh Di Sidoarjo Tahun 2000-2014 M*, Thesis. Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 2.

pelaksanaan pemilihan umum pertama tahun 1955. Salah satu bentuk politik praktis dari para partai ini membentuk banyak kubu serikat buruh, seperti Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang berafiliasi dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Gabungan Organisasi Buruh Sarekat Islam Indonesia (GOBSII) dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Sarekat Buruh Kristen Indonesia (SBKI) dengan Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Organisasi Buruh Pancasila (OB. Pancasila) dengan Partai Katolik Indonesia dan Partai Rakyat Nasional (PRN) angkatan darat juga melakukan pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961.<sup>4</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi ulama tradisional dikenal memiliki jama'ah yang sangat banyak, terutama ketika tumbuh kembang di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam. Titik awal bagi kaum buruh Nahdliyin untuk memperjuangkan nasibnya sekaligus ikut menentukan sejarah gerakan buruh ditandai pada saat menjelang pemilu 1955, NU memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 telah memutuskan untuk membentuk suatu serikat buruh pada Mukhtamar NU tahun 1954 di Surabaya. Para buruh Nahdliyin di berbagai kota dan meliputi berbagai sektor produksi dan jasa berinisiatif membentuk berbagai serikat buruh seperti Ikatan Buruh Nahdlatul Ulama (IBNU) di Karawang dan Serikat Buruh Nahdlatul Ulama (SBNU) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.<sup>5</sup> Serikat-serikat buruh inilah yang berkumpul di Pabrik Gula Tulangan Sidoarjo pada tahun 1955 untuk melancarkan pembentukan serikat buruh dari partai Nahdlatul Ulama (NU) dengan nama Serikat Buruh Muslim Indonesia

---

<sup>4</sup> Tongam Panggabean, *Gerakan Serikat Buruh DI Medan 1971-1990, Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 2

<sup>5</sup>Eka Fitri Rohmawati, dkk. *Sejarah Gerakan Sarbumusi*. (Jakarta: DPP KONFEDERASI SARBUMUSI. 2016), hlm. 17

(SARBUMUSI) yang didirikan pada tanggal 9 Shafar 1375 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 September 1955 yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan yang menjadi latar belakang para ulama Nahdlatul Ulama mendirikan Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) adalah hasil Muktamar Partai Politik Nahdlatul Ulama (NU) ke XX di Surabaya tahun 1954.<sup>6</sup>

Organisasi buruh Sarbumusi tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, Sarbumusi hanyalah badan otonom NU dan keanggotaan Sarbumusi tidak didasarkan pada aliran politik, ras, agama, suku bangsa serta jenis kelamin.<sup>7</sup> Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan taraf hidup, perlindungan dan kesejahteraan kaum buruh serta keluarganya, juga untuk meningkatkan martabat keluarga para kaum buruh. Kegiatan advokasi yang distrategikan oleh Sarbumusi juga mampu secara efektif memberikan perlindungan kepada kaum buruh, di tengah persaingannya dengan puluhan serikat buruh lainnya.

Lahirnya Sarbumusi menunjukkan adanya apresiasi dari kalangan Nahdliyin terhadap nasib kaum buruh. Kalangan Nahdliyin yang biasa menggunakan kitab-kitab klasik Islam sebagai acuan untuk menjawab permasalahan sosial, dalam konteks perburuhan juga menggunakan argumentasi normatif keagamaan untuk menunjukkan apresiasinya terhadap permasalahan perburuhan. Ada dua hadist Rasullallah Muhammad S.A.W. yang berkaitan dengan masalah perburuhan. Hadist pertama berbunyi: “Bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering”. Sementara hadist kedua berbunyi: “barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja, maka beritahukan berapa upah yang diperoleh oleh si buruh (ajiir)”. Kontrak kerja tersebut sekarang dikenal dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).<sup>8</sup>

Di sisi lain kelahiran Sarbumusi di kalangan jam’iyah NU menjelang pemilu 1955 menimbulkan suatu penafsiran bahwa NU hendak menggalang dukungan serta menanamkan pengaruhnya di kalangan buruh demi memenangkan NU pada

---

<sup>6</sup> Amalya Isa Yulianti., *op.cit.*, hlm. 6

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>8</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 17

pemilu 1955. Penafsiran ini sedikit banyak bisa dimengerti, namun jika dilihat dari legitimasi keagamaan dan konteks sosial historis keberadaan jam'iyah NU yang senantiasa menjadi oposisi utama terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda dan telah menjadi representasi yang baik dari gerakan rakyat tertindas melawan penindasan pemerintah kolonial, maka penafsiran yang tendensius dan hanya berorientasi politik praktis jangka pendek layak untuk dikesampingkan. Kalangan pesantren yang menjadi penopang utama NU telah lama menjadi simbol baru bagi kalangan masyarakat bawah untuk membebaskan mereka dari penindasan. Kelahiran Sarbumusi di sebuah pabrik gula dan kemudian tumbuh dan berkembang secara pesat pada komunitas buruh di pabrik gula dan perkebunan tebu bukanlah suatu kebetulan dan terjadi di ruang hampa.

Bukan Sarbumusi saja serikat buruh yang berdiri di sekitar pabrik gula dan perkebunan gula, ada juga *Personeel Fabriek Bond* (PFB). PFB berbusat di Yogyakarta dan berafiliasi pada SI Putih. Sementara itu, di Semarang terdapat sebuah serikat buruh yang berbasis komunitas buruh kereta api *Vereeniging Spoor Tramweeg Personeel*, (VSTP) dan berafiliasi pada SI Merah.<sup>9</sup> Sarbumusi sendiri pertama diketuai oleh K.H. Tharir Bakri 1945-1961. Pada tahun 1955, K.H. Tharir Bakri mendirikan Sarbumusi di Pabrik Barta, Ngagel, Surabaya. Di bawah kepemimpinan K.H. Tharir Bakri, Sarbumusi yang berpusat di Surabaya menghadapi banyak tentangan dari serikat buruh yang telah ada seperti SOBSI (PKI) dan KBKI (PNI). Hal ini disebabkan kekhawatiran dari mereka bahwa kehadiran Sarbumusi akan mengurangi kekuatan serikat-serikat buruh yang telah ada.<sup>10</sup>

Pimpinan kedua Sarbumusi adalah K.H. Masykur, seorang ulama sepuh NU yang pada masa kepemimpinannya Sarbumusi berpindah dari Surabaya ke Jakarta dan berkembang secara pesat. Pemimpin ketiga Sarbumusi adalah Drs. H. Soetanto Martoprasono yang terpilih pada Kongres Akbar III Sarbumusi tahun 1969. Pada

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>10</sup> Alfanny, *Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) 1955-1973. Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2001, hlm. 34

masa kepemimpinannya, Soetanto Martoprasono mendirikan Sarbumusi di Pabrik Gula Madukismo, dimana Soetanto pada saat itu hampir tidak pernah menghadapi kesulitan apapun dalam perjalanannya mendirikan Sarbumusi, dikarenakan saat itu Pabrik Gula Madukismo merupakan Perusahaan Negara (PN) yang di pimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan karena Soetanto saat itu berstatus Pegawai Negeri di Departemen Pengerahan Tenaga Rakyat.<sup>11</sup>

Menjelang meletusnya peristiwa G30S, NU mengalami dilema yang luar biasa, manakala demokrasi terpimpin sedang gencar-gencarnya memaksa NU untuk turut menyokong atau jika tidak akan terancam bubar seperti yang dialami partai Masyumi. Di ranah serikat buruh, suhu politik di tanah air juga semakin memanas, manakala Presiden Soekarno mengayunkan pendulum politik Indonesia ke arah kiri. Terjemahan dari politik Soekarno yang bergerak ke arah kiri ini ialah dijalankannya politik konfrontasi terhadap kekuatan kapitalis dan pihak-pihak lain yang dianggap menjadi kepanjangan tangan kapitalisme. Politik konfrontasi tersebut pada situasi tertentu dimanfaatkan oleh PKI untuk memobilisasi pendukungnya, salah satunya SOBSI dan Pemuda Rakyat, dalam bentuk penugasan untuk membantu para perwira progresif revolusioner mengamankan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal.

Sebagai serikat terbesar di Indonesia saat itu, SOBSI yang secara langsung merupakan badan otonom Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sorotan utama Sarbumusi dalam mengambil setiap langkahnya. Pembersihan SOBSI pasca peristiwa G30S yang dilakukan Pemerintah Presiden Soeharto menjadikan Sarbumusi harus mengambil peranan dalam menghancurkan sisa-sisa SOBSI. Serikat-serikat buruh yang saat itu anti SOBSI kemudian bersatu membentuk Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) dengan AD Siregar salah seorang pimpinan DPP Sarbumusi sebagai salah seorang yang menjadi ketuanya. Salah satu aksi yang dilakukan adalah instruksi langsung yang turun dari ketua Sarbumusi K.H. Masykur kepada seluruh anggota Sarbumusi di berbagai daerah agar menguasai dan mengambil alih sarana komunikasi, jaringan kereta api, pabrik-

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 35

pabrik, dan sarana vital lainnya. Para anggota PKI dan ormas-ormasnya termasuk SOBSI ditangkapi. Seorang anggota Sarbumusi di Palembang yang bekerja di Perusahaan Negara (PN) Pertamina, Plaju, Palembang, Rasjid mengungkapkan bahwa pasca peristiwa G30S 1965, para pengurus Persatuan Buruh Minyak (Perbum) yang menginduk pada SOBSI juga di tangkap.<sup>12</sup> Selanjutnya membentuk sebuah aksi kesatuan di Kediri, pemimpin cabang Sarbumusi di PG Tjoekir yang berinisial R.A.

R.A memimpin anggota Sarbumusi, Ansor dan para santri untuk melakukan serangan terhadap PKI. R.A merencanakan untuk menyerang loji PG Tjoekir yang terdapat beberapa pegawai satu PG Tjoekir yang berafiliasi dengan SOBSI. Polisi yang menyelidiki penyerangan tersebut tidak berani menangkap R.A sehingga membuat pengaruh R.A meluas dan menjadikan pusat gerakan pembersih anggota PKI berada di sekitar kawasan PG Tjoekir. Sejak saat itu, R.A memimpin Sarbumusi untuk membersihkan para buruh dan pegawai PG dan perkebunan yang menjadi anggota SOBSI.

Walaupun Sarbumusi dan ormas-ormas di bawah NU lainnya menjadi garda depan dalam upaya pembersihan sisa-sisa PKI, tapi yang terjadi terhadap sikap pemerintah Presiden Soeharto malah merugikan Sarbumusi. Salah satu hal yang mengecewakan pihak Sarbumusi adalah pembersihan PKI yang dilakukan Pemerintah Presiden Soeharto dalam pelaksanaannya banyak menyimpang dan terkesan salah sasaran.<sup>13</sup> Banyak kaum buruh yang tidak menjadi anggota SOBSI turut menerima pemecatan sepihak secara tidak hormat. Salah satunya adalah PN Kertas Padalarang, seorang anggota Sarbumusi, Suherly yang menjabat sebagai kepala Humas PN Kertas Padalarang ditahan di Komando Distrik Militer (KODIM) Cimahi karena dituduh terlibat G30S. Alasannya adalah terpilihnya Suherly sebagai Ketua Koperasi Pegawai di PN Kertas Padalarang adalah karena dukungan yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 40

<sup>13</sup> Fealy, Greg (ed.), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta, LKiS. Yogyakarta. 1997, hlm. 24

berasal dari karyawan PN Kertas Padalarang yang mayoritas anggota SOBSI.<sup>14</sup> Di tempat lain seorang pekerja Bank Ekspor-Impor Indonesia, Jakarta yang juga menjadi anggota Sarbumusi, Syarifudin Hamidy diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan terdaftar sebagai anggota SOBSI menjelang peristiwa G30S. Peristiwa ini sangat mungkin terjadi mengingat SOBSI sering melakukan klaim keanggotaan dengan mengedarkan formulir nama dan cap jempol dengan janji mendapatkan bantuan beras dan pakaian.<sup>15</sup>

Salah satu tindakan represif yang diperlihatkan Pemerintahan Presiden Soeharto lainnya adalah menjelang Pemilu 1971. Ketua Umum DPP Sarbumusi, Drs. H. Soetanto Martoprasono merasa bahwa masa peralihan dari Pemerintah Presiden Soekarno menuju Pemerintah Presiden Soeharto merupakan titik balik bagi perjalanan Sarbumusi sebagai salah satu *underbouw* NU, Sarbumusi yang berada di garis depan pemberantasan SOBSI/PKI, namun TNI AD yang menjadi partner bagi gerakan massa anti PKI malah menampilkan wajah kediktatorannya dengan menunda pelaksanaan Pemilu. Di bidang perburuhan, Pemerintah Presiden Soeharto mencoba mengendalikan gerakan buruh dengan menerapkan berbagai kebijakan yang sangat represif dan memasung hak hukum buruh terutama hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi. Kebijakan perburuhan Pemerintah Presiden Soeharto dibangun berdasarkan kepentingan Pemerintah Presiden Soeharto untuk menarik sebanyak-banyaknya investor asing sekaligus meyakinkan mereka bahwa iklim penanaman modal di Indonesia cukup kondusif. Dalam kerangka inilah Pemerintah Presiden Soeharto menerapkan kebijakan perburuhan yang memberikan jaminan keamanan berinvestasi, dengan membuat 3 kebijakan perburuhan Pemerintahan Presiden Soeharto.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hafidz, Vedi, R. *Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta. Prisma, LP3ES. 1997. hlm. 19

<sup>15</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *op.cit.*, hlm. 29.

<sup>16</sup> Hafidz, Vedi, R. *op.cit.*, hlm. 38.



Pertama, kebijakan Pemerintah Presiden Soeharto untuk menempatkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai satu-satunya penghubung serikat buruh dengan lembaga-lembaga luar negeri. Kedua, kebijakan Pemerintah Presiden Soeharto tentang pembentukan Korps Karyawan (KOKAR) yang kemudian menjadi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagai wadah kaum buruh yang menjadi pegawai negeri. Pembentukan KOKAR ini disusul dengan keharusan pegawai negeri untuk loyal kepada pemerintah dan karena itu mereka harus melepaskan keanggotaannya di berbagai serikat buruh.

Ketiga, kebijakan Pemerintah Presiden Soeharto tentang pembentukan wadah tunggal bagi kaum buruh Indonesia. Upaya ini dimaksudkan agar Pemerintah Presiden Soeharto dapat melakukan kontrol ketat terhadap aktivitas gerakan buruh dalam kerangka stabilitas politik demi pertumbuhan ekonomi.

Ketiga kebijakan perburuhan Pemerintah Presiden Soeharto ini mendapatkan respon dari Sarbumusi berupa penentangan keras yang dilakukan berulang kali yang pada akhirnya Sarbumusi tetap menemui kegagalan dan dengan terpaksa menerima nasib pahit ketika Pemerintah Presiden Soeharto memaksa Sarbumusi meleburkan diri dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) bersama serikat buruh lainnya pada tahun 1973.<sup>17</sup> Dengan berdirinya FBSI, serikat-serikat buruh lama dinyatakan tidak akan dibubarkan atau dilarang secara resmi oleh pemerintah. Menurut Drs. H. Soetanto Martoprasono, pemerintah menempuh cara lain untuk membubarkan serikat-serikat buruh lama dengan cara memperkuat eksistensi FBSI dan sekaligus memperlemah eksistensi serikat buruh lama, yaitu dengan memberikan monopoli pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dengan pengusaha hanya kepada FBSI. Dengan demikian serikat-serikat buruh lain tidak dapat mewakili buruh dalam perundingan dengan majikan, sehingga serikat buruh seperti Sarbumusi kehilangan akar berpijaknya di pabrik-pabrik. Sarbumusi secara resmi tidak pernah membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah Presiden Soeharto tetapi “tenggelam secara perlahan”.

---

<sup>17</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *op.cit.*, hlm. 42

Hal ini dinyatakan oleh Ketua Umum Sarbumusi terakhir Drs. H. Soetanto Martoprasono.

Di masa vakumnya Sarbumusi, Ketua Umum Sarbumusi Drs. H. Soetanto Martoprasono masih berusaha berharap bahwa FBSI mampu benar-benar secara independen bersih dari politik atau kontrol pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto. Namun pada kenyataannya, perkembangan FBSI tetap menjadi instrumen politik Pemerintah Presiden Soeharto terutama untuk memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu.<sup>18</sup> Hingga akhirnya pada 26 Juni 1998 peristiwa paling bersejarah pada masa Pemerintahan Pemerintah Presiden Soeharto terjadi, turunnya Presiden Soeharto dari tahta kepresidenan berkat keberhasilan gerakan reformasi mahasiswa saat itu. Hingga pada akhir kepemimpinan presiden Indonesia selanjutnya ialah B.J. Habibie melalui Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998 meratifikasi konvensi ILO<sup>19</sup> nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi yang kemudian diimplementasikan dalam UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Seketika seluruh tokoh Sarbumusi seluruh Indonesia mendesak fungsionaris Sarbumusi tingkat nasional yang khususnya Drs. H. Soetanto Martoprasono yang secara yuridis formal masih sebagai ketua umum guna memfasilitasi adanya forum silaturahmi nasional yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 1998 bertempat di Masjid Baiturrahman kompleks DPR RI. Forum ini menghasilkan keputusan bangkit dan berfungsinya kembali Sarbumusi pada tanggal yang sama yaitu 26 Juni 1998 dan sekaligus melengkapi kepengurusan DPP Sarbumusi.

Dalam perkembangan pasca kebangkitannya, Sarbumusi memperluas pendirian basis serikat buruh hingga merambah pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan di luar pabrik gula. Hingga kedatangan dan kelahirannya di Kabupaten Jember yang dilatarbelakangi oleh adanya pergerakan dan perjuangan hak normatif dan status pekerja di lingkungan karyawan Koperasi Pegawai Telekomunikasi Jember (Kopegtel Jember), yang diawali dengan gerakan 70 orang pekerja yang

---

<sup>18</sup> Alfanny, *op.cit.*, hlm. 62

<sup>19</sup> *Internasional Labour Organization*, ialah organisasi buruh internasional yang menjadi sebuah wadah untuk menampung isu buruh internasional di bawah nungan PBB.

dipimpin oleh Iswinarso. Dalam rangka menuntut pengangkatan status karyawan lepas harian menjadi karyawan tetap pada tahun 1998. Dalam upaya memperkuat jalannya gerakan dan melindungi para buruh yang tergabung dalam gerakan saat itu, Iswinarso bersama dengan Kholili sebagai ketua LP2TKI dan H.M. Madini Faruk selaku ketua Komisi C DPRD yang tergabung dalam partai PKB, membentuk serikat buruh yang merupakan badan otonom NU, yaitu Sarbumusi. Akhirnya tepat pada tanggal 15 Juni 2001 DPC Sarbumusi Jember resmi didirikan. DPC Sarbumusi Jember awal berdiri memiliki 5 basis, dengan anggota yang berjumlah hampir 594 orang. Selama kurun waktu hampir 20 tahun, DPC Sarbumusi beridiri dan berkiprah dalam mengawal gerakan para buruh di Jember, dengan tumbuh kembang yang sangat signifikan sebagai salah satu serikat buruh di Jember.

Eksistensi serikat buruh merupakan hal terpenting dalam memancing antusias buruh untuk mau berorganisasi atau membantu sesama buruh perihal masalah kerja dengan perusahaan. Jember sebagai kota industri se-Keresidenan Besuki memiliki beberapa serikat buruh. Persaingan antar serikat buruh pasti ada, demi mengundang ketertarikan pekerja dan demi keberlangsungan serikat. Eksistensi bisa disebut juga dengan seberapa tangguh sebuah serikat mengawal gerakan buruh dalam sebuah konflik antar buruh dengan perusahaan yang dalam tanda kutip buruh dirugikan atas hak-hak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan, atau posisi serikat yang menjadi mediasi antara perusahaan dengan pihak pekerja bahkan memberi advokasi kepada buruh demi memperlancar usahanya memperjuangkan hak buruh. Serikat buruh juga bisa menjadi pintu masuk perusahaan untuk bisa lebih dekat dan lebih mengenal para pekerjanya, menjadi dipercaya dan turut mengedukasi para pekerja dalam rangka membangun sebuah etos kerja yang baik.

Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti perjuangan-perjuangan dan dinamika yang dialami oleh DPC Sarbumusi Jember pada kurun waktu 2001-2020 dalam rangka melindungi buruh yang ada di Jember. Untuk membahas lebih dalam sejarah perjuangan Sarbumusi terhadap kaum buruh, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan penelitian. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkap “Dinamika Perjuangan DPC Sarbumusi Jember Pada Tahun 2001-2020”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa DPC Sarbumusi dibentuk di Jember?
2. Apa saja yang dilakukan DPC Sarbumusi Jember dalam kurun waktu 2001-2020 ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang pernah dilakukan oleh DPC Sarbumusi Jember ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat

### 1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan secara analitik fungsi yang melatarbelakangi berdirinya DPC Sarbumusi di Jember.
2. Mengidentifikasi hal-hal yang telah dilakukan oleh DPC Sarbumusi Jember sejak tahun 2001 hingga tahun 2020.
3. Mengetahui dampak dari segala aktivitas yang telah dilakukan DPC Sarbumusi Jember.

### 1.3.2 Manfaat

Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Memperkaya khasanah keilmuan terkait tentang serikat buruh yang ada di Indonesia.
2. Memberi informasi sekaligus sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mengambil objek penelitian sejenis.
3. Membuka dan memperluas wawasan pengetahuan seputar gerakan serikat buruh untuk mengadvokasi nasib para buruh yang ada di Indonesia.
4. Menjadi inspirasi perihal melakukan aktivitas hukum bersama buruh atau usaha pemerintah menilai dan menanggapi permasalahan perburuhan di Indonesia.

## 1.4 Ruang Lingkup

Lingkup spasial dan temporal dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Lingkup Spasial

Lingkup spasial pada kajian ini terdapat di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang, memiliki 2.120.074 jiwa<sup>20</sup> berdasarkan hasil sensus penduduk dengan luas wilayah 2.557,64 Km<sup>21</sup>, Kabupaten Jember memiliki memiliki perusahaan industri sebanyak 121 perusahaan.<sup>22</sup> Kabupaten Jember menjadi pusat perdagangan di kawasan Keresidenan Besuki, sebagai salah satu kota industri yang mampu menyedot jumlah tenaga kerja yang sangat banyak, sangat penting adanya sebuah serikat pekerja. Untuk memberi edukasi mengenai perundang-undangan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum. Dari situ lahirlah Sarbumusi pada tahun 2001 di Kabupaten Jember dengan memiliki 5 basis pada awal dan masih terus berkembang setiap tahunnya hingga saat ini. Oleh karena itu penulis berupaya mengungkap sejarah dan dinamika yang dilalui oleh Sarbumusi Jember pada perjuangannya bersama buruh.

### 2. Lingkup Temporal

Lingkup temporal pada kajian ini dimulai dari tahun 2001, karena pada tahun ini Sarbumusi lahir dipicu dengan terjadinya konflik pekerja Koperasi Pegawai Telekomunikasi Jember pada tahun 1998 sampai 2001. Saat itu adanya gerakan karyawan lepas harian yang menuntut untuk diangkat menjadi karyawan tetap dipimpin oleh Iswinarso selaku manager Kopectel mendapatkan penolakan dari Telkom Jember dan pihak Kopectel sendiri. Perjuangan Iswinarso dan pekerja Kopectel lainnya mengantar mereka sampai Dirut Telkom pusat di Jakarta,

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik, *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2001*, (Surabaya: Kantor Sensus Dan Statistik Provinsi Jawa Timur, 2001), hlm. 29.

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Jember Dalam Angka Tahun 2001*, (Jember: Badan Pusat Kabupaten Jember, 2001), hlm. 23

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 210.

memancing simpati partai politik salah satunya PKB, yang juga digawangi oleh NU dan LP2TKI membantu gerakan Iswinarso dalam bentuk pembangunan badan institusi serikat pekerja Sarbumusi dalam rangka memperkuat jalannya pergerakan kaum buruh Kopegtel. Saat itu Kholili yang menjabat sebagai ketua di LP2TKI ditunjuk menjadi ketua DPC Sarbumusi Jember. Sarbumusi sebagai lembaga di bawah badan otonom Nahdlatul Ulama ini diharapkan mampu menjadikan power masyarakat sebagai power serikat yang berasaskan agama, sebagai serikat muslimin di Indonesia. DPC Sarbumusi Jember saat awal berdiri beranggotakan 594 orang pekerja dengan jumlah 5 basis perusahaan yang bergabung.

Pada Tahun 2003 masa kepemimpinan Kholili akhirnya berakhir digantikan oleh Iswinarso DPC Sarbumusi Jember berkembang pesat hingga menjadi 55 basis. Hal ini terjadi juga karena ada campur tangan dari Ketua Divisi Advokasi yaitu Umar Faruk yang giat melakukan pembelaan dan pendampingan hukum dalam hal pembinaan terhadap anggota Sarbumusi. Hingga pada bulan September 2010, Iswinarso lengser. Kursi jabatan ketua DPC Akhirnya turun kepada Umar Faruk, dengan didukung oleh lebih dari separuh jumlah basis yang saat itu aktif.

Periode Umar Faruk berlangsung dari tahun 2010 hingga tahun 2015 dengan perkembangan yang sangat pesat yaitu mampu menumbuhkembangkan Sarbumusi hingga menjadi 78 basis total anggota lebih dari 7.531 anggota tenaga kerja. Pada periode kedua masa kepemimpinan Umar Faruk, yaitu dari 2016-2021, tercatat sudah menyelesaikan lebih dari 400 kasus konflik antar buruh dengan perusahaan selama berdirinya Sarbumusi.

Batas kajian ini di akhiri pada tahun 2020, menuju akhir masa bakti Umar Faruk bersama Sarbumusi yang masih aktif turun lapang dalam rangka mengawal gerakan buruh. Terbukti pada Juni 2019 hingga Februari 2020 Sarbumusi menggugat PT. Bangun Indoparalon Sukses karena dituduh melakukan pemberangusan serikat pekerja basis Sarbumusi di perusahaan, dan 22 pekerja selaku pendiri basis dalam perusahaan akhirnya harus di- PHK. Perjuangan buruh dalam kawalan Sarbumusi ini sekali lagi berbuah keberhasilan. Pada Februari 2020 perundingan terakhir menghasilkan bahwa PT. Bangun Indoparalon Sukses disegel secara resmi oleh Polres Jember dan Disnaker Jember yang disaksikan oleh banyak

pihak, sampai dilengkapinya seluruh izin perusahaan dan dipenuhinya pesangon 22 pekerja yang di-PHK.

Kemenangan buruh dalam kawalan Sarbumusi pada konfliknya dengan MPOIN atau PT. Bangun Indoparalon Sukses membuktikan seberapa kuat dan gigihnya perjuangan buruh dalam kawalan serikat buruh Sarbumusi. Eksistensi serikat buruh Sarbumusi diyakini mampu menjadi momok bagi banyak perusahaan dan menjadi bukti keseriusan serta keaktifan serikat dalam usahanya untuk terus mengawal para buruh.

### 3. Lingkup Kajian

Lingkup kajian yang digunakan dalam penulisan ini ialah lingkup kajian sejarah politik. Pada mulanya politik adalah tulang punggung sejarah (*politics is the backbone of history*). Oleh karena itu, buku-buku teks sejarah berisi rentetan kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam merebut kekuasaan. Ada ungkapan “*history is past politics, politics is present history*” (ucapan Sir John Robert Seeley, Sejarawan Inggris, 1834-1895) yang dengan pasti menunjukkan keterkaitan antara politik dan sejarah. Dominasi politik dalam penulisan sejarah itu menjadi kewajaran untuk waktu yang lama.<sup>23</sup> Pada penulisan ini membahas tentang dinamika serikat buruh Sarbumusi yang ada di Kabupaten Jember, Sarbumusi merupakan kelompok serikat buruh yang didirikan oleh Nahdhatul Ulama. Sebagai lembaga di bawah badan otonom NU, akan sangat rawan sekali terjadinya gesekan antara buruh dengan perusahaan yang melahirkan banyak dampak berupa perubahan bagi nantinya dari kalangan pemerintah, kebijakan perusahaan hingga perlakuan perusahaan terhadap buruh. Dari situ, jalan politik akan menjadi langkah utama yang ditempuh Sarbumusi dalam mengawal perjuangan buruh.

---

<sup>23</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 174

### 1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengulas atau meninjau bahan-bahan pustaka yang mempunyai relevansi terhadap pokok materi penelitian. Bahan pustaka yang diulas atau ditinjau dapat berupa buku teks, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah. Jumlah pustaka yang diulas minimal tiga buah. Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis mengenai isi buku, hasil penelitian ataupun pemikiran peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan gerakan serikat buruh Sarbumusi serta pengaruhnya dalam memperjuangkan nasib buruh yang ada di Indonesia. Pustaka-pustaka tersebut di antaranya sebagai berikut :

Pertama, buku Sejarah Gerakan Sarbumusi karya Eka Fitri Rohmawati, Alfanny, Sukitman Sudjatmika. Dalam buku ini menjelaskan tentang sejarah gerakan buruh di Indonesia, kelahiran dan perkembangan Sarbumusi di masa Pemerintah Presiden Soekarno, matinya Sarbumusi di masa pemerintahan Pemerintah Presiden Soeharto sampai bangkitnya lagi kiprah Sarbumusi pasca reformasi tahun 1998 dan deklarasi kebangkitan kembali, restrukturisasi Sarbumusi serta perubahan federasi ke Konfederasi Sarbumusi (K-Sarbumusi).<sup>24</sup> Perbedaan dengan penulisan ini lingkup spasial yang diambil hanya terkhusus pada Kabupaten Jember, mengulas tentang kelahiran serta dinamika DPC Sarbumusi Jember. Lingkup temporal yang penulis ambil dimulai pada Tahun 2001 sampai Tahun 2020, sedangkan pada buku Sejarah Gerakan Sarbumusi hanya menulis sejarah kebangkitan kejayaan Sarbumusi sampai Tahun 2004. Dengan adanya buku ini sebagai referensi bagi penelitian ini, peneliti merasa sangat ditambah wawasannya perihal sejarah berdirinya Sarbumusi di Indonesia beserta tumbuh kembangnya semasa Pemerintah Presiden Soekarno, Pemerintah Presiden Soeharto hingga era Reformasi. Buku ini selain mengulas lengkap sejarah berdirinya Sarbumusi, juga menggambarkan seberapa keras dan panjangnya perjuangan Sarbumusi hingga bisa menjadi salah satu serikat buruh terbesar di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *Sejarah Gerakan Sarbumusi*. (Jakarta: DPPKONFEDERASI SARBUMUSI. 2016), hlm. 19



Tinjauan pustaka kedua adalah artikel jurnal berjudul Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang karya Hery Setyawan dan Mochamad Arif Affandi.<sup>25</sup> Penelitian ini mengkaji tentang strategi perjuangan Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dalam perjuangan kenaikan upah di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Tujuannya, yakni untuk mengetahui strategi perjuangan serikat buruh dalam tuntutan kenaikan upah serta apa saja hambatan yang muncul dan capaian yang diraih. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan perbandingan upah dari tahun 2005 hingga 2014, perbandingan ini turut menjadi Batasan temporal pembahasan dalam tulisan ini. Perbedaan dengan karya ilmiah dalam tulisan ini adalah focus pembahasan yang ada pada dinamika perjuangan DPC Sarbumusi di Jember, tidak hanya dalam perjuangan menuntut hak normative buruh atau upah yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, tapi secara menyeluruh membahas apa saja kebijakan yang diberlakukan oleh DPC Sarbumusi dalam upayanya mengawal dan membantu perjuangan para buruh di Jember, serta dampak dari kebijakan-kebijakan itu sendiri. Begitu juga dengan batasan temporal yang membahas sejak berdirinya DPC Sarbumusi pada tahun 2001 hingga perjuangannya pada tahun 2020. Dalam jurnal ini, penulis bisa mengetahui dan menganalisis bentuk perjuangan serikat buruh di Jombang dalam upayanya memperjuangkan kenaikan upah buruh yang menadasar pada UU Ketenagakerjaan.

Tinjauan Pustaka ketiga adalah buku yang berjudul Buruh, Serikat dan Politik Indonesia pada 1920an-1930an yang ditulis oleh John Ingleson<sup>26</sup>. Dalam buku ini John Ingleson memfokuskan penelitiannya tentang peran organisasi buruh tahun 1920-an hingga jatuhnya pemerintahan kolonial Belanda ke tangan Jepang tahun 1942. Perbedaan dengan kajian dalam penulisan ini adalah terfokus pada dinamika perjuangan serikat buruh di era reformasi saat ini, yaitu pada tahun 2001 hingga 2020 serta hanya terfokus pada perjuangan satu serikat buruh tingkat

---

<sup>25</sup> Hery, Setyawan, dkk. *Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang*. (dalam *Paradigma*. Volume 05 Nomor 03 Tahun 2017).

<sup>26</sup> Ingleson, John. *BURUH, SERIKAT, DAN POLITIK : Indonesia Pada 1920an – 1930an*. (Marjin Kiri, Jakarta Selatan, 2000).

kabupaten, yaitu DPC Sarbumusi Jember. Namun dengan menjadikan buku ini tinjauan pustaka dalam penulisan karya ilmiah ini, dapat memberi penulis gambaran mengenai kaitan buruh dengan politik serta metode perjuangan serikat buruh yang terjadi di Hindia Belanda pada tahun-tahun terakhir pemerintah kolonial. Dengan memahami uraian dalam buku ini juga penulis mampu memahami bagaimana polemic kehidupan buruh di era kolonial sampai sekarang ternyata masih belum selesai diperdebatkan.

### 1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori

Setiap karya ilmiah menggunakan kerangka teori dan pendekatan-pendekatan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data agar membentuk suatu narasi yang objektif. Pendekatan dan kerangka teoritis dalam penulisan sejarah dapat membantu peneliti dalam memilih sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan skripsi, menjelaskan hubungan yang saling berkaitan, dan struktural di antara fakta-fakta yang menyusun peristiwa maupun proses sejarah.<sup>27</sup> Dalam penulisan skripsi *Dinamika Perjuangan DPC Sarbumusi di Kabupaten Jember Pada Tahun 2001-2020* penulis menggunakan pendekatan sosiologi politik. Sosiologi politik sebagai penyelidik mengenai kaitan antara masalah-masalah politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, antara tingkah laku sosial dan politik, dan membahas antara perkembangan dan metodenya yang cocok bagi penelitian.<sup>28</sup> Pada penulisan karya tulis ini membahas tentang organisasi serikat buruh terbesar yang ada di Kabupaten Jember yaitu Sarbumusi. Sarbumusi sendiri merupakan organisasi serikat buruh *underbrow* berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Terdapat pengaruh politik yang kuat yang mempengaruhi metode dan orientasi serikat buruh, hal ini terbukti secara historis.

Teori yang digunakan pada penulisan ini adalah teori marxisme. Teori ini diperkenalkan oleh Karl Marx. Karl Marx adalah seorang ilmuan, sejarawan,

---

<sup>27</sup> Nurhadi Sasmita dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember* (Bantul DIY: Lembah Manah, 2012)

<sup>28</sup> Michael Rush, Phillip Althoff, Alih bahasa Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.289

ekonom, filsuf, dan pemikir revolusioner yang terlibat dalam aktivitas gerakan buruh. Teori Karl Marx tentang kesadaran kelas, yang mengacu pada sistem keyakinan yang dianut oleh orang yang menduduki posisi kelas yang sama dalam masyarakat. Kesadaran kelas bukan penjumlahan kesadaran individual; kesadaran kelas adalah sifat sekelompok orang yang secara bersama menempati posisi serupa dalam sistem produksi. Pandangan ini mengarah ke pemusatan perhatian terhadap kesadaran kelas borjuis dan terutama kelas proletariat. Terdapat hubungan yang nyata antara posisi ekonomi objektif, kesadaran kelas, dan “pemikiran psikologis riil orang mengenai kehidupan nyata mereka”. Konsep kesadaran kelas, setidaknya dalam sistem kapitalis, secara tersirat menyatakan keadaan sebelumnya, yang dikenal sebagai kesadaran palsu. Artinya kelas-kelas dalam masyarakat kapitalis umumnya tidak menyadari kepentingan kelas mereka yang sebenarnya.<sup>29</sup>

Kritik terhadap ekonomi politik merupakan bagian penting dari pemikiran Karl Marx. Hal ini menempatkan analisis marxis tentang kapitalisme sebagai dasar ilmiah bagi gerakan buruh dengan menjelaskan hukum dari corak produksi. Dasarnya tetaplh dari sudut pandang kelas pekerja (buruh), dengan tesis pokoknya; analisis tentang eksploitasi, bukti dari sistem kapitalisme harus ambruk karena dasar eksploitasi. Marx menganggap alienasi aktivitas praktis manusia, kerja, berasal dari dua aspek, yaitu hubungan pekerja dengan produksinya sebagai objek asing yang menguasainya dan hubungan kerja dengan tindakan produksi dalam kerja.<sup>30</sup> Penulis menggunakan teori marxisme yang diyakini penulis akan memudahkan penulis untuk dapat merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada dinamika perjuangan DPC Sarbumusi di Kabupaten Jember.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan terkait erat dengan karya yang akan diteliti. Penelitian ini adalah kajian sejarah, sehingga metode yang tepat adalah

---

<sup>29</sup> George Ritzer, Gouglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 173.

<sup>30</sup> Nurani Soyomukti, *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hlm.247

metode sejarah. Sebagai kajian historis, metode sejarah menjadi tulang punggung pengajaran penelitian ini. Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penulisan sejarah. Langkah langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik eksternal dan internal, analisis dan interpretasi penyajian dalam bentuk tulisan.<sup>31</sup>

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>32</sup> Metode penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan sebagai berikut:

#### 1. Heuristik

Tahap pertama adalah heuristik. Sumber sejarah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang atau dengan mekanisme, yaitu orang alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan.<sup>33</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber sebagai berikut :

- a. Sumber primer tulisan yaitu data yang diambil dan diperoleh melalui studi dan wacana mengenai Sarbumusi seperti dokumen, arsip, buku, dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan skripsi ini. Berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan sumber primer tulisan berupa buku, AD ART, PR PRT, SK Keorganisasian mulai dari bukti pencatatan, bukti pembentukan basis, surat gugatan, surat laporan, dan SK Kepengurusan dan mekanisme keorganisasian.
- b. Sumber primer lisan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang berasal dari tokoh atau pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan langsung dengan kajian skripsi. Wawancara tersebut dapat diperoleh melalui para pengurus maupun anggota Sarbumusi yang

---

<sup>31</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, ( Yogyakarta: PT Tirta Wacana Yogya, 1994), hlm 81.

<sup>32</sup> Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. ( Terj ) Nugroho Noto Susanto. (Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975 ), hlm 32.

<sup>33</sup> Louis Gottchalk, *Ibid.*,hlm. 35

mengetahui semua hal mengenai Sarbumusi. Berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Umum DPC Sarbumusi Jember yang sedang menjabat, mantan ketua umum sebelumnya, pengurus harian DPC Sarbumusi Jember dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Imigran.

- c. Sumber sekunder dalam tulisan ini berupa tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, buku-buku koleksi Perpustakaan Daerah Jember, Perpustakaan Universitas Jember, buku-buku koleksi Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, dan buku serta arsip koleksi Organisasi DPC Sarbumusi Jember.

## 2. Kritik (Verifikasi Sumber)

Langkah kedua dalam penelitian adalah kritik sumber, pada tahapan ini peneliti melakukan kritik dan penelitian terhadap semua sumber sejarah yang diperolehnya, dalam metode sejarah dikenal dua macam kritik, yaitu kritik eksternal adalah yang diperlukan dalam rangka memastikan keaslian sumber dan kritik internal yang diterapkan untuk menentukan kredibilitas informasi yang disajikan.<sup>34</sup> Pengujian sumber dalam penelitian ini secara eksternal dilakukan dengan menguji dan melihat dari kertas, tinta maupun bentuk tulisan yang sudah diperoleh penulis berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan arsip-arsip Sarbumusi, mulai dari arsip sejarah berdirinya Sarbumusi, konflik-konflik yang terjadi dan bukti resmi kerja sama Sarbumusi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan-perusahaan terkait. Sementara pengujian sumber secara internal dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan relevansi-relevansi lainnya dan mencari sebuah kesamaan dari beberapa referensi yang diperoleh dari yang dijadikan sebagai pembanding. Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel. Keotentikan data berarti bahwa sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh seorang atau organisasi yang namanya tertera dalam sumber itu sendiri, sedangkan kredibel

---

<sup>34</sup> Latifatul Izzah dan Hendro Sumartono, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), hlm. 101.

berarti seberapa jauh isi yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh dapat dipercaya.

### 3. Interpretasi

Tahap ketiga yakni interpretasi atau penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang valid. Interpretasi itu ada dua yakni analisis dan sintesis menguraikan dan menyatukan. Menganalisis sebuah sumber dengan mencari fakta-fakta yang berada di lapangan kemudian memperoleh fakta tersebut maka akan dilakukan sintesis yang berarti menyatukan dengan pengumpulan sumber yang terpercaya tersebut dinamakan fakta, yang selanjutnya akan dikonstruksi dan dijelaskan secara utuh.<sup>35</sup> Interpretasi dalam metode sejarah adalah proses keterkaitan antara data-data fakta yang sudah ditemukan dan dirangkai menjadi sebuah kronologi, sehingga menunjukkan rangkaian kisah sejarah yang mudah atau dapat dipahami. Karya tulis ini menunjukkan cara mengupas suatu peristiwa sejarah terkait dengan topik yang ditulis yakni dinamika perjuangan DPC Sarbumusi Jember saat memberi pengawasan dalam rangka memberi perlindungan kepada hak-hak normatif para buruh serta memperjuangkannya dengan memberi advokasi kepada para buruh di Kabupaten Jember khususnya. Merekonstruksi peristiwa sejarah membutuhkan rangkaian tulisan yang kronologis dimaksudkan untuk dapat melihat perubahan dan dinamika dalam peristiwa sejarah.

### 4. Historiografi

Historiografi adalah tahap akhir dalam metode sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil peneliti sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal perencanaan sampai dengan akhir yakni kesimpulan. Berdasarkan penulisan sejarah itu pula, akan didapat nilai mengenai penelitian itu

---

<sup>35</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 76.

berlangsung sesuai prosedur yang dipergunakan ataukah tidak, perihal sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulan memiliki validitas dan realibilitas yang memadai atau tidak dan sebagainya. Jadi, dengan penulisan itu akan dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri. Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah Historiografi (penulisan).<sup>36</sup> Penulisan sejarah terbagi menjadi dua, yaitu bentuk tulisan deskriptif dan bentuk tulisan analitis. Deskriptif adalah bentuk tulisan sejarah yang secara kronologis sejak awal hingga akhir sebuah peristiwa sejarah. Analitis yaitu suatu bentuk tulisan yang menggunakan pendekatan ilmu sosial sehingga mampu memaparkan bentuk sebab akibat dari objek kajian penelitian.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi empat pokok bahasan utama yang masing-masing bab merupakan satu kesatuan sehingga tertata berurutan sebagai berikut :

BAB 1 adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 adalah apa yang melatarbelakangi berdirinya Sarbumusi di Jember di tahun 2001 jika dilihat dari kondisi perburuhan, sosial ekonomi dan sejarah berdirinya, pembahasan ini dibagi menjadi empat sub bab yaitu, kondisi perkumpulan- perkumpulan buruh di Indonesia sebelum tahun 2001, kondisi sosial ekonomi Jember sebelum tahun 2001, kondisi perburuhan di Jember sebelum tahun 2001 dan sejarah berdirinya Sarbumusi dengan dua sub pembahasan yaitu bagaimana proses berdirinya DPC Sarbumusi di Jember dan mekanisme keorganisasian DPC Sarbumusi Jember.

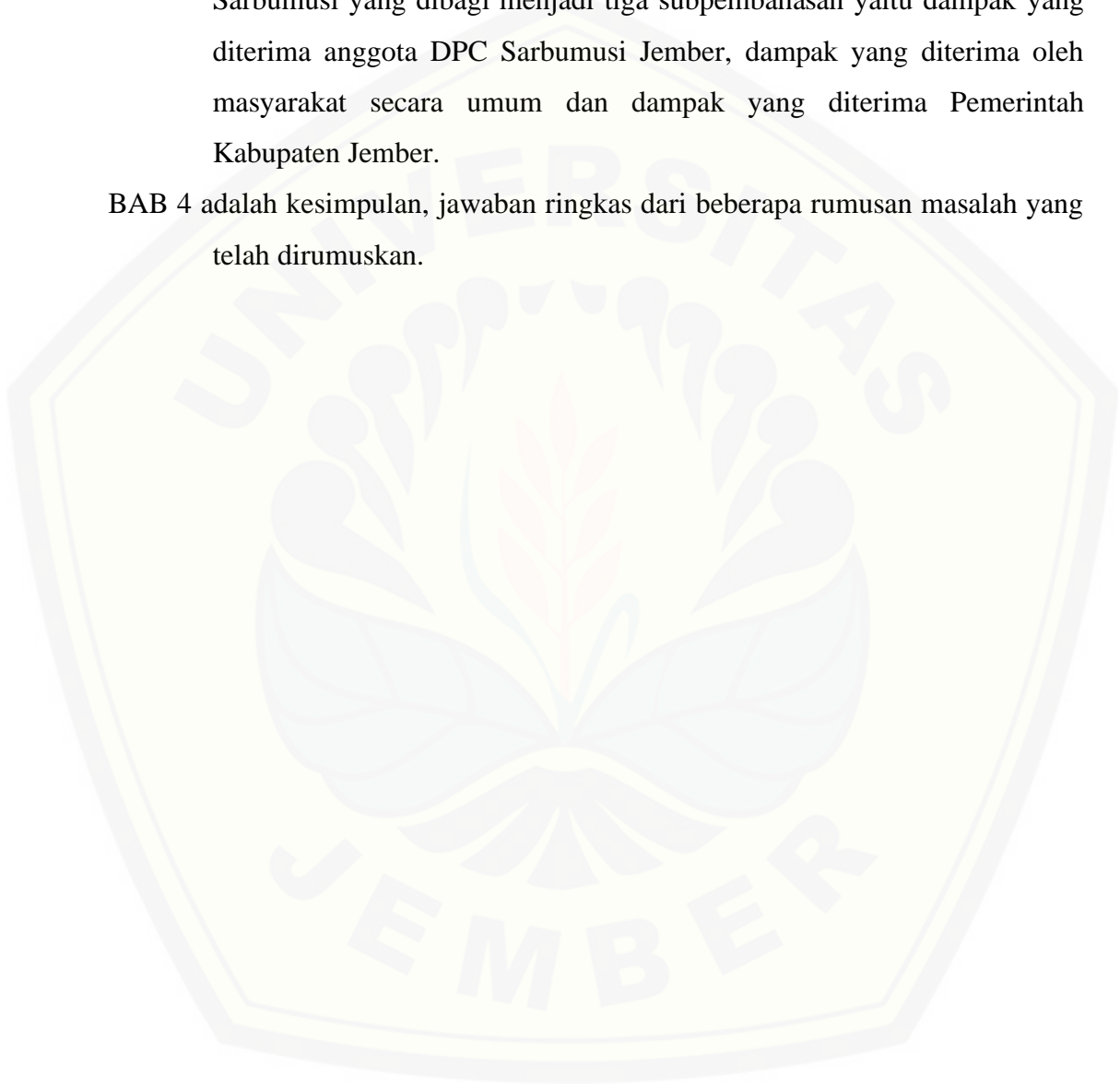
BAB 3 adalah pembahasan mengenai kebijakan pimpinan DPC Sarbumusi Jember periode 2001-2020 serta dampak keberadaan DPC Sarbumusi Jember dengan beberapa sub pembahasan yaitu, kebijakan pimpinan DPC Sarbumusi Jember periode 2001-2020 yang dibagi per-periode

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

kepemimpinan, yang pertama periode kepemimpinan Kholili tahun 2001-2004, yang kedua periode kepemimpinan Iswinarso tahun 2004-2010 dan yang terakhir periode kepemimpinan Umar Faruk tahun 2010-2020. Sub pembahasan terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari aktivitas DPC Sarbumusi yang dibagi menjadi tiga subpembahasan yaitu dampak yang diterima anggota DPC Sarbumusi Jember, dampak yang diterima oleh masyarakat secara umum dan dampak yang diterima Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB 4 adalah kesimpulan, jawaban ringkas dari beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan.





## **BAB 2**

### **LATAR BELAKANG BERDIRINYA SABURMUSI DI JEMBER**

#### **2.1 Selayang Pandang Perkumpulan Buruh di Indonesia sebelum Tahun 2001**

Pada masa Pergerakan Nasional di Indonesia sekitar tahun 1908-1942, ada banyak bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para kaum nasionalis, jika kita lihat secara lebih mendasar pada tiap bagian masyarakat, selain Mahasiswa ada buruh yang juga memegang masa terbanyak dan mampu dengan lantang menyuarakan aspirasi mereka ketika ada gerak kolektif yang mampu mengarahkan dan mendorong para buruh untuk berani bersuara. Dari kesadaran ini, lahirlah wadah-wadah yang menaungi dan mengarahkan para buruh agar mampu membela diri hingga memperjuangkan hak hidup sejahtera mereka didalam perusahaan ataupun ditengah masyarkat, wadah tadi adalah serikat buruh. Kelahiran serikat-serikat buruh di Indonesia akhirnya menjadi representasi adanya gerakan dari para buruh, gerakan buruh dalam serikat yang selaras dengan tujuan kaum nasionalis pada masa Pergerakan Nasional menjadikan serikat buruh garda terdepan perjuangan dimasa itu.<sup>1</sup>

Tumbuh kembang gerakan buruh di Indonesia berjalan selaras dengan semangat nasionalisme yang turut muncul di Indonesia. Pada situasi dan kondisi tertentu, gerakan buruh di Indonesia menjadi barometer keberhasilan regenerasi

---

<sup>1</sup> Trimurti, SK. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta : Idayu, 1975, hlm. 11.

kaum nasionalis yang merambah ke bagian masyarakat lebih luas, dimana saat itu tingkat SDM masih sangat minim di kalangan para buruh, namun dari semangat memperjuangkan hak dan menyuarakan aspirasi mereka, mendorong ke arah kesadaran dalam melawan adanya kapitalisme dan imperialisme pemerintah kolonial Belanda pada masa pergerakan nasional.<sup>2</sup> Sejalan dengan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa saat itu dalam usaha mengusir penjajah dari tanah air, buruh memerankan peran mereka sendiri di bagian menuntut hak hidup sejahtera sebagai tenaga kerja dan hak bersuara didalam organisasi sebagai rakyat jajahan dibawah perusahaan kolonial belanda saat itu.

Tercatat pada sekitar tahun 1908 perserikatan buruh pertama kali lahir di Indonesia, yaitu Serikat buruh Trem dan Kereta Api bernama *Vereeniging voor Spoor en Tramwegpersoneel* (VSTP) yang juga menjadi serikat buruh tertua di Hindia Belanda. VSTP sebagai serikat buruh pertama yang didirikan di Semarang pada tahun 1908 sebagai organisasi bagi kalangan buruh Eropa yang bekerja di *Nederlandsch-Indische Spoorweg*.<sup>3</sup> Pada mulanya VSTP yang memang didirikan untuk buruh kalangan Eropa didominasi oleh orang Belanda, namun karena perkembangan industri sendiri turut memicu bertambahnya buruh dari kalangan kaum pribumi, yang saat itu disebut dengan istilah kaum bumiputera, menindak lanjuti hal ini maka VSTP mengambil kebijakan untuk memberikan kedudukan yang sejajar antara buruh bumiputera dengan Eropa. Perkembangan ini terus berlanjut, hingga Kongres VSTP pada tahun 1914 menghasilkan keputusan bahwa pimpinan VSTP yang berjumlah empat orang, tiga di antaranya harus dari kalangan bumiputera.<sup>4</sup>

Pada tahun 1917, serikat buruh tumbuh disisi lain dunia tenaga kerja, bukan perusahaan transportasi melainkan dari kelompok tentara buruh perkebunan atau Adhi Dharma, yaitu bernama *Personeel Fabriek Bond* (PFB) yang

---

<sup>2</sup> Hafidz, Vedi, R. *Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru*. Jakarta: Prisma, LP3ES, 1996, hlm. 8

<sup>3</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *Sejarah Gerakan Sarbumusi*, (Jakarta: DPP KONFEDERASI SARBUMUSI. 2016), hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 12

diumumkan secara resmi oleh Soerjapranoto selaku komisaris Kongres Centraal Serikat Islam (CSI) tahun 1918. Bila VSTP tumbuh pada komunitas industry kereta api, maka PFB berkembang pesat hampir di semua perkebunan tebu dan pabrik gula di Jawa. Soerjapranoto yang memimpin PFB kemudian menjabat sebagai ketua SI Afdeling Yogyakarta dengan Fachroedin Putra KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah sebagai wakil ketua. Berdirinya dua serikat ini juga sesuai dengan dua sektor utama yang dikembangkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda saat itu, yaitu hasil produksi pertanian dan perkebunan serta sarana prasarana untuk pendistribusian hingga masuk wilayah produksi. Dapat dilihat bahwa awal mula serikat buruh lahir pasti ada usaha intervensi pemerintah kolonial pada dunia perburuhan hingga harus melahirkan wadah sebuah serikat buruh yang nantinya juga bisa digunakan alat oleh pihak buruh dalam bersuara didalam industry pemerintah kolonial Belanda.

Dengan lahirnya PFB yang didirikan oleh seorang komisaris Central Serikat Islam (CSI) maka Serikat Islam (SI) muncul sebagai alat konspirasi para kaum pergerakan dengan serikat buruh PFB sebagai jalan utama terjadinya gerakan.<sup>5</sup> Dengan demikian terdapat dua serikat buruh yang kuat di Hindia Belanda, yaitu VSTP yang berpusat di Semarang dan berafiliasi dengan SI Merah. Sementara di Yogyakarta yang merupakan basis kaum putihan terdapat kalangan muslim yang taat menjalankan ajaran agamanya didominasi oleh serikat buruh PFB.

Gerakan buruh pada masa Pergerakan Nasional dengan VSTP dan PFB sebagai serikat buruh yang pertama kali lahir, telah merepresentasikan dua warna kaum pergerakan dari kalangan para buruh yaitu komunis dan islam. Sejalan dengan perkembangan dunia industry saat itu, Pemerintah kolonial Belanda merasa semakin sulit mengintervensi kepentingan para buruh, karena serikat buruh yang semakin dipenuhi dengan kaum bumiputera dan semangat nasionalisme yang perlahan mulai tumbuh terutama di dalam PFB selaku salah satu serikat terkemuka dimana didalamnya didominasi kaum buruh taat beragama

---

<sup>5</sup> Martoprasono, Soesanto. *Model Serikat Pekerja dalm Perspektif Sejarah*. Makalah Lokakarya Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Malang : 2000, hlm. 7

yang otomatis juga akan mati-matian memperjuangkan hak mereka sebagai tenaga kerja. Menyadari hal ini, pemerintah Hindia Belanda akhirnya dengan sengaja memancing adanya gerakan pemogokan umum dikalangan buruh PFB pada Agustus 1920. Pemogokan yang merupakan hasil rekayasa pemerintah hindia belanda saat itu berhasil memancing dan sekaligus menggagalkan aksi pemogokan umum yang dilakukan PFB. Aksi pemogokan tersebut lalu diikuti juga oleh VSTP pada tahun 1923. Gerakan buruh kedua serikat ini hanya menghasilkan pukulan keras dari pemerintah hindia belanda yang berujung pada kehancuran karena dirasa gagal melakukan aksi dan hanya menyulut kondisi tidak kondusif dunia perburuhan dan perindustrian di Indonesia.

Setelah insiden itu, PFB dan VSTP dilumpuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda, maka praktis gerakan buruh di Indonesia tak mampu lagi melakukan aktifitas politiknya. Hal ini juga menyebabkan beberapa serikat buruh lain memilih mundur dan menarik diri dari arena politik seperti Persatuan Guru Hindia-Belanda (PGHB) dan *Vereeniging Inlandsche Personeel Burgelijke Oopenbare Worken* (VIPBOW).<sup>6</sup>

Menuju kemerdekaan Indonesia, menjelang kekalahannya Belanda di Indonesia hingga terusirnya Belanda dari Indonesia pada tahun 1942, Indonesia malah memasuki era penjajahan Jepang. Jepang dengan segala usahanya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perlawanan atau pemberontakan, bersikap represif terhadap organisasi-organisasi kaum nasionalis, hal ini mengakibatkan banyak organisasi pergerakan nasional yang tidak bisa menjalankan roda organisasinya. Lebih buruk dari masa penjajahan Belanda yang dimana organisasi-organisasi pergerakan nasional secara relatif masih dapat berkembang. Sebaliknya, bagi organisasi-organisasi yang dengan sengaja didirikan Jepang atau berdiri sendiri dengan sifat korporatif dan bertujuan memobilisasi dukungan rakyat terhadap Jepang didukung penuh dan disponsori oleh Jepang. Organisasi-organisasi itu seperti Pusat Tenaga Rakyat (Putera), Gerakan Tiga A dan Organisasi-organisasi pemuda semi militer seperti Pembela Tanah Air (PETA), *Sainendan*, *Heiho*, *Keibodan* dan lain-lain.

---

<sup>6</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 8

Bahkan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) sebagai pengganti Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) pun berdirinya disponsori oleh Jepang, selaku federasi organisasi Islam yang lahir pada akhir pergerakan nasional yaitu pada bulan Oktober 1943. Pendiri NU K.H. Hasyim Asy'ari menjadi ketuanya dengan dibantu putranya, KH Wachid Hasyim. Sama seperti organisasi bentukan Jepang lainnya, maka Masyumi didirikan dengan tujuan memobilisasi dukungan rakyat terutama umat Islam di pedesaan untuk membantu Jepang. Kondisi ini menjelaskan betapa Jepang secara represif dan otoriter mengekang pertumbuhan rakyat Indonesia, tidak hanya membatasi eksistensi semangat nasionalis rakyat pribumi, bahkan melumpuhkan dan mematikan segala aktifitas keorganisasian terutama aktifitas serikat-serikat buruh dimasa itu.

Sesudah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia yang baru saja mencium bau kebebasan dari masa jajahan Belanda dan Jepang, merasa tidak ingin membuang waktu dengan langsung melakukan tindakan pengambilalihan aset-aset peninggalan Jepang dan Belanda yang di pimpin oleh kaum buruh dan pemuda, seperti stasiun kereta api, kantor-kantor, perkebunan gula, pabrik-pabrik dan sebagainya. Dengan maksud dan tujuan untuk menekan jumlah kerugian Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan dengan cara merebut semua perusahaan milik penjajah dan menyerahkannya kepada pemerintah Indonesia, Barisan Buruh Indonesia (BBI) bentukan "*Committee van Actie*" pada tanggal 18 Agustus 1945 dipercaya untuk melakukan semua pengambil alihan itu.<sup>7</sup> Lalu BBI yang dirasa telah selesai melakukan pengambil alihan perusahaan, diubahnya menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI) pada Mei 1946 saat kongres BBI terakhir berlangsung. Namun karena ada tuduhan pada pemimpin GASBI saat itu yang diduga tersangkut peristiwa 3 Juli 1946, yaitu sebuah gerakan protes terhadap Perjanjian Linggarjati dan kebijakan politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir. GASBI mengalami perpecahan, dimana Sebagian anggota GASBI yang dipelopori Serikat

---

<sup>7</sup> Hafidz, Vedi, R. *op. cit.* hlm. 14.

Buruh Minyak mendirikan Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV).<sup>8</sup> Ada dua tokoh yang saat masa Pergerakan Nasional berusaha menyikapi perkembangan pergerakan kaum buruh yang terpecah, dengan mengusahakan peleburan GASBI dan GSBV menjadi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), dengan anggota sekitar 34 serikat buruh dalam keterangan asas dan pendiriannya dinyatakan :

*“Bahwa SOBSI bukanlah partai politik. Serikat Buruh bukanlah bagian suatu partai politik dan apa yang dikerjakan partai politik bukanlah partai politik. Serikat Buruh bukanlah bagian suatu partai politik. Apa yang dikerjakan serikat buruh tak dapat dikerjakan partai politik dan apa yang dikerjakan partai politik bukanlah kewajiban serikat buruh. Tetapi tidak harus diartikan bahwa serikat buruh dalam gerakannya harus bebas sama sekali dari gelombang politik, atau lebih jauh lagi, setiap kaum buruh buta politik, sama sekali tidak. SOBSI dalam perjuangannya akan bekerja dengan golongan dan partai yang sehaluan.”<sup>9</sup>*

Namun, persatuan kaum buruh Indonesia dalam SOBSI tidak berlangsung lama. SOBSI melalui Kongresnya di Malang pada tanggal 18 Mei 1947 menyatakan bergabung ke *World Federation of Free Trade Union* (WFTU), sebuah federasi serikat buruh se-Dunia yang berafiliasi ke Blok Timur (Komunis).<sup>10</sup> Kongres SOBSI pada bulan Mei 1947 di Malang tersebut juga memutuskan untuk menyetujui sikap Sentral Biro SOBSI yang pro persetujuan Linggarjati dan menerima Maklumat Pemerintah No. X tahun 1945. Selanjutnya, pendulum politik SOBSI terlihat bergerak ke arah kiri mengikuti ayunan langkah politik PKI dan faksi-faksi perjuangan yang berafiliasi kiri. Hal ini terlihat jelas ketika sejumlah kesatuan tantara yang pro PKI melakukan *fait accompli* atas kepemimpinan PKI dengan mengumumkan berdirinya pemerintah Front Nasional di Madiun pada bulan September 1948. Banyak tokoh-tokoh SOBSI terlibat dalam Peristiwa Madiun tersebut. Akibat keterlibatan SOBSI dalam Peristiwa

---

<sup>8</sup> Djumadi. *Sejarah Keberadaan Buruh Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005, hlm. 35.

<sup>9</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 13

<sup>10</sup> Hafidz, Vedi, R. *op.cit.*, hlm. 6

Madiun, 19 serikat buruh menyatakan keluar dari SOBSI. Serikat Buruh Gula menyatakan menarik diri dari keanggotaan SOBSI dan kemudian mendirikan Gabungan Sarikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI) tindakan keluar SOBSI itu pada tanggal 27 November 1948 disusul Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dipimpin Mohammad Daljono berdiri.<sup>11</sup> Sejak saat itu maka SOBSI tidak bisa lagi dipertahankan sebagai wadah persatuan kaum buruh, karena banyak bermunculan serikat-serikat buruh baru yang berafiliasi kepada salah satu partai politik, terutama menjelang pemilu 1955.

Setelah SOBSI tidak bisa lagi menjadi representasi tunggal bagi kaum buruh Indonesia, maka timbulah kembali usaha untuk menyatukan gerakan kaum buruh. Pada tanggal 30 Mei 1949 didirikan Himpunan Serikat-Serikat Buruh Seluruh Indonesia (HISSBI) yang bertujuan untuk mempersatukan organisasi buruh. HISSBI kemudian menyelenggarakan Konferensi di Yogyakarta pada tanggal 29-31 Juli 1950. Konferensi HISSBI ini memutuskan untuk membentuk induk organisasi buruh melalui Kongres Buruh Umum di Jakarta.<sup>12</sup>

SOBSI yang absen pada konferensi HISSBI di Yogyakarta ini menyatakan ketidak setujuannya terhadap keputusan konferensi HISSBI untuk membentuk organisasi buruh yang baru. Akhirnya, walau tanpa kehadiran SOBSI, Kongres Buruh Umum berhasil diselenggarakan pada bulan April 1950. Kongres Buruh Umum berhasil membentuk Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Bagaikan mengikuti jejak para pendahulunya, SOBRI sebagai induk organisasi buruh Indonesia di kemudian hari tidak berperan banyak, karena kaum buruh Indonesia di kemudian hari tidak berperan banyak, karena buruh terpecah mengikuti orientasi aliran politiknya.

Serikat-serikat buruh yang ada saat itu juga tergabung dalam afiliasi gerakan buruh internasional yang juga berbeda-beda. Saat itu ada dua federasi buruh internasional yaitu, *Internasional Confederation of Free Trade Union* (ICFTU) dan *World Federation Trade Union* (WFTU). ICFTU merupakan

---

<sup>11</sup> Djumadi. *op.cit.*, hlm. 17

<sup>12</sup> Alfanny, *Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) 1955-1973. Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2001, hlm. 5

federasi buruh internasional yang berpihak ke Blok Barat, sedangkan WFTU merupakan federasi buruh internasional Blok Timur. Walaupun demikian terdapat serikat-serikat buruh yang menyatakan diri tidak terlibat dalam politik atau non afiliasi politik. Kepentingan serikat buruh semacam ini hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum buruh semata. Tetapi, serikat-serikat buruh semacam itu berada pada posisi yang marjinal.

Persaingan antara serikat-serikat buruh yang masing-masing memiliki afiliasi politik itu terjadi mengikuti persaingan yang terjadi antara partai-partai politik. Persaingan itu bahkan sangat keras terasa pada level terbawah yaitu pabrik-pabrik. Sebuah pabrik pada masa itu umumnya disemarakan oleh kehadiran berbagai macam serikat buruh. Kondisi ini tentunya melemahkan posisi tawar menawar mereka ketika melakukan perundingan dengan pihak pengusaha. Walaupun demikian umumnya serikat-serikat buruh tersebut membentuk sekretariat bersama serikat buruh di pabrik bersangkutan.

Dalam periode Demokrasi Parlementer (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966), SOBSI merupakan serikat buruh yang terkemuka. Hal ini karena induk politik SOBSI, Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai yang cukup kuat dan bahkan kemudian menjadi yang terkuat setelah periode Demokrasi Terpimpin, dua seteru utama PKI, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan oleh pemerintah Soekarno karena dituduh terlibat pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan menolak konsepsi Demokrasi Terpimpin. Saingan PKI yang tersisa hanyalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang tidak bisa berbuat banyak, karena kedua partai tersebut bergabung dalam poros Nasional-Agama-Komunis (Nasakom) bersama dengan PKI.<sup>13</sup>

Ketika terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957, SOBSI merupakan salah satu serikat buruh yang turut mengambil alih perusahaan-perusahaan dan kantor dagang Belanda, walaupun langkah SOBSI ini tidak terlalu disukai oleh militer yang juga menginginkan kepemilikan atau asset-

---

<sup>13</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk., *op.cit.*, hlm. 12



aset perusahaan Belanda tersebut. Ketika Presiden Soekarno mendeklarasikan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda, maka SOBSI memanfaatkan momentum tersebut untuk menambah jumlah anggotanya dan melatihnya kemiliteran sebagai satuan sukarelawan Indonesia untuk pembebasan Irian Barat. Pola seperti ini terulang ketika Presiden Soekarno menyerukan konfrontasi dengan Malaysia. Pada akhir tahun 1962, anggota SOBSI mencapai hampir 3,3 juta orang.

Pada periode Demokrasi Terpimpin, PKI beserta organisasi massanya hanya menemui NU dan pada situasi tertentu PNI, sebagai saingan terberatnya pada konteks gerakan sosial untuk meraih simpati massa rakyat. NU dan PNI pada periode tersebut menari mengikuti irama gendang yang di tabuh PKI. NU dan PNI mengikuti PKI membentuk organisasi massa yang bersifat sektoral seperti gerakan pemuda, gerakan wanita, mahasiswa, petani, buruh dan lain-lain.<sup>14</sup> Dari sekian banyak ormas yang menonjol saat itu adalah ormas buruh dan tani yang mampu memobilisasi dukungan terbesar dari massa rakyat. Selain karena jumlah petani dan buruh yang relatif besar, juga karena kedudukan buruh tani sebagai “Sokoguru Revolusi”, sebuah slogan yang didengungkan oleh Pemerintah Presiden Soekarno pada saat itu.

Keterlibatan serikat buruh di Indonesia dalam aktifitas politik sejarah Indonesia merupakan suatu hal yang tak terhindarkan. Sedikit banyak Selayang pandang pertumbuhan serikat buruh di Indonesia adalah dalam rangka gerakan nasionalis yang menjadikan tenaga kerja buruh sebagai pion terdepan, yang akhirnya banyak disebut juga menunggangi banyak kepentingan politik berbagai pihak ataupun sebaliknya. Tapi cara apapun yang saat itu ditempuh, jika dipandang menyeluruh adalah proses rakyat Indonesia untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dan memperkuat idealis kebangsaan mereka, sebagai salah satu golongan masyarakat yaitu buruh tenaga kerja.

Namun jika kita telaah lebih jauh, keterlibatan serikat buruh dalam politik di Indonesia lah yang menyebabkan gerakan buruh dalam serikat buruh menjadi

---

<sup>14</sup> Trimurti, SK. *op.cit.*, hlm. 27

sama sekali tidak optimal, secara garis struktural dengan fraksi partai yang menaungi memang serikat buruh hanya salah satu banom mereka, secara gerak politik mereka memiliki kepentingan mereka masing-masing. Namun, pada akhirnya serikat buruh juga menjadi alat politik partai, atau sebaliknya serikat buruh dengan senang hati ikut meramaikan gerak politik partai yang menaunginya. Sadar atau secara tidak sadar, ada beberapa konflik yang mewarnai perjalanan tumbuh kembang serikat buruh di Indonesia. Dari awal kolonial, kita melihat serikat buruh baik di ranah politik, keagamaan ataupun gerakan nasionalis apapun semua berusaha menggunakan landasan kebangsaan dalam rangka melepaskan diri dari jerat penjajah. Namun realitas sejarah berkata lain, dari persemiaan politik aliran hingga paruh akhir Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1966.

Pada masa Pergerakan Nasional kita tahu ada dua serikat buruh terkemuka di Indonesia, yaitu VSTP dan PFB yang dimana VSTP sebagai serikat buruh yang menaungi perusahaan kereta api di Indonesia secara lantang menyatakan diri berafiliasi dengan kelompok kiri, yaitu komunis, baik secara ideologi dan juga organisasi. Sedangkan PFB yang didominasi oleh buruh pabrik gula yang secara jelas berbasis putih atau keagamaan dalam ideologi nya akan sangat bertentangan dengan paham komunis VSTP. Memasuki awal kemerdekaan lahir juga SOBSI sebagai lembaga yang menaungi seluruh serikat buruh di Indonesia yang juga secara lantang menyatakan afiliasinya pada kelompok kiri, ditambah lagi SOBSI saat itu juga termasuk salah satu badan otonom di bawah naungan PKI. Dalam konteks Indonesia, khususnya pada masa Pergerakan Nasional hingga Demokrasi Terpimpin, akan jelas sekali terlihat bahwa ada dua arus utama gerakan buruh yang terbagi sesuai dengan afiliasi mereka, yaitu serikat buruh yang berafiliasi dengan kelompok kiri dan serikat buruh yang berafiliasi dengan islam.

Hal ini, dalam pandangan gerakan buruh, berafiliasi kiri merupakan realitas sosial yang cukup membingungkan. Secara vertikal, musuh dari sebuah gerakan buruh dalam terminology ideologi kiri adalah kaum kapitalis atau pengusaha pemilik modal. Namun secara horizontal, gerakan buruh berafiliasi kiri menemukan mitra tandingan yaitu gerakan buruh berafiliasi islam yang pada

situasi dan kondisi tertentu tidak hanya berebut pengaruh atas masa buruh namun juga dengan gencar menyerang gerakan buruh berafiliasi kiri yang berlandaskan sentiment primordial keagamaan.<sup>15</sup> Kesadaran mengenai perjuangan kelas ini menjadi cukup melekat pada memori setiap gerakan buruh berafiliasi kiri yang seolah menjadi kehilangan relevansinya ketika mereka harus berbenturan dengan gerakan buruh berafiliasi islam yang walaupun juga berjuang melawan kapitalisme, senantiasa mengedepankan kesadaran primordial keagamaan.

Tudingan gerakan buruh berafiliasi kiri kepada gerakan buruh berafiliasi islam pun menjadikan buruh berafiliasi islam kehilangan relevansinya ketika gerakan buruh berafiliasi islam seperti PFB dan Sarbumusi pada awal Pemerintah Presiden Soeharto, juga bersikap keras terhadap kapitalisme dan negara yang telah menindas keras terhadap kaum buruh. Sebaliknya ketika kelompok islam termasuk gerakan buruhnya menuding kelompok kiri sebagai “tidak beragama”, maka tudingan tersebut selain sering tidak tepat sasaran juga berdampak pada timbulnya antipati dari masa kelompok kiri yang mayoritas muslim. Persinggungan ideologis antara ideologi kiri dengan ideologi islam yang jatuh seiring dengan perjuangan universal gerakan buruh melawan penindasan kapitalisme menyebabkan realitas sosial gerakan buruh di Indonesia menjadi sangat rumit. Karena bisa dilihat secara jelas bahwa serikat buruh kiri dan serikat buruh islam secara vertikal mempunyai musuh bersama yaitu kapitalisme, namun di sisi lain secara horizontal di antara mereka terdapat kompetisi dan bahkan konflik yang serius dengan argumentasi yang berbeda dari setiap kelompok.

Dari problematika ini, yang menjadikan gerak tumbuh kembang serikat buruh di Indonesia menjadi sangat berwarna dari zaman kolonial di era pergerakan nasional hingga di awal Pemerintah Presiden Soeharto. Dimana realitas sejarah gerakan buruh memperlihatkan bahwa keterlibatan buruh dalam politik di Indonesia hanya menyebabkan ketidak optimalan kinerja dan perjuangan mereka sendiri dalam memperjuangkan nasib kaum buruh. Hal ini karena gerakan kaum buruh tidak saja harus menghadapi kapitalisme pengusaha pemilik modal, namun juga harus berkompetisi dan mengalami konflik dengan

---

<sup>15</sup> Djumadi, *op.cit.*, hlm. 15

sesama gerakan buruh karena masalah perbedaan ideologi. Kehadiran serikat buruh di Indonesia pada awal Pergerakan Nasional seiring dengan mulai masuknya arus modal dari luar negeri dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia yaitu menjadi buruh. Di berbagai tempat, tercipta komunitas-komunitas industri yang membentuk suatu kelas sosial baru dalam masyarakat Indonesia, yaitu kelas buruh. Di Surakarta dan sebagian Yogyakarta, industri batik tumbuh dan berkembang. Akan tetapi, industri yang berkembang di Hindia-Belanda sangat sedikit yang merambah industri manufaktur dan hanya terbatas pada industri batik, industri gula dan kereta api. Karenanya, walaupun serikat-serikat buruh dalam komunitas-komunitas industri, namun industri yang berkembang sangatlah terbatas.

Hal ini mengakibatkan proses pembentukan kelas buruh atau proletarisasi menjadi sedikit sekali terjadi, sehingga untuk melancarkan revolusi dengan buruh sebagai garda terdepan sesuai terminology kiri masih merupakan suatu angan-angan belaka. Akibatnya gerakan buruh yang hadir seperti VSTP dan PFB tidak di tolong dengan adanya basis material yang memadai, sehingga ketika pemerintah kolonial memutuskan untuk menghantam gerakan buruh pada tahun 1923, VSTP dan PFB tidak bisa memberi perlawanan yang berarti hingga akhirnya di bubarkan.

Dua konflik yang mendasari lambatnya pertumbuhan serikat buruh di Indonesia sebagai langkah masyarakat menentang adanya kapitalisme dan juga demi menanamkan rasa nasionalis bangsa kepada masyarakat mengakar cukup kuat hingga memasuki era Pemerintah Presiden Soeharto di jaman Soeharto. Salah satu bentuk politik praktis adalah alasan terbesar pertumbuhan serikat buruh pada saat itu, dimana hampir semua partai politik turut membentuk serikat buruh yang nantinya berafiliasi dengan dunia politik kepartaian mereka. Serikat buruh yang terbentuk saat itu, seperti Buruh Kerakyatan Indonesia (BKI) dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Sarikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang berafiliasi dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) yang berafiliasi dengan Partai Nahdlatul Ulama (NU), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dengan Partai Komunis

Indonesia (PKI), Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Gabungan Organisasi Buruh Sarekat Islam Indonesia (GOBSII) dengan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Sarekat Buruh Kristen Indonesia (SBKI) dengan Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Organisasi Buruh Pancasila (OB. Pancasila) dengan Partai Katolik Indonesia dan Partai Rakyat Nasional (PRN) angkatan darat juga melakukan pembentukan SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia) di tahun 1961.<sup>16</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) dengan Sarbumusi sebagai serikat buruh di bawah naungan badan otonom mereka secara jelas menyatakan dirinya golongan islam, menentang keras adanya kapitalisme di dunia buruh demi menggawangi usaha buruh menuntut kesejahteraan mereka.<sup>17</sup> Sarbumusi juga menjadi salah satu ujung tombak Jendral Soeharto dalam proses pemberantasan PKI di tubuh serikat buruh yang saat itu tersentral di SOBSI selaku sentral serikat buruh yang berada di bawah naungan partai PKI. Paham komunis yang saat era Soeharto coba diberantas berjalan lurus dengan tentangan yang berasal dari tubuh Sarbumusi selaku penganut paham islam. Lalu meledaklah peristiwa G30S, dimana runtutan peristiwa pemberantasan PKI hingga akar-akarnya di lini serikat buruh menjadikan Sarbumusi salah satu ujung tombak.

SOBSI yang saat itu menjadi sentral serikat buruh adalah serikat buruh tandingan terkuat Sarbumusi. Berhasil diberantas bersamaan dengan lahirnya era Pemerintah Presiden Soeharto. Namun bukan dengan tanpa saingan Sarbumusi berdiri di era Jendral Soeharto, dilema berat yang terjadi pada Sarbumusi saat itu, dimana Pemerintah Presiden Soeharto mencoba mengendalikan gerakan buruh dengan membuat kebijakan-kebijakan baru dengan sangat represif hingga memasung hak hukum buruh terutama hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak bagi kemanusiaan serta hak untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi. Kebijakan perburuhan Pemerintah Presiden Soeharto dibangun

---

<sup>16</sup> Tongam Panggabean, *Gerakan Serikat Buruh DI Medan 1971-1990, Skripsi..* Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 2

<sup>17</sup> Amalya Isa Yulianti, *Sejarah Perjuangan SARBUMUSI Terhadap Kaum Buruh Di Sidoarjo Tahun 2000-2014 M, Thesis.* Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 3.

berdasarkan kepentingan Pemerintah Presiden Soeharto untuk menarik sebanyak-banyaknya investor asing sekaligus meyakinkan mereka bahwa iklim penanaman modal di Indonesia cukup kondusif. Tentangan keras yang diberikan Sarbumusi terhadap kebijakan baru pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto malah mengharuskan Sarbumusi menerima kekalahan dan menjadikan Sarbumusi harus meleburkan diri dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) bersama serikat buruh lainnya demi mempertahankan serikat buruh mereka agar tidak mengalami hal lebih buruk lagi seperti pembubaran. Dari berdirinya FBSI pada 20 Februari tahun 1973 menandai fakumnya eksistensi serikat buruh- serikat buruh di Indonesia, kediktatoran Pemerintah Presiden Soeharto dalam setiap kebijakannya mengarahkan semua ke FBSI demi mengangkat eksistensi sentral serikat buruh itu, secara tidak langsung serikat buruh lainnya yang sudah meleburkan diri tidak memiliki kesempatan apapun.

Matinya demokrasi di era Pemerintah Presiden Soeharto menandai sebuah masalah baru di dunia serikat buruh, bahwa kapitalisme dan perbedaan paham komunis dengan islam sudah berusaha diatur secara penuh di dalam setiap kebijakan pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto dengan mengatasnamakan demi kesejahteraan kaum buruh. Jika dilihat dari sisi upaya membangun suasana kondusif di dunia serikat buruh, usaha yang dilakukan Pemerintah Presiden Soeharto sangatlah berpihak kepada kepentingan para penanam modal yang lebih mengutamakan atmosfir kerja sehat dan mampu membungkam mulut- mulut vokal para kaum pergerakan. Kondisi ini sangat ideal bagi mereka menanamkan modal dan mendirikan perusahaan, guna membangun pondasi perekonomian melalui sektor industry, Pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto menempuh jalan yang dimana kesejahteraan dan kemerdekaan para tenaga kerja bukanlah prioritas utama, dan hal-hal lain yang berbau gerakan buruh akan selalu diintervensi oleh pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto.

Melewati masa-masa kalam serikat buruh, lengsernya Jendral Soeharto sesudah gerakan reformasi mahasiswa pada Mei 1998 menjadi momentum kebangkitan bagi serikat-serikat buruh. Memasuki masa reformasi di tahun yang sama di bawah perintah presiden BJ Habibie melalui keputusan Presiden No. 83

tahun 1998 meratifikasi konvensi ILO no 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan hak berorganisasi yang kemudian diimplementasikan dalam UU No, 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.<sup>18</sup> Momen ini benar-benar tidak disia-siakan oleh semua serikat buruh utamanya Sarbumusi yang dimana tokoh-tokoh Sarbumusi di seluruh Indonesia langsung mendesak Fungsiaris Sarbumusi tingkat Nasional yaitu Drs. H Sutanto Martoprasono yang secara yuridis formal masih sebagai ketua umum (1969) guna memfasilitasi adanya forum silaturahmi nasional yang tujuannya adalah untuk menyambut bangkitnya kembali Sarbumusi di tengah tidur panjangnya dan langsung melengkapi kepengurusan Dewan Perwakilan Pusat Sarbumusi. Pada 10-11 Mei 1999 di Griya Kopo Bogor Jawa Barat salah satu rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional DPP mengamanatkan pada Muktamar NU ke-XXX bulan November 1999 di Lirboyo Kediri Jawa Timur, untuk mengembalikan Sarbumusi sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama' dan pada Muktamar NU 1999 di Kediri tersebut, Sarbumusi resmi menjadi Banom NU kembali.<sup>19</sup>

Dari berakhirnya era Pemerintah Presiden Soeharto, dalam rangka pemberantasan paham komunis di kalangan kaum buruh, para serikat buruh golongan Islam pun sebenarnya juga mendapatkan untung, yaitu pesaing terkuat mereka SOBSI dan serikat-serikat buruh yang tergabung di dalamnya menjadi tersingkir. Menjadikan serikat-serikat buruh lain yang tidak sepaham dengan mereka terutama serikat buruh yang secara ideologi bertentangan menjadi lebih leluasa dalam membesarkan serikat buruh mereka sesuai ideologi yang mereka anut, tanpa pesaing lain yang sama kuatnya. Terhitung sejak memasuki era Reformasi dan kebangkitan serikat buruh dari masa fakumnya di era Pemerintah Presiden Soeharto corak perjuangan serikat buruh menjadi hanya berjuang melawan kapitalisme demi kesejahteraan hidup para buruh hingga saat ini.

---

<sup>18</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 9

<sup>19</sup> Alfanny, *Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) 1955-1973*. Skripsi, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2001, hlm. 30

## 2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Jember sebelum Tahun 2001

Kabupaten Jember, merupakan salah satu kabupaten yang bertempat di Provinsi Jawa Timur Indonesia, Jember juga salah satu kabupaten di dalam wilayah Tapal Kuda Jawa Timur, di antara kabupaten-kabupaten yang lain yaitu Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. Jember dikenal sebagai kota Pendidikan karena memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri atau swasta yang cukup menjadi central bagi kota-kota setapak kuda atau bahkan se-Jawa Timur. Selain itu Jember juga dikenal sebagai kota santri, karena banyak sekali berdiri pesantren di banyak wilayah di Jember, tokoh-tokoh agama juga banyak yang bertempat tinggal di Jember yang lalu mendirikan atau merawat Yayasan pondok pesantren mereka masing-masing.

Secara bentuk geografis, Jember juga pernah menyandang nama kota seribu gumuk, karena wilayah Jember yang beragam dari laut, gunung, sungai, bukit, lembah, rawa yang menyebabkan keberagaman bentuk daratan di Jember, meskipun saat ini sudah banyak gumuk di Jember yang sudah dialih fungsikan menjadi banyak hal, seperti perumahan dan lainnya. Luas wilayah Kabupaten Jember adalah 3.293,34 Km, secara astronomis Kabupaten Jember terletak pada posisi 1130 30' s/d 1140 02'30" Bujur Timur dan 70 59'6" s/d 80 33'56" Lintang Selatan<sup>20</sup>. Dalam segi bentuk dataran Jember berupa ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, dengan dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas utara dan timur serta Samudra Hindia di sepanjang batas selatan dengan pulau Nusabarong yang merupakan pulau satu-satunya yang ada di wilayah Jember. Batas-batas administrasi Kabupaten Jember adalah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebagian kecil Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah selatan Berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Mengenal Jember untuk mengetahui kondisi sosial dan perekonomiannya pada tahun sebelum 2001, maka harus melihat Jember dari beberapa sektor penyokongnya, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Jember Dalam Angka Tahun 2001, (Jember: Badan Pusat Kabupaten Jember, 2001), hlm. xviii



#### a. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu system yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam daerah/wilayah. Kabupaten Jember yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai system pemerintahan yang sama dengan kabupaten / kota lainnya di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Unit pemerintahan dikoordinir oleh pemerintah Kabupaten secara langsung adalah Kecamatan- kecamatan. Masing-masing Kecamatan terdiri dari beberapa Desa/Kelurahan. Sebagai unit terkecil pemerintahan setiap Desa/Kelurahan mempunyai proyek pembangunan Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan tersebut meliputi sarana dan prasarana dari Desa/kelurahan.

Kabupaten Jember, secara administratif terbagi menjadi 8 pembantu Bupati/Distrik, 31 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 248 desa/kelurahan dan 23 di antaranya dengan status kelurahan, memiliki sekitar 67 pulau-pulau kecil. Secara administrasi Kecamatan di Jember di antaranya Kencong, Gumuk Mas, Puger, Wuluh, Ambulu, Tempurejo, Silo, Mayang, Mumbulsari, Jenggawah, Ajung, Rambipuji, Balung, Umbulsari, Semboro, Jombang, Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Sukorambi, Arjasa, Pakusari, Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, Sukowono, Jelbuk, Kaliwates, Sumpalsari dan Patrang. Kecamatan Tempurejo yaitu seluas 524,46 Km<sup>2</sup> merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember yaitu sekitar 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember, namun dengan jumlah penduduk hanya sekitar 70 ribu saja di kisaran tahun 1998-2001 dengan kepadatan hanya 294,62 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>21</sup>

#### b. Jumlah Penduduk

Sensus penduduk tahun 2000 sampai 2001 mencatat bahwa rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Jember sebanyak 2.162.688 jiwa. Sex ratio sebesar 96.54 % yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan 3,46% lebih

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 23

banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki- laki. Dari jumlah penduduk sebesar 2.162.688 jiwa tersebut 427 jiwa diantaranya berwarga negara asing yang tersebar di 9 kecamatan.<sup>22</sup>

Kepadatan penduduk Kabupaten Jember rata-rata 852,24 jiwa/Km<sup>2</sup> yang berarti ada kenaikan sebesar 2,68 %Km<sup>2</sup>, dibanding keadaan tahun 1999. Jumlah penduduk terbesar berada di beberapa kecamatan yang terpisah cukup jauh, yaitu Kecamatan Sumpalsari yang berada di tengah kota yaitu sebesar 3.498,00 jiwa/Km<sup>2</sup>, lalu Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan penduduk sebesar 2.947,52 jiwa/Km<sup>2</sup>, lalu dua kecamatan di Jember bagian selatan yaitu Puger dan Wuluhan dengan kepadatan rata- rata hanya 237,73 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan untuk jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Jelbuk, Arjasa dan Sukorambi dengan total rata-rata penduduk hanya sekitar 30 ribu jiwa.<sup>23</sup>

Jika kita lihat penduduk Kabupaten Jember melalui komposisi umurnya, maka penduduk Jember termasuk penduduk Intermediate. Dilihat dari umur anak ( 0-14 tahun) sebesar 26% atau sekitar 560.000 jiwa rata-rata di tahun 2001, penduduk diatas umur 65 tahun hanya sekitar 5% atau 120.000 jiwa saja dan penduduk di umur produktif yaitu 15 sampai 64 tahun mencapai 1.400.000 jiwa atau 69% dari total penduduk Kabupaten Jember.<sup>24</sup> Maka sangat terlihat bahwa sumber daya manusia Kabupaten Jember cukup potensial sekali dalam mendukung pembangunan daerah.

### c. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk yang bekerja di kisaran tahun 2001 rata-rata masih didominasi mata pencaharian di sektor pertanian dengan jumlah warga sebesar 452.000 ribu jiwa atau sebesar 49.56 % dari seluruh tenaga kerja di seluruh Kabupaten Jember. Lalu disusul dari sektor perdagangan yang mencapai angka

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. xvii

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 21

189.171 ribu jiwa. Dari sektor industry saat itu hanya sekitar 82.383 ribu jiwa dan dari sektor jasa hanya sekitar 59.712 ribu jiwa.<sup>25</sup> Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama. Sebagian besar warga Jember, baik dari tanam bahan pokok seperti padi, perkebunan buah, sayur hingga ke perkebunan untuk kebutuhan industry seperti tebu, kopi dan tembakau.

Dari perhitungan lain, pada tahun 2001 kebutuhan warga Jember terhadap lapangan kerja selain di sektor pertanian mencapai angka hampir 20.000 pencari lowongan kerja, naik 6000 atau sekitar 8,52 % dari kebutuhan kerja di tahun sebelumnya. Sedangkan lowongan kerja yang tersedia hanya sekitar 2.031 lowongan kerja, dari segi kebutuhan tenaga kerja luar negeri Jember mengirim sekitar 748 jiwa. Ini menandakan bahwa sektor industry, atau terbukanya pintu bagi investor asing menanamkan modalnya untuk membangun perusahaan, pabrik-pabrik industry untuk pembukaan lowongan kerja masih kurang sekali. Dari angka sebesar itu, pemetaan tipe SDM tenaga kerja dari tingkat Pendidikan, masih didominasi warga tamat SMA yaitu, sejumlah 3.155 ribu jiwa, tamatan SMP sejumlah 1.121 ribu jiwa dan tamatan perguruan tinggi atau sarjana sejumlah 1.364 ribu jiwa.<sup>26</sup>

Ketersediaan lapangan kerja dan kesanggupan pihak pemerintah dalam mensejahterakan warganya juga mempengaruhi kesanggupan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terdiri dari sandang, pangan dan papan yang ketika ditarik rata-rata berada dikasaran angka 305.000 ribu rupiah perbulannya.

#### d. Pendidikan

Sarana fisik Pendidikan merupakan penunjang utama dalam proses belajar mengajar, khususnya jumlah sekolah yang tersedia dan banyaknya tenaga pengajar yang tersedia. Tahun ajaran 2000-2001 jumlah SD di Jember sebanyak 1.265 yang dimana terdiri dari 1.211 SD negeri dan 54 SD swasta dengan jumlah 9.095 ribu tenaga pengajar pada saat itu. Di tataran sekolah

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. xvii

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 29

menengah pertama atau SMP, ada berjumlah 68 SMP Negeri dan 175 SMP swasta dengan total tenaga pengajar berjumlah 4.324. Sedangkan SMA berjumlah 25 SMA negeri dan 92 SMA swasta dengan tenaga pengajar berjumlah 2.875.<sup>27</sup> Dari jumlah ketersediaan sarana prasarana Pendidikan dimulai dari bangunan sekolah beserta fasilitas di dalamnya hingga ketersediaan tenaga pengajar akan sangat menentukan sebanyak dan sebaik apa generasi yang tercetak dan sumber daya manusia yang dilahirkan.

Selain itu dari tataran perguruan tinggi, Kabupaten Jember sudah memiliki 14 perguruan tinggi dengan 2 di antaranya adalah perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Jember dan Sekolah Tinggi Agama Islam. Sedangkan 12 perguruan tinggi swasta lainnya yaitu, Universitas Moch. Sroedji, Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Jember, IKIP PGRI Jember, STIPER, KOSGORO, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Mandala), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA Pembangunan) Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan (STIKEN), Akademi Bahasa Asing, “Bhakti Pertiwi” Jember, Akademi Akuntansi PGRI Jember, Akademi Peternakan PGRI dan Akademi Perawat. Dengan jumlah perguruan tinggi yang dimiliki Jember saat itu, sudah mampu menjadikan Jember menjadi berpredikat Kota Pendidikan dan menjadi kiblat sekolah tinggi dari kota- kota tetangga.<sup>28</sup>

Selain menjadi salah satu pusat sarana prasarana pendidikan dikawasan Keresidenan Besuki, Jember tercatat juga sebagai kota yang berhasil menjaga dan menumbuhkan kembangkan pembangunan dibidang seni dan budaya. Dapat dikatakan berhasil karena terlihat dari perkembangan tumbuhnya perkumpulan kesenian di berbagai jenis seni yang ada di Jember. Pada tahun 1998 tercatat sebanyak 169 meningkat menjadi 225 perkumpulan di tahun 1999, sedang pada akhir 2000 meningkat lagi menjadi 656 organisasi perkumpulan kesenian.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 37

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>29</sup> *ibid.*, hlm. 39

e. Agama

Kehidupan beragama di Kabupaten Jember yang tidak beda dengan daerah lain, dimana mayoritas warganya beragama islam, mencapai 95% warga Jember beragama islam, disusul oleh pemeluk agama Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha. Dengan jumlah pemeluk agama islam sebesar itu, sarana prasarana ibadah sangat penting keberadaanya, tercatat di tahun 2001 ada 1993 ribu Masjid, 3.372 ribu Langgar dan 14.334 ribu Musholla. Sedangkan Gereja ada 56, Pure ada 10 dan Vihara ada 2.<sup>30</sup>

f. Perekonomian

Ada beberapa sektor yang menopang perekonomian Jember. Bagian paling dominan adalah berasal dari sektor pertanian. Di tahun 2001 sektor pertanian mengalami peningkatan yang sangat berarti, khususnya sub sektor tanaman pangan. Walau mengalami penurunan lahan panen sebesar 1,74 % namun ada peningkatan produksi padi sebesar 1,62 % dibandingkan tahun 1999 – 2000.<sup>31</sup> Hal ini berarti ada peningkatan produktivitas sebesar 3,40 % dimana pada tahun sebelumnya produktivitas padi sebesar 52.27 Kwintal/Ha, menjadi 54.05 Kwintal/Ha pada tahun 2001.

Demikian juga pada komoditi kedelai, lahan panen pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 24,38 %, sehingga produksi secara total juga mengalami penurunan sebesar 13,68 %. Sedangkan untuk produktivitas mengalami kenaikan sebesar 16.33 % yaitu dari 11.76 Kwintal/Ha menjadi 13.68 Kwintal/Ha tahun 2001<sup>32</sup>.

Secara umum untuk subsektor tanaman prkebunan dan kehutanan mengalami kenaikan yang sangat variatif. Perekonomian Jember juga tertopang dengan hasil tanam tembakaunya, dengan kualitas ekspor tipe Na-Oogst (NO) yang merupakan jenis tembakau bahan pembuatan cerutu atau cigarillo dengan

---

<sup>30</sup> *ibid.*, hlm. 71

<sup>31</sup> *ibid.*, hlm. 92

<sup>32</sup> *ibid.*, hlm. 94

hasil panen hampir mencapai 12.000 ton di tahun 2001, dan tipe VO atau Voor-Oogst yang merupakan bahan pembuatan rokok putih dan rokok kretek dengan hasil panen mencapai 7.600 ton, lalu disusul tipe Bobin dan Cerutu dengan hasil panen hanya 214 ton dan 1 ton di tahun 2001. Dengan luas total lahan tanam yang hampir mencapai 17.000 Ha, menjadikan Jember mampu tumbuh dan berkembang dengan kedua sektor tadi yang menopang.<sup>33</sup>

Untuk subsektor peternakan masih tidak banyak peningkatan dari tahun 1999 bahkan sedikit mengalami penurunan produksi. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah ternak yang dipotong, misalnya untuk ternak sapi, kerbau, domba dan babi semuanya mengalami penurunan produksi masing-masing sebesar 44,25 %, 8,40 %, 9,50% dan 31,64 %. Sedangkan untuk ternak kambing mengalami kenaikan sebesar 22,96 %. Beralih ke subsektor perikanan untuk tahun 2001, budidaya perikanan darat mengalami kenaikan sebesar 32,26 % atau dari 1341,23 ton tahun 2000 menjadi 1773,97 ton pada tahun 2001. Sedangkan untuk penangkapan ikan laut produksi pada tahun 2001 mengalami penurunan dari 9.385,35 atau turun sekitar 2,00 %<sup>34</sup>.

Sedangkan dari sektor industry hanya sedikit catatan yang dimiliki Kabupaten Jember, sudah selayaknya selaku kabupaten yang masih belum terlalu banyak di inflasi oleh investor asing untuk penanaman modal pembukaan perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik skala besar atau kecil. Ditahun 2001 di Jember ada 120 perusahaan yang berdiri dari 33 perusahaan industry besar dan 87 perusahaan industry kecil. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,71 % untuk industry besar dan 11,22 % untuk industry kecil. Perlu diketahui bahwa konsep dari industry memang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan konsep pada umumnya. Pada data yang dikumpulkan dengan konsep industry dititik beratkan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat bukan pada modalnya.

---

<sup>33</sup> *ibid.*, hlm. 101

<sup>34</sup> *ibid.*, hlm. 125

Dari sektor perdagangan di era krisis ekonomi yang berkepanjangan, Kabupaten Jember tidak dapat lepas dari dampak yang ditimbulkan. Pada tahun 2001 nilai ekspor Kabupaten Jember dari berbagai jenis komoditi mencapai nilai sebesar 74.556.055,60 US mengalami kenaikan 13,66 % dimana total nilai ekspor tahun sebelumnya sebesar 65.598.062,3 US. Jenis komoditi ekspor andalan Jember adalah jenis karet, kopi, coklat, tembakau, vanilli, batu piring, kedelai sayur dan furniture. Inflasi di Kabupaten Jember tahun 2001 sebesar 10,35 % mengalami kenaikan disbanding tahun sebelumnya yang hanya 3,30 %. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2,67 %<sup>35</sup>.

Secara riil pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember dilihat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, setelah didera badai krisis yang berkepanjangan. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pulih kembali, yaitu dengan tumbuh sebesar 3,33% dengan tingkat inflasi sebesar 9,00 %. Secara sektoral, kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB masih didominasi sektor pertanian yaitu sebesar 50,28 % dengan pertumbuhan riil sebesar 4,46 % dan tingkat inflasi sebesar 7,74 %, kemudian disusul sektor perdagangan sebesar 18,71% yang tumbuh sebesar 2,34 % dan tingkat inflasi disektor ini sebesar 9,04 % dan terendah pada sektor bangunan yaitu sebesar 1,05 %.<sup>36</sup> Beralih pada salah satu komponen pendapatan daerah yang juga dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk negara pada suatu wilayah pada waktu tertentu. Pendapatan perkapita tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.249.110,- meningkat 12,23 % bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertumbuhan produksi fisik yang berlaku dan kenaikan harga barang yang membentuk produksi.

Dari penjabaran kondisi social ekonomi Jember di tahun 2001 keatas, berdasarkan data statistic Jember pada tahun 2000-2001 terlihat bahwa Jember masih jauh dari kata kota industry, dimana penopang utama perekonomian

---

<sup>35</sup> *ibid.*, hlm. 139

<sup>36</sup> *ibid.*, hlm. xxi

masih berasal dari sektor pertanian disusul dari sektor perkebunan dan perdagangan. Disamping itu pertumbuhan penduduk masih sangat sulit diredam, tidak seimbang dengan pertumbuhan kualitas masyarakatnya baik dari segi pendidikan, kesehatan ataupun sarana prasana lain yang dimiliki untuk menopang masyarakat Jember menjadi lebih maju.

Kualitas masyarakat, dari SDM, kepadatan hingga pertumbuhan social ekonomi lainnya juga menjadi sorotan bagi para investor asing penanam modal, selain juga kondusifitas ketenagakerjaan dan peraturan daerah yang mengatur hubungan antara pekerja dan majikan juga menjadi sorotan penting lainnya. Hal ini juga yang menyebabkan Jember di tahun 2001 masih terbelang jauh sebagai kota industry, iklim buruh dan tenaga kerja pabrik juga masih lambat peningkatannya. Ditambah lagi Indonesia yang pada saat itu baru saja bangkit dari keterpurukannya di tahun 1998, pasca lengsernya Pemerintah Presiden Soeharto dan terjadinya krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia.

Jember sebagai kabupaten yang ditopang oleh produktivitas masyarakatnya baik dari sektor pertanian, perkebunan atau perdagangan pasti sangat merasakan dampak dari terjadinya krisis perekonomian. Meskipun sebenarnya dimasa Pemerintah Presiden Soeharto, pemerintah telah melakukan banyak usaha untuk mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, selain pabrik-pabrik atau perusahaan yang didapat dari hasil rampasan perang dengan penjajah, yang berdiri saat itu Sebagian besar adalah hasil kongkalikong pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto dengan investor asing, dimana jalannya penegakan hukum mengenai ketenagakerjaan dan pembangunan perusahaan saat itu masih kurang sehat karena berjalan mutlak satu arah, melalui lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk dan di kelola langsung oleh pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto dengan lembaga asing atau langsung menuju perusahaan yang akan masuk ke Indonesia.

### **2.3 Kondisi Perburuhan di Jember sebelum Tahun 2001**

Pasca kebangkitannya, serikat buruh-serikat buruh ditahun 1998 yaitu setelah lengsernya rezim Soeharto beserta pemerintah Pemerintah Presiden



Soeharto, setiap serikat buruh mulai secara perlahan membangun kembali serikat mereka beserta anggota-anggota yang telah tercerai berai dan tersebar akibat peleburan kedalam FBSI karena segala kebijakan perburuhan yang saat itu berpusat melalui FBSI.<sup>37</sup> Kondisi perburuhan pada awal kebangkitan mereka terhitung merangkak dengan cepat karena pada dasarnya banyak serikat buruh yang tidak secara menyeluruh membubarkan diri, seperti halnya Sarbumusi yang hanya menonaktifkan jajarannya selama memfakumkan diri di masa Pemerintah Presiden Soeharto, dengan begitu Sarbumusi bisa dengan cepat dan mudah mendeklarasikan kebangkitannya kembali pada 26 Juni 1998. Sama dengan banyak serikat buruh lainnya, Langkah awal yang ditempuh pasca kebangkitan mereka adalah mendeklarasikan kebangkitan serikat dan membangun serta melengkapi kembali kepengurusan masing-masing Dewan Perwakilan Pusat (DPP) pada tiap-tiap serikat.

Langkah selanjutnya adalah dengan bergerak cepat membentuk basis-basis baru di tiap-tiap perusahaan di tiap daerah DPP mereka masing-masing. Seperti halnya yang dilakukan oleh Sarbumusi, sejak deklarasi kebangkitannya Kembali Sarbumusi oleh Ketua Umum Sarbumusi Drs. H. Soetanto Martoprasono dengan cepat membentuk basis-basis GLBK (Gerakan Buruh Lapangan Pekerjaan) diberbagai pabrik dan perusahaan khususnya di Jawa Timur. Dalam jangka waktu dua tahun, yaitu pada tahun 2000 Sarbumusi telah mampu membentuk basis di pabrik rokok Gudang Garam Kediri dan ketika saat itu terjadi pemogokan kerja besar-besaran di Gudang Garam, Sarbumusi telah mampu melakukan tindakan advokasi bagi para buruh perusahaan demi memperjuangkan aspirasi dan keadilan bagi para buruh.<sup>38</sup>

Memasuki era bangkitnya kembali serikat buruh, Kabupaten Jember selaku salah satu kota di Jawa Timur yang pertumbuhan ekonominya sebagian besar ditopang dari sektor pertanian dan perkebunan tidak begitu merasakan

---

<sup>37</sup> Sukarno, *This is The FBSI, All Indonesian Labour Federation*. Jakarta: Prisma, 1992. hlm. 6

<sup>38</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *Sejarah Gerakan Sarbumusi*. (Jakarta: DPP KONFEDERASI SARBUMUSI. 2016), hlm. 23

dampak dari aktifnya kembali serikat buruh pada awal bangkitnya para serikat buruh, hal ini dikarenakan masih belum banyak sektor industry atau perusahaan yang berdiri di Jember. Adapun perusahaan di Jember masih didominasi dari sektor pertanian dan perkebunan dan peran serikat buruh yang saat itu masih banyak ditemui di sektor perkebunan masih sangat kurang maksimal karena terhitung baru bangkit dan pada kisaran tahun 1999 sampai 2001.<sup>39</sup>

Disamping itu peraturan pemerintah yang mengatur nasib perburuhan atau ketenagakerjaan belum sepenuhnya sempurna, karena sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Pemerintah Presiden Soeharto, Pemerintah Presiden Soekarno hingga masuk awal era reformasi perundang-undangan yang mengatur hukum ketenagakerjaan terus mengalami perubahan dan penambahan.<sup>40</sup>

Dari sejarahnya hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan, dan yang mengeluarkan hukum tersebut adalah Belanda saat masih menjajah Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda ada 4 hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan, yaitu hukum perbudakan, perhambaan, kerja rodi dan *Poenale Sanctie*. Hukum perbudakan disini menetapkan bahwa budak tidak memiliki hak apapun, termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, ataupun penggantian nama untuk para budak. Pada hukum perhambaan sedikit memiliki kesamaan dengan hukum perbudakan, hanya saja lebih ringan karena hamba menurut hukum ini merupakan barang jaminan karena adanya utang yang belum dilunasi.

Setelah itu muncul hukum rodi, dalam praktiknya tidak jauh beda dengan hukum perbudakan. Pada hukum rodi, masyarakat dipaksa bekerja demi kepentingan penguasa, salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi adalah

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Iswinarso mantan ketua DPC Sarbumusi Jember. Jumat, 4 Oktober 2020. Pukul 17.04 WIB

<sup>40</sup> Wawancara dengan Wahyu Adi, Wakil Ketua I DPC Sarbumusi Jember. Jumat, 9 Oktober 2020. Pukul 22.20 WIB.

pembangunan Jalan Daendels sejauh 1000 km yang menghubungkan antara Panarukan di Jawa Timur dengan Anyer di Banten. Setelah itu ada hukum *Poenale Sanctie*, pada awalnya *Poenale Sanctie* diberlakukan *Politie Straaf reglement* alias Peraturan Pidana Polisi. Peraturan ini lebih menitikberatkan pada kepentingan majikan, dan akhirnya dihapus pada tahun 1879. Keberadaannya diganti oleh *Koeli* (kuli) *Ordonantie* 1880 yang kemudian dikenal dengan nama *Poenale Sanctie*.<sup>41</sup> Dalam hukum baru ini, Pemerintah Belanda melarang adanya pemaksaan, ancaman, atau pemerasan dalam hubungan perburuhan. Selain itu, perjanjian antara buruh dan majikan harus dilakukan secara tertulis pada rentang waktu tertentu. Ketika aturan ini dilanggar, akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, baik majikan ataupun buruh. Sebelum memasuki era Soekarno, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan sudah mulai banyak mengarah ke keadilan bagi para buruh, karena hukum terakhir yang dibuat oleh Belanda sudah mensyaratkan harus ada hitam diatas putih pada setiap perjanjian antara buruh dan majikan. Memasuki era Pemerintah Presiden Soekarno hukum perburuhan dan ketenagakerjaan mengalami banyak penambahan yang juga semakin memperjelas dan menjamin nasib para buruh didalam perusahaan dalam rangka memberi perlindungan kepada para tenaga kerja, antara lain :

- 1) UU Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
- 2) UU Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Kerja
- 3) UU Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
- 4) UU Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
- 5) Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh
- 6) UU Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Dasar-dasar Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
- 7) UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselesaian Hubungan

---

<sup>41</sup> <https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-danketenagakerjaan-di-indonesia/>

Industrial<sup>42</sup>

Namun, dimasa Pemerintah Presiden Soekarno nasib buruh mengalami perbaikan tidak sepenuhnya karena peraturan baru ciptaan pemerintah Pemerintah Presiden Soekarno, namun sebaliknya karena ada banyak gerakan buruh melalui serikat-serikat buruh yang saat itu merasa ada lini-lini lain yang masih merugikan para buruh. Salah satunya dengan adanya Dewan Perusahaan perusahaan yang di ambil alih dari Belanda dalam rangka nasionalisasi, untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh, tantara mengambil alih penjarahan perusahaan oleh para buruh, hal ini dirasa tidak sesuai dengan tujuan awal dibentuknya badan-badan pengambilalihan yang digawangi oleh para buruh seperti Barisan Buruh Indonesia (BBI) dengan tujuan yang sama yaitu nasionalisasi. Selain itu ada juga gerak politis dan ekonomis buruh yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan (*lock out*) di perusahaan- perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital.<sup>43</sup> Hal ini adalah salah satu bentuk adaptasi para buruh dengan perserikatannya masing-masing dalam rangka mencari keleluasaan dalam melakukan pergerakan dan sebisa mungkin menyampaikan aspirasi dalam berbagai bentuk.

Di masa Pemerintah Presiden Soeharto, ada baik buruk yang didapat dari kebijakan Soeharto mengenai hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Baiknya adalah dibuatnya dua peraturan baru yaitu Peraturan Menakertranskop No. 8/EDRN/1974 perihal Pembentukan Serikat Pekerja/Buruh di Perusahaan Swasta dan No. 1/MEN/1975 perihal Pendaftaran Organisasi Buruh.<sup>44</sup> Dua peraturan baru ini menjadikan gerak buruh untuk berserikat dan berorganisasi didalam persusahaan semakin bebas dan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah.

---

<sup>42</sup> Agusmidah, *Sejarah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Power Point, Yogyakarta, 2011, slide. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.*, slide. 13.

<sup>44</sup> Hafidz, Vedi, R. *Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru*. Jakarta. Prisma, LP3ES, 1996, hlm. 14

Namun, yang disesalkan adalah Soeharto membuat serikat buruh tunggal yaitu SPSI, dengan kebijakan yang menyatakan bahwa segala urusan buruh melalui serikat buruh yang berurusan dengan majikan atau perusahaan hanya bisa melalui SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) hal ini menjadikan serikat buruh lain tidak berdaya dan tidak bisa menjalankan roda organisasinya. Selain itu juga peran militer yang dalam prakteknya sangat besar dalam turut serta menyelesaikan perseleisihan perburuhan. Soeharto menyatakan sikapnya bahwa kebijakan industrilisasasi yang dijalankan pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto ini adalah dalam rangka mengimbangi kebijakan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan dengan menjalankan industrial peace khususnya, hal ini diterapkannya sejak awal Pelita III (1979-1983) yang menggunakan sarana dengan istilah HPP (Hubungan Perburuhan Pancasila).<sup>45</sup> Maksud dari kebijakan sepihak pemerintah Pemerintah Presiden Soeharto saat itu terkesan baik karena bermaksud membangun iklim perburuhan yang damai dan kondusif untuk menarik minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, dengan begitu sektor industry di Indonesia akan meningkat dan masyarakat pun akan menerima dampak baiknya. Namun dengan begitu juga hak berorganisasi para buruh menjadi terpenjarakan, demokrasi menjadi tidak ada artinya dengan kebijakan yang seperti itu.

Tahun 1998, pasca lengsernya Soeharto, BJ. Habibie membawa kebebasan kepada para serikat buruh dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 yang mensahkan Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi berlaku di Indonesia.<sup>46</sup> BJ. Habibie juga meratifikasi Konferensi ILO tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Konvensi No. 138 Tahun 1973) yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat Batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999. Kebijakan BJ.

---

<sup>45</sup> Ugo, Pujiyo. *Hukum Acrah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 3

<sup>46</sup> Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 26

Habibie terakhir kepada hukum ketenagakerjaan adalah diwujudkan pengundangan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.<sup>47</sup> BJ. Habibie benar-benar membebaskan hak demokrasi rakyat, hak asasi rakyat dan hak berorganisasi rakyat pasca dipenjarakannya dimasa pemerintahan Soeharto.

Lalu di tahun 2001 ada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai sangat melindungi kaum pekerja/buruh dan sekaligus juga memperbaiki iklim demokrasi dengan mengesahkan UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu UU No. 21 Tahun 2000.<sup>48</sup> UU ini mengatur semua hal tentang serikat buruh yang sangat membantu gerak buruh didalam perusahaan, dalam melegalkan diri menjadi sebuah serikat buruh yang aman dan berlandaskan hukum serta memiliki pedoman hukum. Jika ditotal ada 15 peraturan ketenagakerjaan yang terbentuk selama masa pemerintahan Soekarno sampai masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dan ke 15 peraturan itu lah yang menjadi pedoman para buruh serta perusahaan dalam menjalankan urusan mereka di tahun 2001 keatas. Dengan pengesahan yang bertahap dan proses yang tidak sebentar, serta penegakannya yang juga butuh proses, waktu serta pendisiplinan oknum penegak hukum menyebabkan masih banyak permasalahan buruh yang tidak tuntas. Lebih parahnya lagi, dikarenakan serikat buruh yang baru aktif di tahun 1999 – 2001, pasti menjadi salah satu faktor banyak permasalahan buruh yang tidak nampak ke dunia luar, karena kondisi perburuhan dan serikat buruh yang masih belum stabil, karena belum ada wadah yang mampu melihat dan merangkul secara merata atau karena peraturan ketenagakerjaan yang dalam proses terciptanya membutuhkan waktu bertahap yang memakan beberapa tahun untuk benar-benar mampu menjadi pegangan dan perlindungan bagi para buruh.

Sebelum ke 15 peraturan tadi disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang sangat mutlak nantinya, mampu menjadi payung bagi semua peraturan yang ada, dunia perburuhan berada dimasa terombang ambing. Terutama masalah

---

<sup>47</sup> Agusmidah, *op.cit.*, Slide. 15.

<sup>48</sup> Wijayanti, Asri. *op.cit.*, hlm. 28

perburuhan di Kabupaten Jember, di Jember yang pertama kali menyebarkan eksistensi serikat buruhnya pasca bangkitnya kembali serikat buruh adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang saat itu merupakan organisasi serikat swasta di Indonesia yang merupakan pengganti atau penerus serikat buruh FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang disahkan di Jakarta sejak tahun 1985. SPSI sebenarnya selama ini tidak sepenuhnya fakum, dikarenakan aksesnya yang masih terbilang mudah dalam menjaga eksistensinya selaku serikat buruh yang dinaungi langsung oleh pemerintah selaku serikat yang meneruskan kiprah FBSI.<sup>49</sup> Selain SPSI selaku serikat buruh, ada juga lembaga pemerintahan yang dinaungi langsung oleh dinas ketenagakerjaan yang bertugas mengawal dan memberi perlindungan untuk kaum buruh sesuai aturan pemerintah yaitu Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP2TKI). Dari kalangan lain yang juga gencar menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan nasib kaum buruh berasal dari kalangan Mahasiswa, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).<sup>50</sup> Keberadaan wadah-wadah itu tadi sudah ada di Jember sejak sebelum tahun 2001, LP2TKI selaku badan resmi pemerintah yang memang bertugas mengawal para buruh dan memberi perlindungan, sedangkan GMNI dari kalangan Mahasiswa yang membantu menyuarakan dan memperjuangkan hak dan aspirasi kaum buruh.

Secara kedudukan kelembagaan, LP2TKI dan GMNI tidak akan bisa sedekat dan semerata serikat buruh dalam mengawal dan memperjuangkan nasib kaum buruh, karena secara sudah jelas hal terkuat untuk menjamin nasib seorang buruh didalam perusahaan adalah basis serikat buruh di perusahaan itu sendiri<sup>51</sup>. Karena dengan begitu akan ada pengawasan mendetil dan diketahui oleh pihak buruh beserta perusahaan mengenai bagaimana penegakan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan ketenagakerjaan antara perusahaan dan

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bambang Edi Santoso, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Senin , 12 Oktober 2020. Pukul 10.20 WIB

<sup>50</sup> Wawancara dengan Wahyu Adi, Wakil Ketua I DPC Sarbumusi Jember. Jumat, 9 Oktober 2020. Pukul 21.27 WIB

<sup>51</sup> Wawancara dengan Umar Faruk ketua DPC Sarbumusi Jember. Selasa, 6 Oktober 2020. Pukul 17.12 WIB

pekerjanya. Dari sini akan menjadi jelas bahwa SPSI lah yang paling bisa dan secara kelembagaan mampu menjamin adanya pengawalan dan perlindungan para buruh didalam perusahaan.

Namun jika kita mampu merunut kembali, keberadaan SPSI selaku serikat buruh yang melanjutkan kiprah FBSI di Indonesia pasca lengsernya Pemerintah Presiden Soeharto tetap akan menemui kesulitan. Dimana masyarakat, kaum buruh terutama yang masih memiliki rasa trauma akan bagaimana jalannya penegakan demokrasi dan kebebasan berorganisasi dimasa Pemerintah Presiden Soeharto, dan siapa yang ditunjuk untuk mengawal para buruh bukan berasal dari hati Nurani para buruh, melainkan berasal dari kebijakan mutlak pemerintah. Para buruh yang saat itu tergabung kedalam FBSI pun juga bukan karena kemauan dari mereka seluruhnya, melainkan karena kebijakan pemerintah yang mengharuskan mereka ikut bergabung. Alhasil, lahirnya SPSI seakan menjadi momok bagi masyarakat saat itu, karena sejarah Panjang serikat buruh sentral di Indonesia yang tidak pernah berhasil menjadi wadah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Pasca lengsernya Pemerintah Presiden Soeharto pun menjadi momen kelahiran kembali serikat buruh-serikat buruh yang selama Pemerintah Presiden Soeharto harus fakum dan meleburkan diri kedalam FBSI, ini adalah momen yang ditunggu oleh para buruh dan tenaga kerja yang sebelumnya sudah tergabung dalam serikat buruh lain berdasarkan hati nurani mereka masing- masing.

Itulah kenapa kehidupan perburuhan di Jember pada tahun 2001 keatas pasca kebangkitan kembali serikat buruh-serikat buruh bisa dikatakan merupakan fase peregangan dari tidur panjangnya. Dan bagi buruh atau pekerja yang masih dalam serikat ataupun indenpenden dalam menghadapi permasalahan perburuhan saat itu sangat kurang ter *blow up* karena kondisi perburuhan dan serikat buruh yang masih carut marut dan belum kondusif. Fase dimana semua buruh dan perserikatannya sedang berbenah besar-besaran dan menyusun strategi baru dalam menghadapi era baru, yaitu era reformasi. Dimana tidak ada lagi pemerjaraan hak berorganisasi, peperangan ideologi antar serikat yang menyebabkan pemusnahan masal dan berjalannya hukum yang pincang karena



system atau aturan yang belum memadai. Era Reformasi, pasca Pemerintah Presiden Soeharto ditahun 1998 sampai 2001 adalah masa dimana serikat buruh kembali memantapkan hati dan langkah mereka, memandang permasalahan apalagi yang menunggu mereka di depan dan hambatan apalagi yang menanti mereka dalam usaha mereka memberi perlindungan dan mengawal pergerakan buruh di Indonesia.

## **2.4 Sejarah Berdirinya DPC Sarbumusi di Jember**

### **2.4.1 Proses berdirinya DPC Sarbumusi di Jember**

Lahirnya Sarbumusi menunjukkan adanya apresiasi dari kalangan Nahdliyin terhadap nasib kaum buruh. Kalangan Nahdliyin yang biasa menggunakan kitab-kitab klasik Islam sebagai acuan untuk menjawab permasalahan sosial, dalam konteks perburuhan juga menggunakan argumentasi normatif keagamaan untuk menunjukkan apresiasinya terhadap permasalahan perburuhan. Ada dua hadist Rasullallah Muhammad S.A.W. yang berkaitan dengan masalah perburuhan. Hadist pertama berbunyi: “Bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering”. Sementara hadist kedua berbunyi: “barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka beritahukan berapa upah yang diperoleh oleh si buruh (ajiir)”. Kontrak kerja tersebut sekarang dikenal dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).<sup>52</sup>

Apresiasi atau bentuk kepedulian NU terhadap perburuhan dan ketenagakerjaan di Jember juga membuat lahirnya serikat buruh besar di Jember yaitu Sarbumusi. Pernyataan ini datang tidak serta merta tanpa alasan, bukan juga datang dari tubuh Sarbumusi saja, melainkan dari seberapa besar kontribusi Sarbumusi selama ini dalam mengawal gerakan para buruh, dalam memberi perlindungan kepada para buruh dalam konfliknya dengan perusahaan, hingga para penegak hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.

Kelahiran serikat buruh di sebuah daerah atau didalam perusahaan sangat erat kaitannya dengan terjadinya konflik antara buruh dengan pihak perusahaan.

---

<sup>52</sup> Eka Fitri Rohmawati, dkk. *Sejarah Gerakan Sarbumusi*. (Jakarta: DPP KONFEDERASI SARBUMUSI. 2016), hlm. 17

Baik buruh yang merasa hak nya tidak terpenuhi selaku tenaga kerja, ataupun ada kebijakan pemerintah atau perusahaan yang sama sekali tidak berpihak pada kesejahteraan buruh yang itu menyebabkan buruh harus melakukan pemberontakan untuk menyampaikan aspirasi mereka dan menuntut keadilan demi kehidupan sejahtera yang selama ini mereka inginkan.

Koperasi Pegawai Telkom (Kopeptel) di tahun 1998 merupakan salah satu anak perusahaan dari Telkom selaku induknya. Pihak Kopeptel sendiri memiliki satu bentuk ikatan kerja dengan para tenaga kerjanya yaitu Tenaga Lepas Harian (TLH) yang merupakan buruh dengan hitungan bayaran kerja harian, tidak terikat kontrak ataupun penetapan sebagai pegawai, dan juga tidak memiliki jaminan social apapun demi menjamin keselamatan mereka saat bekerja. Saat itu, Sebagian besar pegawai TLH Kopeptel Jember adalah mereka-mereka yang berada di bagian lapangan, yaitu divisi instalasi jaringan telepon.

Pada tahun 1999 UMR Kabupaten Jember hanya sebesar 170.500 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 27.500 rupiah dari tahun sebelumnya. Setelah itu pada tahun 2000 naik menjadi 214.500 rupiah dan naik lagi di tahun 2001 menjadi 220.000 rupiah. Upah dengan nilai yang cukup besar pada tahun 1999 sampai 2001<sup>53</sup>, namun dengan tidak adanya jaminan keselamatan dan jaminan Kesehatan, para pekerja lapangan yang notabene berada paling dekat dengan bahaya dan resiko kerja lapangan merasa upah segitu sangatlah kurang bagi mereka.<sup>54</sup> Sebagai seorang tenaga kerja atau buruh yang merasa juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi dan menuntut kesejahteraannya sebagai buruh, akhirnya sekitar 100 orang TLH Kopeptel saat itu secara bertahap dan bergantian menyampaikan keluhan kesahnya pada pihak Kopeptel.

Kopeptel saat itu memiliki 3 manager sesuai divisi mereka masing-masing, yaitu bagian keuangan, operasional dan usaha. Para pegawai TLH yang berupaya menyampaikan aspirasi mereka saat itu menyampaikan kepada

---

<sup>53</sup> Output Tabel Dinamis "Upah Minimum Regional/Propinsi", "Regional/Province Minimum Wages" Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Kementrian Ketenagakerjaan. Surabaya, Jawa Timur, 2020.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Wahyu Adi, Wakil Ketua I DPC Sarbumusi Jember. Jumat, 9 Oktober 2020. Pukul 19.30 WIB.

manager usaha, yang saat itu dijabat oleh Iswinarso. Iklim nepotisme yang masih sangat kuat di tahun tahun terjadinya konflik ini, menjadikan Kopegtel juga terisi dengan banyak pegawai dengan ikatan keluarga tertentu. Iswinarso yang saat itu merasa dekat dengan banyak pegawai TLH, berusaha menampung dan meredam gejolak yang terjadi di antara pegawai TLH. Usaha Iswinarso pun adalah dengan menyampaikan dan turut menuntut pihak Telkom untuk merespon dan menuruti tuntutan para pegawai TLH. Namun yang terjadi adalah Iswinarso mendapatkan penolakan akan tuntutan yang diajukan atas pemberian hak menjadi pegawai tetap Telkom dan pemberian jaminan social kepada para pegawai TLH.

Dari situ jiwa perjuangan dan patriotism Iswinarso muncul, dengan mengusung sebuah pergerakan yang di isi oleh para pegawai TLH Kopegtel, mengadakan gerakan demonstrasi di tahun 1998 menuju Telkom Jember. Gerakan ini lalu dilihat dan direspon oleh banyak pihak, seperti beberapa fraksi partai dan lembaga ketenagakerjaan LP2TKI. Beberapa fraksi partai yang melihat bahwa di tahun-tahun dimana pergerakan buruh sedang sangat minim sekali, ternyata ada aktifis pergerakan buruh yang berani muncul untuk memperjuangkan aspirasi mereka, dengan dipimpin oleh Iswinarso saat itu. Dimulai dari PAN, PDI-P, PKB, Partai TNI POLRI memberi apresiasi kepada Iswinarso dk katas keberanian memperjuangkan hak buruh, dan bentuk dukungan lainnya adalah dengan dipanggilnya pihak Disnaker dan Telkom Jember oleh DPRD Komisi C yang saat itu dipimpin oleh Partai PKB dengan ketuanya saat itu H.M. Madini Faruk. Panggilan ini bertujuan untuk memerintahkan pihak Disnaker dan Telkom agar segera menyudahi terjadinya pergolakan di dalam Kopegtel, dan agar pihak Telkom segera menyetujui tuntutan dari Iswinarso dkk. Bentuk lain dukungan fraksi partai yang sangat membantu Iswinarso dkk datang dari PKB, yang secara materi juga turut membantu perjalanan kaum buruh dalam mengadakan pergerakan<sup>55</sup>. Sambutan-sambutan ini sudah terbaca oleh Iswinarso sebelumnya, dimana dalam beberapa tahun terakhir pergerakan buruh belum kembali muncul semenjak lengsernya

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Iswinarso mantan ketua DPC Sarbumusi Jember. Jumat, 4 Oktober 2020. Pukul 17.04 WIB

rezim Pemerintah Presiden Soeharto, lalu Iswinarso muncul membawa para pegawai Kopegtel yang menuntut hak buruh mereka. Hal ini akan menarik mata banyak fraksi partai untuk merangkul dan menarik masa pergerakan Kopegtel menjadi bagian dari partai mereka, guna mencari perhatian dan tambahan suara bagi partai mereka. Namun yang secara nyata memberikan bantuan bahkan dalam bentuk materi dan sokongan lain adalah dari fraksi PKB.

Aksi Iswinarso dkk tidak berhenti di Telkom Jember, dengan tanggapan bahwa Cuma Telkom pusatlah yang punya hak untuk merubah status kerja pegawai TLH dan bisa memberi jaminan social kepada pegawai TLH sesuai permintaan mereka, menjadikan arus pergerakan tidak terbandung dan melaju menuju Telkom pusat di Jakarta. Dalam perjalanannya Iswinarso dkk mengajukan tuntutan ke Telkom pusat, Iswinarso singgah di beberapa tempat yang juga merupakan Kopegtel cabang daerah lain, seperti di Surabaya saat itu, guna mencari perhatian Kopegtel daerah lain dan dukungan dari pihak lain. Iswinarso dkk yang dalam perjalanannya juga mendapat kawalan dari NU dan LP2TKI saat itu. Sesampainya di Jakarta Iswinarso dkk telah menyampaikan kedua tuntutan ke pihak Telkom pusat secara langsung dan mendapatkan respon sebuah persetujuan atas kedua tuntutan mereka. Hingga di tahun 2001 puncak keberhasilan Iswinarso dkk telah dicapai, dengan keluarnya putusan akhir Dirut Telkom Jakarta yang memutuskan bahwa pengangkatan karyawan lepas harian menjadi karyawan tetap diserahkan kembali pada pihak Koperasi Pegawai Telekomunikasi beserta persetujuan diberikannya jaminan sosial bagi pegawai.

Iswinarso saat itu selaku pimpinan pergerakan akhirnya mendapat teguran keras dari pihak Telkom pusat selaku pemimpin jalannya pergerakan, dengan diturunkan jabatannya dari Manager bagian usaha Kopegtel menjadi staff wartel di daerah Kencong di tahun 2000 – 2001. Kebijakan ini terpaksa dilakukan karena melihat Iswinarso yang sangat berani dan vokal dalam memimpin adanya pemberontakan dan mengajukan tuntutan ke pihak Telkom pusat, yang dimana pergerakan para pegawai TLH Kopegtel Jember tadi merupakan pertama kalinya terjadi dan menjadi contoh sebuah keberhasilan

gerakan menuntut hak buruh kepada pihak Telkom. Dari saat itu akhirnya banyak Kopegtel daerah lain se Indonesia turut mengajukan tuntutan yang sama mengenai pengangkatan status pegawai TLH menjadi pegawai tetap dan pemberian jaminan sosial, meskipun tidak semua dari tuntutan itu yang berhasil terpenuhi sepenuhnya.

Melihat keberhasilan Iswinarso di tahun 2000 dalam memperjuangkan aspirasi dan hak buruh Kopegtel, ketua PKB H.M Madini Faruk saat itu Bersama Kholili ketua LP2TKI memberikan tawaran kepada Iswinarso agar melegalkan bentuk pergerakan mereka menjadi sebuah serikat buruh, karena dengan begitu suara dan tuntutan mereka akan lebih didengar dan diperhatikan mengingat bentuk serikat buruh merupakan lembaga formal yang berlandaskan hukum dan undang-undang. Madini Faruk menawarkan serikat buruh Sarbumusi, agar menjadi bentuk serikat buruh mereka, mengingat Sarbumusi memang baru saja bangkit kembali setelah tidur panjangnya di masa Pemerintah Presiden Soeharto. Iswinarso yang tertarik dengan tawaran Madini Faruk lalu mengiyakan tawaran tersebut, guna memperkuat jalannya pergerakan dan menjadi lebih kuat lagi Bersama dengan serikat buruh.

Akhirnya lahirlah DPC Sarbumusi Jember, pada tanggal 15 Juni 2001<sup>56</sup>. Dengan diketuai oleh Kholili yang saat itu juga menjabat sebagai ketua Lembaga Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP2TKI) karena dirasa telah memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih untuk sementara membawa Sarbumusi DPC Jember yang baru lahir. Sedangkan Iswinarso menjadi sekretaris DPC Sarbumusi Jember. Di awal berdirinya Sarbumusi Jember, dari 100 mantan pegawai TLH Kopegtel yang telah menjadi pegawai tetap, 75 di antaranya masuk menjadi anggota basis Sarbumusi di Kopegtel Jember. Setelah itu di masa kepemimpinan Kholili, DPC Sarbumusi Jember mampu memperluas pengaruhnya dengan melahirkan 5 basis baru dengan total jumlah anggota sebanyak 594 orang. Jumlah ini terus berkembang hingga akhir masa jabatannya, mencapai total 27 basis dengan jumlah anggota 3.023 orang.

---

<sup>56</sup> Tanda Bukti Pencatatan. Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Tenaga Kerja. No. 031/VI/DPC JR/01 Tanggal 15 Juni 2001. Jember, 29 Juni 2001

Secara tidak langsung pembentukan DPC Sarbumusi Jember dari sebuah kumpulan buruh Kopegtel adalah untuk memfasilitasi Iswinarso dkk dalam mengadakan pergerakan di dalam sebuah lembaga atau organisasi legal berlandaskan hukum. Dengan dasar jiwa pemberontak dan berani berjuang demi kepentingan orang banyak, Iswinarso berdiri sebagai Sarbumusi. Atas dasar tekanya itulah Iswinarso menjadi dekat dengan anggota lainnya di dalam Sarbumusi, menjadi cukup disegani dengan keberaniannya memimpin jalannya pergerakan. Anggota lain di dalam tubuh DPC Sarbumusi Jember merasa Sarbumusi di bawah Kepemimpinan Kholili kurang terlihat gejolaknya dalam membawa buruh memperjuangkan aspirasi mereka, ini juga tercermin dari kiprahnya semasa menjabat ketua LP2TKI yang tidak dengan merata dan sangat dekat dalam mengawal dan memberi perlindungan kepada buruh di dalam perusahaan. Berbeda dengan Iswinarso yang pada dasarnya tergabung menjadi buruh, dan bergerak Bersama buruh untuk memperjuangkan hak dan memberi perlindungan kepada kepentingan para buruh sedari awal. Permasalahan ini menjadi perbincangan lama di masa kepemimpinan Kholili, hingga di masa akhir jabatannya terjadi suatu konflik kecil di dalam tubuh DPC Sarbumusi Jember antara Kholili dengan Iswinarso mengenai kursi jabatan ketua. Permasalahan ini berangkat dari rasa tidak puas anggota terhadap kinerja Kholili selaku ketua dan merasa Iswinarso yang selama ini berada di garda depan di setiap pergerakan Sarbumusi terasa lebih pantas menduduki kursi jabatan ketua.

Akhirnya di tahun 2004, di akhir masa kepemimpinan Kholili yang sesuai tercatat pada Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Sarbumusi Pasal 14 Ayat 1 yang mengatur masa jabatan ketua hanya selama 3 tahun.<sup>57</sup> Atas dasar itu maka diadakanlah Konferensi Cabang Luar Biasa yang dipimpin oleh Gordon Harahap sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Wilayah Sarbumusi Jawa Timur dengan dihadiri oleh seluruh anggota DPC Sarbumusi Jember. Konfercab ini merupakan forum resmi pemilihan ketua baru yang telah diatur oleh AD ART Sarbumusi, dengan syarat harus dihadiri oleh semua anggota untuk

---

<sup>57</sup> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Sarbumusi. Sarbumusi . Jakarta, Desember 2000. Hal. 55 Pasal 14 Ayat 1.

berlangsungnya pemilihan ketua baru. Hasil dari konfercab ini adalah terpilihnya Iswinarso sebagai ketua baru Sarbumusi Jember secara aklamasi.

Sesuai harapan tiap anggota saat itu, DPC Sarbumusi Jember di bawah kepemimpinan Iswinarso mampu berkembang pesat hingga memiliki 55 basis di 55 perusahaan yang ada di Jember. Dengan masa kepemimpinan selama 2 periode yaitu dari tahun 2004-2007 dan 2007-2010. Lalu digantikan oleh Umar Faruk selaku Ketua Advokasi DPC Sarbumusi Jember pada tahun 2010-2015. Saat kepemimpinan Umar Faruk, terjadi perubahan pada AD ART Sarbumusi pada masa jabatan ketua, yaitu dari 3 tahun menjadi 5 tahun. Lalu di periode keduanya Umar Faruk menjabat lagi dari tahun 2016-2021.

#### a. Mekanisme Keorganisasian DPC Sarbumusi Jember

Organisasi merupakan upaya penyatuan beberapa karakter dalam suatu wadah sehingga dapat bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. Setiap anggota dalam sebuah organisasi diharapkan dapat menjalankan tugas masing-masing dalam mengembangkan organisasi dan menyebarkan citra organisasi tersebut ke masyarakat. Agar setiap komponen yang ada dalam organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun mekanisme kerja organisasi yang dijadikan pegangan bagi pengurus dalam melaksanakan usaha dan aktivitas sebuah organisasi. Mekanisme kerja dalam sebuah organisasi merupakan suatu aturan yang memuat pola kerja dan tata tertib organisasi bagi pengurus dalam melaksanakan dan menjalankan kinerja organisasi yang sesuai dengan Peraturan Dasar. Peraturan Rumah Tangga. Mekanisme kerja sebuah organisasi dimaksudkan sebagai aturan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi agar jalannya organisasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyimpangan tugas dan pekerjaan.

Sarbumusi sendiri memiliki susunan organisasi nasional yang disusun secara vertical, yaitu terdiri dari tingkat nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP K-Sarbumusi), tingkat propinsi yang meliputi wilayah propinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW K-Sarbumusi) dan tingkat kabupaten/kota

meliputi wilayah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC K-Sarbumusi). Dewan Pimpinan Cabang merupakan pelaksana organisasi yang bersifat kolektif. DPC merupakan badan otonom dari Pengurus Cabang NU di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dewan Pimpinan Cabang juga berwenang mengkoordinasi secara administratif seluruh federasi yang berada di tingkat kabupaten/kota. DPC juga berhak menentukan/melaksanakan kebijaksanaan organisasi K-Sarbumusi di tingkat cabang sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional maupun wilayah serta peraturan organisasi lainnya. Serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang NU di wilayah tersebut.<sup>58</sup> Dewan Pimpinan Cabang memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Konfederasi Cabang K-Sarbumusi, melaksanakan segala ketentuan kebijaksanaan dengan PD PRT, Keputusan Kongres dan Rapat Tingkat Nasional ataupun wilayah serta peraturan organisasi lainnya.<sup>59</sup>

Masa kepengurusan DPC Sarbumusi sesuai khidmat kepengurusan di Konfederasi Sarbumusi adalah 5 tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali. Pembentukan Dewan Pimpinan Cabang harus memenuhi beberapa syarat agar bisa dibentuk, yaitu bisa dibentuk di daerah tingkat I atau tingkat Kabupaten/Kotamadya atas dasar potensi sectoral gerakan buruh berjuang sekurang-kurangnya 5 sektor industrial dan harus mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus DPW, tembusan kepada DPP. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 5 orang terdiri dari; ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang internal dan wakil ketua bidang eksternal. Pembentukan basis sebagai syarat pembentukan cabang juga memiliki syarat, yaitu minimal terisi oleh 10 orang anggota, dengan jajaran pengurus basis minimal dua orang terdiri dari ketua dan sekretaris.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga. *BAB. VII Susunan Organisasi, Kepengurusan, Wewenang dan Kewajiban Pengurus, Pasal 21.* (DPC Sarbumusi Jember. Jember, 2015), hlm. 21

<sup>59</sup> . *Ibid.*, hlm. 22



DPC Sarbumusi sebagai sebuah organisasi serikat buruh, juga memiliki mekanismenya sendiri untuk mengatur seluruh jajarannya dalam prosesnya mencapai tujuan sebagai serikat buruh. Berikut adalah penjabaran dari mekanisme keorganisasian Sarbumusi dalam bentuk tugas pokok, fungsi dan program kerja pengurus harian dan divisi-divisinya :

- 1) Dewan Pelindung adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jember.<sup>61</sup>
- 2) Dewan Penasehat
  - a) Dewan penasehat merupakan badan pertimbangan yang berhak memberikan pertimbangan, saran, nasehat diminta maupun tidak, dilakukan baik secara perorangan maupun kolektif.
  - b) Dewan penasehat dalam melaksanakan fungsinya tidak melakukan kegiatan operasional, melainkan kegiatan dalam bentuk konsultasi dan sumbang saran.
  - c) Peran aktif Dewan penasehat bersifat fungsional.
  - d) Dewan penasehat berwenang melakukan fungsi arbitase (pendamai) terhadap Dewan Pimpinan Cabang berkaitan dengan hal prinsip, terutama untuk menjaga kemurnian dan konsistensi garis perjuangan Sarbumusi.
- 3) Dewan Pembina
  - a) Dewan Pembina terdiri dari mantan pimpinan Sarbumusi dan tokoh-tokoh dilingkupi Nahdlatul Ulama yang dipandang sesuai dengan kapabilitas dan loyalitas kepada organisasi Sarbumusi dan Nahdlatul Ulama.
  - b) Dewan Pembina menjadi mediator untuk pengembangan organisasi, antara Dewan Pengurus Cabang, pihak eksekutif dan legislative serta dengan tokoh Nahdlatul Ulama.
  - c) Dewan Pembina berhak memberikan pembinaan, tehnik maupun strategi organisasi, baik hukum ketenagakerjaan maupun hukum pidana dan

---

<sup>60</sup> Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) dan Program Kerja. Pengurus Harian dan Divisi-Divisi DPC SARBUMUSI JEMBER. (DPC Sarbumusi Jember. 2015), hlm. 34

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 1

perdata untuk kemajuan organisasi.

- d) Dewan Pembina berhak memberikan pembinaan terhadap mental dan spiritual, diminta atau tidak, dilakukan secara kolektif maupun perorangan.
  - e) Mendampingi pimpinan cabang atau pengurus harian DPC Sarbumusi dalam hubungan dengan pihak eksternal.<sup>62</sup>
- 4) Pengurus Harian
- a) Pengurus harian sebagai penentu kebijakan sekaligus pelaksana tugas harian, berkewajiban memimpin dan mengendalikan jalannya roda organisasi dan hasil konferensi cabang.
  - b) Pengurus harian berfungsi merumuskan kebijakan operasional program, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk bidang advokasi yang merupakan ciri atau karakter organisasi disamping aspek sosial.
  - c) Pengurus harian sesuai dengan kedudukan dalam menjalankan tugasnya bersifat koordinatif dan membawah bidang-bidang atau divisi-divisi yang pembagiannya ditetapkan dalam tata kerja Dewan Pimpinan Cabang.
  - d) Pengurus harian dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat kolektif.<sup>63</sup>

Setiap jajaran pengurus harian DPC Sarbumusi Jember memiliki tugas pokok, fungsi serta wewenang sendiri, yaitu : Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II. Berikut adalah tugas pokok, fungsi serta wewenang setiap jajaran pengurus harian DPC Sarbumusi :

- 1) Ketua
  - a) Menentukan dan memegang kebijakan umum organisasi.
  - b) Memiliki wewenang dan mengatasnamakan Pimpinan Cabang

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 3

menyangkut kebijaksanaan organisasi, koordinasi dan konsultasi.

- c) Memimpin dan mengendalikan serta mengkoordinasikan setiap pelaksanaan kebijakan organisasi.
- d) Memimpin rapat pengurus harian dan rapat pleno DPC Sarbumusi Jember.
- e) Bersama sekretaris menandatangani semua surat keputusan dan surat-surat lainnya.
- f) Selaku mandataris konferensi, bertanggung jawab melaksanakan amanat konferensi dan mempertanggungjawabkan dihadapan konferensi.
- g) Mengesahkan dan melantik pengurus basis Sarbumusi melalui SK DPC Sarbumusi Jember, setelah mendapat bukti pencatatan basis dari instansi terkait (Disnakertrans) Jember.
- h) Melaporkan kegiatan dan program kerja DPC Sarbumusi Jember setiap 6 bulan sekali ke DPP Sarbumusi dengan tembusan DPW Sarbumusi Jawa Timur.<sup>64</sup>

## 2) Wakil Ketua I, II dan III

- a) Wakil ketua I membidangi Divisi Pemberdayaan Ekonomi
- b) Wakil bidang II membidangi Divisi Advokasi dan Hukum
- c) Wakil bidang III membidangi Divisi Organisasi dan Kaderisasi
- d) Bertugas membantu tugas-tugas ketua
- e) Mewakili tugas dan kedudukan ketua jika ketua berhalangan
- f) Mengkoordinasikan kegiatan pengurus harian dan divisi-divisi yang dibidangnya sesuai mekanisme dan pedoman tata kerja DPC Sarbumusi Jember.
- g) Bertugas kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang organisasi atau divisi yang dibidangi dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.
- h) Melakukan pembinaan pada basis Sarbumusi
- i) Wakil ketua I, II dan III bertanggung jawab kepada ketua<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 4

- 3) Sekretaris, Sekretaris I dan Sekretaris II
  - a) Sekretaris membidangi Divisi Humas
  - b) Sekretaris I dan Sekretaris II membantu secara teknis terhadap divisi yang dibidangnya (divisi humas)
  - c) Membantu ketua dan wakil-wakil ketua dalam mengendalikan dan melaksanakan kegiatan organisasi.
  - d) Bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kesekretariatan dan pengawasan inventaris Dewan Pimpinan Cabang
  - e) Membantu ketua dalam mengendalikan serta mengkoordinasikan kegiatan wakil-wakil ketua.
  - f) Bersama wakil-wakil ketua, bendahara dan wakil bendahara mengusahakan dan melengkapi perangkat yang dibutuhkan organisasi.
  - g) Bersama ketua, mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas diantara wakil-wakil ketua.
  - h) Bersama wakil ketua membuat rancangan rumusan peraturan dan keputusan organisasi.
  - i) Bersama ketua menandatangani surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya.
  - j) Melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan (surat menyurat, arsip dan buku anggota)
  - k) Melaksanakan fungsi-fungsi kehumasan baik secara internal maupun eksternal.
  - l) Melakukan pembinaan pada basis Sarbumusi.
  - m) Sekretaris, sekretaris I dan II bertanggung jawab kepada ketua.<sup>66</sup>
- 4) Bendahara, Bendahara I dan Bendahara II
  - a) Bertugas mengatur dan mencatat penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang dan surat-surat berharga lainnya serta semua inventaris milik organisasi.
  - b) Bertugas melaporkan posisi keuangan secara berkala.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 5

- c) Mengatur dan mengkoordinasikan pembagian tugas diantara wakil-wakil bendahara.
  - d) Bertugas dan berwenang melakukan kebijakan penggalan dana dan pengalokasikannya bersama ketua dan sekretaris.
  - e) Bersama sekretaris, wakil ketua, coordinator divisi Menyusun anggaran biaya kegiatan organisasi.
  - f) Bertanggung jawab kepada ketua.
- 5) Divisi Humas
- a) Mengadakan dan mengelola media informasi organisasi Sarbumusi
  - b) Mendokumentasikan even-even dan momentum organisasi
  - c) Melakukan *professional public relation*
  - d) Membangun jaringan informasi dengan elemen-elemen kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan pemerintah untuk kepentingan organisasi.
  - e) Memberikan informasi dan pelayanan yang baik, jelas dan benar kepada calon basis Sarbumusi / anggota baru sesuai mekanisme yang telah diatur PR/PRT organisasi.
  - f) Melaporkan semua kegiatan kehumasan ke sekretaris secara rutin dan berkala.
  - g) Memberikan informasi segala kegiatan organisasi bersifat internal ke basis dan anggota Sarbumusi secara menyeluruh.
  - h) Menginventarisasi segala perlengkapan dan kelengkapan organisasi
  - i) Mengagendakan rencana pertemuan baik ditingkat basis maupun DPC Sarbumusi.
  - j) Menyampaikan / mengatur surat menyurat baik secara internal maupun eksternal.
  - k) Memberikan masukan-masukan terkini tentang informasi yang terjadi baik secara umum maupun khusus untuk kepentingan organisasi.
  - l) Melakukan pembinaan pada Basis Sarbumusi.
  - m) Coordinator Divisi Humas bertanggungjawab kepada Sekretaris DPC

Sarbumusi Jember.<sup>67</sup>

- 6) Divisi Pemberdayaan Ekonomi
  - a) Merintis dan mengelola unit atau badan usaha milik organisasi
  - b) Melakukan koordinasi dengan pemerintah atau instansi terkait untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi.
  - c) Mengadakan proyek-proyek rintisan pengembangan anggota yang berorientasi kewirausahaan.
  - d) Mengadakan kajian-kajian atau penelitian terhadap potensi basis atau anggota Sarbumusi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi.
  - e) Mengikuti pelsatihan-pelatihan atau *work shop* baik yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain, segala bidang usaha maupun jasa untuk kepentingan kesejahteraan anggota Sarbumusi dan keluarganya.
  - f) Mengajukan proposal program kegiatan pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat melalui atau mengetahui DPC Sarbumusi Jember.
  - g) Memberikan masukan-masukan, ide atauoun kegiatan yang berkenan dengan program pemberdayaan ekonomi untuk kemajuan organisasi.
  - h) Melakukan pembinaan pada basis Sarbumusi
  - i) Koordinator Divisi Pemberdayaan Ekonomi melaporkan segala kegiatan dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua I DPC Sarbumusi Jember.<sup>68</sup>
- 7) Divis Advokasi dan Hukum
  - a) Melakukan pendampingan dan pembelaan pada anggota berkaitan dengan permasalahan ketenagakerjaan baik ditingkat perusahaan, Disnakertrans dan pihak-pihak terkait lainnya.
  - b) Memberikan penyuluhan dan konsultasi dibidang hukum ketenagakerjaan dan hukum-hukum lain yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada anggota.
  - c) Merumuskan kajian-kajian advokasi atau pembelaan anggota dibidang

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 7

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 8

ketenagakerjaan

- d) Berpartisipasi dan berperan aktif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik ditingkat local, regional maupun nasional.
  - e) Berperan aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar tentang hukum khususnya ketenagakerjaan
  - f) Mengadakan kajian-kajian dan penelitian pada potensi basis atau anggota Sarbumusi dibidang hukum
  - g) Melaporkan segala kegiatan bidang advokasi dan hukum secara rutin dan terjadwal.
  - h) Point a,b,c,d,e,f dilaksanakan dengan dasar surat tugas/ mandate dari ketua DPC Sarbumusi Jember
  - i) Melakukan pembinaan pada basis Sarbumusi
  - j) Coordinator Divisi Advokasi dan hukum bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II DPC Sarbumusi Jember.<sup>69</sup>
- 8) Divisi Organisasi dan Kaderasi
- a) Menyusun modul-modul pelatihan dan kaderisasi anggota
  - b) Perumusan konsep-konsep dan turan-aturan organisasi sebagai penjabaran dari PR/PRT Sarbumusi, serta sesuai dengan tuntutan perkembangan organisasi.
  - c) Penyusunan rancangan mekanisme kerja pengurus bidang organisasi.
  - d) Pendataan data potensi basis organisasi.
  - e) Penyusunan rancangan berbagai ketentuan organisasi administrasi, atribut dan lain-lain untuk disosialisasikan ditingkat basis.
  - f) Mendokumentasikan even-even dan momentum organisasi.
  - g) Melakukan kajian dan penelitian potensi basis beserta anggota dari sisi kader, kelembagaan, sarana-prasarana dan lain-lain.
  - h) Melakukan kajian dan penelitian persoalan-persoalan politik, sosial dan ekonomi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung pada organisasi.
  - i) Mengadakan Pendidikan dan Latihan dasar (Diklatsar) Sarbumusi

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 9

- j) Melakukan pembinaan pada basis Sarbumusi
  - k) Coordinator Divisi Organisasi dan Kaderisasi melaporkan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Wakil Ketua III DPC Sarbumusi.
- 9) Bidang Keamanan (*BLACK FORCE* / SATGAS Sarbumusi)
- a) Melakukan Tindakan pencegahan pengamanan pada saat even atau momentum organisasi.
  - b) Melakukan Tindakan pengamanan yang diperlukan demi keutuhan organisasi sesuai intruksi dari pimpinan cabang.
  - c) Deteksi dini atas kemungkinan terjadinya dis-harmonisasi organisasi yang didasarkan data dan fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - d) Melakukan pelatihan-pelatihan khusus baik secara jasmani maupun rohani kepada anggota untuk kepentingan organisasi.
  - e) Melaksanakan fungsi pengamanan pada pengurus DPC Sarbumusi dan anggota Sarbumusi dalam melaksanakan kegiatan atau tugas organisasi.
  - f) Komandan dan Wakil Komandan *Black Force* / Satgas Sarbumusi bertanggungjawab langsung kepada Ketua DPC Sarbumusi Jember.<sup>70</sup>

10) Susunan Pengurus DPC Sarbumusi Jember Periode 2016-2021

Dewan Pelindung : Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  
Kabupaten Jember

Dewan Penasehat

- 1. KH. Muhyidin Abdushomad
- 2. KH. Abdullah Samsul Arifin
- 3. KH. Hamid Hasbullah

Dewan Pembina

- 1. HM. Iswinarso, S.E.
- 2. Aries Harianto, S.H., M.H.

Pengurus Harian :

1. Ketua : Umar Faruk  
Wakil Ketua I : Ir. Wahyu Adi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 10



- Wakil Ketua II : Bambang Hariadi  
Wakil Ketua III : Abdul Khozi, S.T.  
2. Sekretaris : Rofian Prasetya Januardani  
Sekretaris I : Hanadi  
Seretaris II : Darmanto  
3. Bendahara : Dra. Hj. Mercurian Hermawati  
Bendahara I : Eko Yulianto  
Bendahara II : Juni Adi

#### Divisi-divisi

##### 1. Divisi Humas

- Koordinator : Budi Hariyanto  
Anggota : Budi Utomo  
: Tohari  
: Tatang  
: Gatot  
: Putut

##### 2. Divisi Pemberdayaan Ekonomi

- Koordinator : Suhartono  
Anggota : Misadi  
: Slamet Winarno  
: Latifa  
: Sri Fatmawati

##### 3. Divisi Advokasi dan Hukum

- Koordinator : Mansur Syakrowi  
Anggota : Hartono  
: Darso  
: Manipolis  
: Ishaq  
: Gatot Subagyo

##### 4. Divisi Organisasi dan Kaderisasi

- Koordinator : Edi Sutrisno

Anggota : Darfandi  
: Arif Istanto  
: Hadi  
: Hariyanto  
: Didik

5. Black Force (SATGAS Sarbumusi)

Komandan : Suprayitno  
Wakil Komandan : Teko Wahyudi  
Anggota : Holik : Mas'ud  
: Sarito : Siswanto  
: Mulyanto : Surip  
: Abdullah : Juki  
: Sucipto : Solihun  
: Hambali : Wahyudi  
: Suwarno : Edi Yulianto  
: Zainul : Anang Supriadi  
: Mahrus : Sudiono  
: Misliadi : Saiman

## **BAB 4 PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kabupaten Jember sebagai kota yang terus menerus berkembang juga berupaya meningkatkan sektor industri untuk menunjang perekonomian rakyatnya. Langkah utam memancing minat investor asing ataupun domestic untuk menanamkan modalnya demi pelebaran wilayah sektor industry di Jember, adalah dengan cara menjaga stabilitas dan kondusifitas perburuhan dan ketenagakerjaan di Jember. Salah satu langkah efektif adalah dengan cara pembentukan serikat-serikat buruh guna mewedahi, mengawasi, melindungi serta mengedukasi buruh mengenai hak dan tanggung jawab ketenagakerjaan mereka selaku tenaga kerja. DPC Sarbumusi selaku serikat buruh tingkat kabupaten yang secara ideologi islamnya mampu lebih dekat dengan rakyat Indonesia merupakan serikat buruh yang tepat jika berdiri dan berkembang di Jember.

Munculnya gerakan kelompok buruh dari Kopegtel Jember yang menuntut pengakuan status kerja dan jaminan sosial yang dipimpin oleh Iswinarso menjadi pemicu ketertarikan banyak kalangan saat itu. Beberapa diantaranya berasal dari fraksi -fraksi partai yang menduduki kursi DPRD Jember. PDIP, PKB, Partai TNI dan POLRI. Bentuk ketertarikan mereka menghasilkan sebuah bantuan dalam banyak bentuk. Salah satu bantuan yang paling berarti saat itu adalah berasal dari PKB yang saat itu dipimpin oleh H.M. Madini Faruk yang juga menjadi ketua

Komisi C DPRD Jember. dengan memberi bantuan materi, turut mengancam pihak Telkom dan Disnaker agar segera menyelesaikan konfliknya dengan pekerja Kopectel serta berupaya membangun kekuatan baru dengan landasan hukum dan legalitas yang diakui oleh Negara, yaitu pembentukan serikat buruh. Karena itulah akhirnya DPC Sarbumusi dibentuk dengan diketui pertama kali oleh Kholili yang sebelumnya menjabat sebagai ketua LP2TKI. Iswinarso sebagai ketua pergerakan buruh Kopectel pun menjabat sebagai Sekretaris. Dengan dibentuknya tubuh DPC Sarbumusi untuk mewadahi gerakan buruh Kopectel, tuntutan yang di ajukan dan aspirasi yang di perjuangkan akan lebih didengar karena telah memiliki kekuatan hukum dan resmi berasal dari lembaga serikat buruh.

Periode awal Kholili memimpin berlangsung dari tahun 2001 hingga 2004. Pada periode awal kepemimpinannya, Kholili cukup kesulitan dalam mengembangkan DPC Sarbumusi, dikarenakan dunia serikat buruh yang baru saja bangkit dan Kholili yang selama memimpin LP2TKI hanya berkutat pada permasalahan tenaga kerja imigran Indonesia. Pada tahun 2001, DPC Sarbumusi hanya memiliki 5 basis. Perkembangan pada tahun selanjutnya mulai menampakkan buah hasil perjuangan, yaitu pada tahun 2003 dan 2004, DPC Sarbumusi berhasil membentuk 27 basis dengan total 3000 anggota. Perkembangan ini banyak terjadi karena Iswinarso yang menjabat sebagai sekretaris membawahi divisi humas, sangat gencar dan aktif dalam mengawal gerakan buruh. Hal ini yang lalu menjadikan Iswinarso terpilih menjadi ketua DPC Sarbumusi periode selanjutnya, pada tahun 2004-2007 dan lanjut ke periode keduanya yaitu 2007-2010.

Masa kepemimpinan Iswinarso membawa dampak besar pada perkembangan DPC Sarbumusi Jember. dengan membentuk 55 basis dan mampu memiliki lebih dari 4000 anggota, DPC Sarbumusi Jember mampu menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan buruh di Jember. Pengaruh dari eksistensi dan keberhasilan itu tadi yang menjadikan tumbuh kembang basis Sarbumusi di banyak perusahaan di Jember terus membaik. Prestasi Iswinarso menjadi salah satu perjuangan yang nantinya akan dilanjutkan oleh Umar Faruk

sebagai ketua selanjutnya pada periode pertamanya tahun 2010-2015 hingga periode keduanya pada tahun 2016 -2021.

Pada masa kepemimpinan Umar Faruk DPC Sarbumusi berkembang baik hingga memiliki 79 basis dengan total anggota lebih dari 7.500 orang. Selama berdirinya DPC Sarbumusi di Jember, Sarbumusi telah banyak membantu mengawal, melindungi, mengawasi dan memberi advokasi pada para buruh dalam hal permasalahan-permasalahan mereka dengan pengusaha hampir sebanyak 400 kasus. Diantara semua kasus itu tidak sedikit kasus besar terjadi, perihal upah yang tidak sesuai UU Ketenagakerjaan, PHK masal dengan tidak memberi pesangon kepada para buruh, pemberangusan basis Sarbumusi didalam perusahaan, pengakuan status kerja dan pemberian jaminan sosial. Tidak hanya itu kontribusi Sarbumusi pada dunia perburuhan di Jember. DPC Sarbumusi Jember juga memberikan edukasi kepada para buruh mengenai hak dan tanggung jawab mereka selaku tenaga kerja yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan agar buruh bisa bergerak kritis, aktif dan efektif dalam menyikapi kebijakan apapun yang dibuat oleh perusahaan atau adanya permasalahan apapun yang menyangkut nasib para buruh.

Segala kebijakan dan aktifitas yang dilakukan DPC Sarbumusi di Jember juga memberi dampak yang cukup besar tidak hanya pada anggota DPC Sarbumusi sendiri, melainkan juga kepada masyarakat secara umum dan juga pemerintah daerah. Salah satu dampaknya adalah masyarakat jadi memiliki satu bentuk kekuatan sosial baru dalam memperjuangkan keadilan ditengah kebijakan pemerintah yang sering kali merugikan mereka khususnya para buruh. Kekuatan Sarbumusi dalam menyampaikan aspirasi, kritik, saran dan tuntutan dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan para buruh didalam masyarakat seakan menjadi harapan baru bagi masyarakat secara umum.

Secara tidak langsung upaya yang dilakukan DPC Sarbumusi Jember akan meringankan kerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas ditengah dunia perburuhan dan tenaga kerja. Tujuan ini demi meningkatkan perekonomian masyarakat Jember dari sektor industry, dimana kondisi kondusif dan stabil dari para buruh akan membangun situasi aman dan harmonis dalam

hubungan mereka dengan perusahaan. Harapannya agar banyak pengusaha atau penanam modal asing maupun domestik mau turut membangun dan mengembangkan pabrik dan industry mereka di Jember. Dengan begitu akan bermunculan banyak lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan masyarakat Jember, meningkatkan pendapatan daerah sendiri dan mengangkat kemiskinan dari masyarakat Jember.

#### **4.2 Saran**

Menjadi serikat buruh di sebuah daerah yang dimana tidak banyak lagi serikat buruh yang turut berperan aktif dalam membantu memberi advokasi, pengawasan, perlindungan serta edukasi kepada kaum buruh, haruslah juga memikirkan langkah taktis dalam memberi pensadaran dan pemahaman lebih mengenai hak dan kewajiban seorang buruh sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku di negara ini. Tanpa harus mengandalkan pemerintah atau menunggu serikat lain berkembang, Sarbumusi sendiri harus bisa membangun pondasi yang bagus bagi keberlangsungan hidup buruh secara lebih mendasar.

Jika saat ini Sarbumusi sebagai obat atau perantara menuju obat itu sendiri dalam sebuah konflik, perselisihan ataupun permasalahan apapun yang dialami kaum buruh, maka Sarbumusi juga perlu menjadi semacam anti bodi atau vitamin yang bersifat mencegah terjadinya perselisihan dan meminimalisir munculnya konflik kembali dari kalangan buruh dengan pihak terkait manapun, khususnya pengusaha dan perusahaan.

Dengan menyiapkan strategi-strategi baru dalam membangun dan menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki yang tinggi agar terbangun etos kerja yang baik di kalangan para buruh sebagai tanggung jawab atau kewajiban mereka sebagai tenaga kerja, dan pemahaman serta kemampuan menganalisis dan membaca suatu permasalahan dengan cara cerdas dan bijak juga akan membangun sifat mawas diri, bisa membaca dimana terjadinya letak kesalahan, kecurangan ataupun ketidak sesuaian apapun yang disebabkan oleh pengusaha atau perusahaan lalu bisa menyikapinya secara baik dan tepat sasaran.

Dengan begitu kesadaran dan pemahaman akan meningkatkan kualitas SDM buruh secara mendasar, juga akan menghindarkan kaum buruh dari perselisihan, konflik ataupun permasalahan-permasalahan lain yang selama ini muncul di dalam arena perburuhan dan ketenagakerjaan bersama pengusaha dan perusahaan. Dengan begitu kinerja serikat buruh, Sarbumusi khususnya akan lebih efisien dan efektif serta bisa lebih menjangkau wilayah perburuhan yang lebih luas dan merata.



**DAFTAR PUSTAKA****Sumber Arsip**

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Sarbumusi. Sarbumusi. Jakarta, Desember 2000.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. *Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2001*. Surabaya: Kantor Sensus Dan Statistik Provinsi Jawa Timur. 2001.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. *Jember Dalam Angka Tahun 2001*. Jember: Badan Pusat Kabupaten Jember. 2001.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Jember Dalam Angka Tahun 2000*. Jember: Badan Pusat Kabupaten Jember. 2000.

Data Rekapitulasi Basis Sarbumusi Kabupaten Jember Periode Tahun 2001 S/D Januari 2018. DPC Sarbumusi Jember. Jember.

Output Tabel Dinamis "Upah Minimum Regional/Propinsi", "Regional/Province Minimum Wages" Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Kementrian Ketenagakerjaan. Surabaya, Jawa Timur, 2020.

Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga. Konfederasi Sarbumusi. Jakarta, Juli 2010.

Tanda Bukti Pencatatan. Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Tenaga Kerja. No. 031/VI/DPC JR/01 Tanggal 15 Juni 2001. Jember, 29 Juni 2001.

Tugas Pokok, Fungsi (TUPOKSI) dan Program Kerja. Pengurus Harian dan Divisi-Divisi DPC SARBUMUSI JEMBER. DPC Sarbumusi Jember. 2015.

Laporan Union Busting dan Kebebasan Berserikat. Nomor : 496 / DPP – KSBMI / I-A / VII / 2019. Jakarta, 15 Juli 2019.

Surat Keputusan. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SARBUMUSI KABUPATEN JEMBER – JAWA TIMUR Periode 2010 – 2015. Nomor: Kep.135/SK/DPP SARBUMUSI/XI/2010.

**Sumber Buku**

Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.



- Djumadi. *Sejarah Keberadaan Buruh Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Fealy, Greg (ed.), *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta, LKiS. Yogyakarta. 1997.
- Fitri, Eka Rohmawati et al., *Sejarah Gerakan Sarbumusi*. Jakarta: DPP KONGFEDERASI SARBUMUSI. 2016.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Hafidz, Vedi, R. *Gerakan Buruh dalam Sejarah Politik Indonesia*. Jakarta. Prisma, LP3ES. 1997.
- Hafidz, Vedi, R. *Buruh dalam Penataan Politik Awal Orde Baru*. Jakarta. Prisma, LP3ES, 1996.
- Ingleson, John. *BURUH, SERIKAT, DAN POLITIK : Indonesia Pada 1920an – 1930an*. Marjin Kiri, Jakarta Selatan, 2000.
- Izzah, Latifatul dan Hendro Sumartono. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2013.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 2003.
- Martoprasono, Soesanto. *Model Serikat Pekerja dalm Perspektif Sejarah*. MakalahLokakarya Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI). Malang : 2000.
- Nurhdi, Sasmita et al., *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember*. Bantul DIY: Lembah Manah. 2012.
- Ritzer, George dan Gouglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soyomukti, Nurani. *Teori-Teori Pendidikan Dari Tradisional, (Neo) Liberal, Marxis-Sosialis, Hingga Postmodern*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2015.
- Sukarno, *This is The FBSI, All Indonesian Labour Federation*. Jakarta: Prisma, 1992.

Trimurti, SK. *Hubungan Pergerakan Buruh Indonesia dengan Pergerakan Kemerdekaan Nasional*. Jakarta : Idayu, 1975.

Ugo, Pujiyo. *Hukum Acrah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

### **Sumber Jurnal, Skripsi dan Tesis**

Alfanny, “Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) 1955-1973”. *Skripsi*, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia. 2001.

Amalya Isa Yulianti, “Sejarah Perjuangan SARBUMUSI Terhadap Kaum Buruh Di Sidoarjo Tahun 2000-2014 M”, *Thesis*. Sejarah Dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Hery, Setyawan, dkk. *Strategi Perjuangan Serikat Buruh Dalam Tuntutan Kenaikan Upah di Kabupaten Jombang*. dalam *Paradigma*. Volume 05 Nomor 03 Tahun 2017.

Tongam Panggabean, “Gerakan Serikat Buruh DI Medan 1971-1990”, *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara, 2009.

### **Sumber Internet**

KBBI. [online] dalam [kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/Buruh](http://kbbi.kemendikbud.go.id/enteri/Buruh) diunduh pada tanggal 10 Mei 2020.

<https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-indonesia/>

### **Sumber Wawancara**

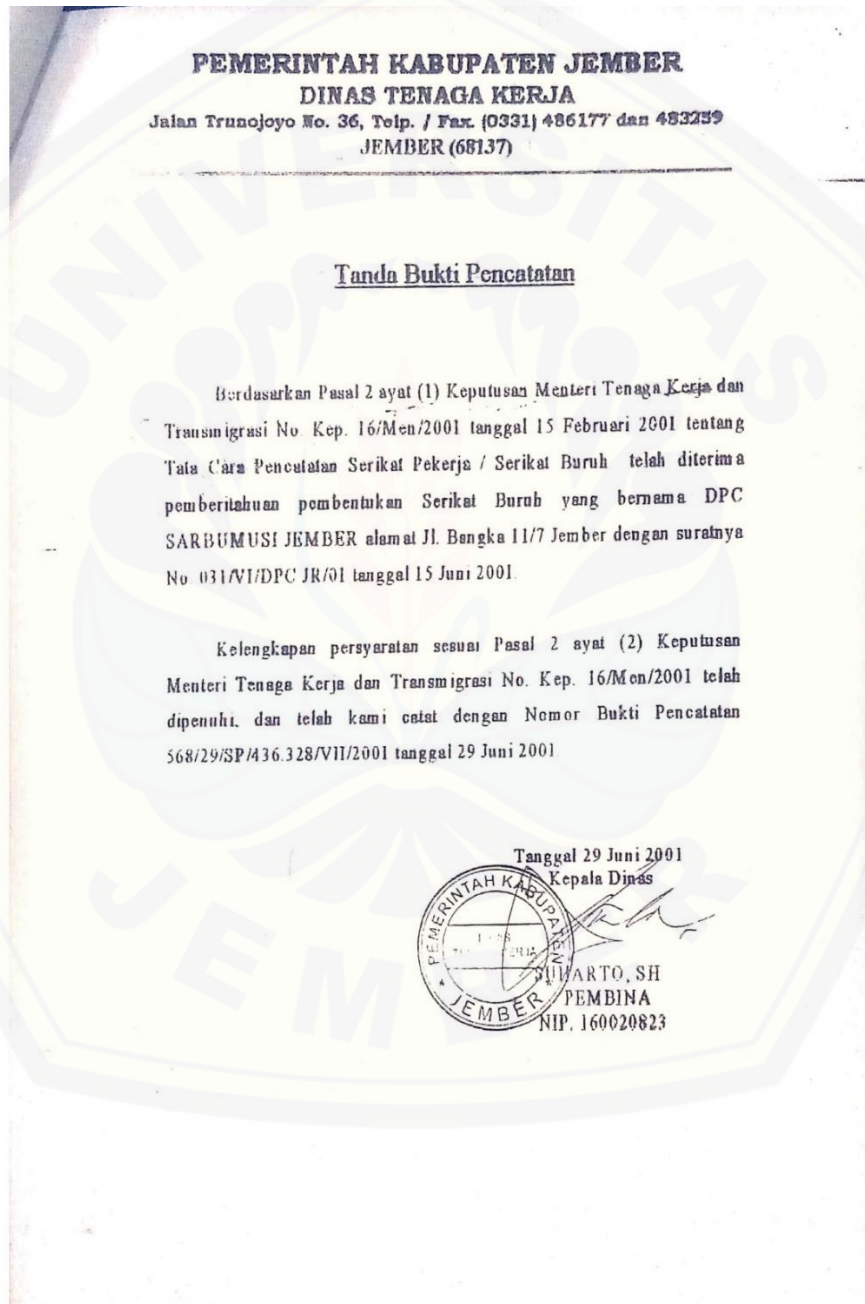
Iswinarso S.E., Jember, 22 Mei 2020

Umar Faruk, Jember, 31 Mei 2020

Wahyu Adi, Jember, 9 Juni 2020

Bambang Edi Santoso, Jember, 12 Oktober 2020

Bambang Hariadi, Jember, 22 Oktober 2020

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****Lampiran A****Tanda Bukti Pencatatan Berdirinya DPC Sarbumusi di Jember  
Pada Tahun 2001**

Sumber: Tanda Bukti Pencatatan. Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Tenaga Kerja. No.031/VI/DPC JR/01 Tanggal 15 Juni 2001. Jember, 29 Juni 2001.

## Lampiran B

**Surat Keputusan Susunan Pengurus DPC Sarbumusi Jember  
Periode 2010-2015**

DEWAN PIMPINAN PUSAT  
Sarikat Buruh Muslimin Indonesia  
FEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM TRADE UNIONS  
(SARBUMUSI)

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 164 Lantai III, Jakarta 10430  
Telp. (021) 323031, 3908424 Fax (021) 3908425 e-mail: sarbumusi@gnu.or.id

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : Kep.135/SK/DPP SARBUMUSI /XI/2010

Tentang  
SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) SARBUMUSI  
KABUPATEN JEMBER - JAWA TIMUR  
Periode 2010-2015

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dewan Pimpinan Pusat Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP SARBUMUSI), setelah :

Menimbang:

- a. Bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Cabang SARBUMUSI Kabupaten Jember Jawa Timur sebagai wahana pengembangan profesi yang dibentuk atas pengelompokan industri barang dan jasa, yang bersifat fungsional, demokratis dan bertanggung jawab.
- b. Bahwa demi kelancaran kegiatan SARBUMUSI, sebagai penunjang dan suksesnya program organisasi maka dipandang perlu membentuk DPC SARBUMUSI Kabupaten Jember Jawa Timur.
- c. Bahwa agar Dewan Pengurus Cabang SARBUMUSI Kabupaten Jember Jawa Timur dapat segera melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka dikeluarkan **Surat Keputusan**.

Mengingat:

1. Deklarasi kebangkitan dan berfungsinya kembali SARBUMUSI tanggal 26 Juni 1998.
2. Anggaran Dasar SARBUMUSI, Pasal 12.
3. Anggaran Rumah Tangga SARBUMUSI, Pasal 9.
4. Hasil Kongres IV SARBUMUSI tanggal 01-03 Agustus 2010

Memperhatikan:

1. Hasil Konferensi Cabang Sarbumusi Ke - III bertempat di Hotel Kebon Agung Jl. Arowana Gebang Kabupaten Jember Jawa Timur yang dihadiri oleh 16 Basis yang terdiri dari 20 Basis yang aktif, dilaksanakan di Kabupaten Jember Jawa Timur pada tanggal 17 Oktober 2010.
2. Berita Acara Konferensi Cabang Kabupaten Jember pada tanggal 17 Oktober 2010.



Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

Pertama :

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat SARBUMUSI (DPP SARBUMUSI) tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang SARBUMUSI, Kabupaten Jember, Jawa Timur periode 2010-2015.

Kedua :

Mengesahkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang SARBUMUSI Kabupaten Jember, Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan.

Ketiga :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 02 November 2015 dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 November 2010 M  
26 Dzulqoidah 1431 H

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA**  
**(DPP SARBUMUSI)**

*(Signature)*  
**(Drs. HM. Syaiful Bahri Anshori, MP)**  
Ketua/Umum



*(Signature)*  
**(Drs. HM. Yusuf Muijenih)**  
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. PBNU di Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.
2. PW NU Jawa Timur
3. DPW Sarbumusi Jawa Timur
4. PCNU Kab. Jember
5. Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember
6. —

Sumber: Surat Keputusan. Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SARBUMUSI KABUPATEN JEMBER – JAWA TIMUR Periode 2010 – 2015. Nomor: Kep.135/SK/DPP SARBUMUSI/XI/2010.

## Lampiran C

### Laporan Gugatan Union Busting dan Kebebasan Berserikat DPC Sarbumusi Pada Tahun 2019



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONFEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA  
CONFEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM TRADE UNIONS  
(K-SARBUMUSI)**

Alamat : J. Raden Saleh 1 No 7A, Jakarta 11431, email: [sarbumusi@yahoo.co.id](mailto:sarbumusi@yahoo.co.id)

Jakarta, 15 Juli 2019

Nomor : 496 /DPP-KSBMI/I-A/VII/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Union Busting dan Kebebasan Berserikat

Kepada Yth,

1. Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kapolri RI)
2. Bapak M. Hanif Dakiri (Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia)
3. Mrs. Michoko Miyamoto (Direktur ILO Kantor Jakarta)
4. Ibu Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Provinsi Jawa Timur)
5. Ketua Komisi IX DPR RI

Di  
Tempat

Dengan Hormat,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Sejahtera Kami sampaikan semoga segala aktivitas dan kreativitas Bapak/Ibu selalu ada dalam lindungan Allah SWT.

Berdasarkan surat dari DPC Sarbumusi Kab. Jember Nomor: 0797/A.1/DPCJR/VI/2019 Perihal Pengaduan dan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja/PHK sepihak oleh PT. Bangun Indoparalon Sukses (MPOIN) Jember yang diindikasikan kuat merupakan union busting (pemberangusan serikat pekerja) dan penolakan keberadaan serikat pekerja dengan cara melakukan PHK secara sepihak, atas dasar surat tersebut ada beberapa fakta yang diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa perusahaan dengan tegas dan nyata menolak berdirinya Serikat buruh di perusahaan, hal ini melanggar Pasal 28 UU.21/2000 dan Konvensi ILO No.87 Tentang Kebebasan berserikat.
- Bahwa Manajemen PT. Bangun Indoparalon sukses (MPOIN) tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan melanggar ketentuan UU.NO.13 2003 Pasal 108-113.
- Bahwa Manajemen PT Bangun Indoparalon sukses (MPOIN) Jember tidak membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku tahun 2019 dan ini merupakan pelanggaran tindak pidana kejahatan serta melanggar ketentuan UU.13/2003 Pasal 90 ayat 1 dan pasal 185.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONFEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA  
CONFEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM TRADE UNIONS  
(K-SARBUMUSI)**

Alamat: Jl. Raden Saleh 1 No. 7A, Jakarta 10430, email: [sarbumus@yahoo.co.id](mailto:sarbumus@yahoo.co.id)

- Bahwa Manajemen PT. Bangun Indoparalon sukses (MPOIN) senyata-nyatanya telah menolak keberadaan serikat pekerja/khususnya sarbumusi (pemberangusan serikat pekeras/serikat buruh)
- Pelanggaran atas Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan terus menerus dan sudah berlangsung tahunan.
- Bahwa atas dasar laporan masyarakat sekitar perusahaan, PT. Bangun Indoparalon (MPOIN) jember diduga tidak mengatur tentang analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pembuangan sampah industry, hal ini melanggar UU.NO.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP NO.27 Tahun 2012 Tentang izin lingkungan, serta perda kabupaten jember No.14 Tahun 2006 Tentang Retribusi perizinan dibidang industry.

Maka atas dasar persoalan-persoalan tersebut yang patut diduga melibatkan oknum kepolisian RI yang mem-back up perusahaan ini, maka demi rasa keadilan pekerja/buruh di Indonesia kami meminta dengan tegas sesuai dengan amanat konstitusi kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor ILO Jakarta untuk segera melakukan tindakan-tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu kami Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K-SARBUMUSI NU) meminta dengan tegas :

1. Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk menindak dengan tegas kepada oknum kepolisian yang memback-up pelanggaran yang dilakukan perusahaan PT. Bangun Indoparalon (MPOIN) Jember dan juga untuk menindak dengan tegas pelanggaran Pidana Union Busting (pemberangusan serikat pekerja) melalui desk pidana Ketenagakerjaan di Polri.
2. Kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti dengan tegas pelanggaran-pelanggaran hubungan industrial yang dilakukan oleh perusahaan PT. Indoparalon (MPOIN) Jember.
3. Kepada Ibu Direktur ILO Kantor Jakarta untuk segera meneruskan pelanggaran-pelanggaran union busting dan kebebasan berserikat yang nyata-nyata melanggar Koncensi ILO tentang kebebasan berserikat dengan meneruskan ke ILO di Geneva Swiss.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
KONFEDERASI SARIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA  
CONFEDERATION OF INDONESIAN MOSLEM TRADE UNIONS  
(K-SARBUMUSI)**

Alamat: Jl. Raden Saleh 1 No 74, Jakarta 10430, email: [sarbumusi@yahoo.co.id](mailto:sarbumusi@yahoo.co.id)

4. Kepada Ibu Gubernur Jawa Timur untuk segera memerintahkan kepada Bupati Jember agar mengevaluasi dan melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen perusahaan PT. Indoparalon (MPOIN) Jember
5. Kepada Komisi IX DPR RI untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan kepentingan pekerja dan pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan dengan nyata-nyata melakukan Union Busting dan penolakan keberadaan serikat pekerja oleh Perusahaan PT. Indoparalon (MPOIN) Jember

Demikian Surat ini kami buat atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wallahu muwaffiq ilaa Aqwaamith Tharieq  
Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Hormat Kami

**Dewan Pimpinan Pusat  
Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia  
(K-SARBUMUSI)**

Drs.H.M.Syaiful Bahri Anshori,MP  
Presiden

Eko Darwanto  
Sekretaris Jenderal



Lampiran D

Data Rekapitulasi Basis DPC Sarbumusi Jember  
Periode 2001 s/d Januari 2018

**DATA REKAPITULASI BASIS SARBUMUSI KABUPATEN JEMBER  
PERIODE TAHUN 2001 S/D JANUARI 2018**

NO	NAMA BASIS / PERUSAHAAN	NOMOR PENDAFTARAN	NOMOR PENCATATAN	ANGGOTA
1	BASIS PT. IDS	01/Basis/MMRT/IV/2001	568/01/SP/436.328/IV/2001	181
2	DPC. SARBUMUSI	031/VI/DPC-Jr/01	568/29/SP/436.328/VI/2001	70
3	BASIS PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA (SNS)		568/31/SP/436.328/VI/2001	50
4	BASIS KOPEGTEL CAMAR	VI/BS/KC/01(22/06/2001)	568/46/SP/436.328/VII/2001	125
5	BASIS JA. WAITIE TUGUSARI	01/VI/BS/DJW/01	568/28/SP/436.328/VI/2001	231
6	BASIS ERNA JAYA	01/Basis/MMRT/VII/2001	568/52/SP/436.328/VIII/2001	103
7	BASIS PT. KERETA API INDONESIA	05/VI/BS/PT.KAI/01/2001	568/55/SP/436.328/VIII/2001	60
8	BASIS HOTEL JEMBER	001/AA/BJ/1/20r	568/64/SP/436.328/1/2002	39
9	BASIS UD. SUMBER BARU	001/AA.../1/1/2r	568/67/SP/436.328/1/2002	40
10	BASIS UD. SURYA JAYA	001/AA.../1/1/2r	568/68/SP/436.328/1/2002	76
11	BASIS CV. LADANG MAKMUR	001/AA.../1/1/2r	568/69/SP/436.328/1/2002	107
12	BASIS PRIM KOVERI Tegai Besar	001/AA/BS/1/1/2r	568/70/SP/436.328/1/2002	141
13	BASIS KOOPERASI TRADISI	001/AA.../1/1/2r	568/71/SP/436.328/1/2002	45
14	BASIS JEMBER TAXI/ ARGO	001/AA/BS/1/1/2r	568/72/SP/436.328/1/2001	125
15	BASIS PO. AKAS ASRI	001/BA/KA/5/V/	568/76/SP/436.328/V/2002	575
16	BASIS COCOLA BAKERY	001/AA/B. C/X/1/2r	568/79/SP/436.328/X/2002	63
17	BASIS ANGKUTAN KOTA	011/AA/BS/V/2003	568/89/SP/436.328/V/2003	316
18	BASIS SAVOURY	001/AA/BS/R/V/2003	568/90/SP/436.328/V/2003	43
19	BASIS PR. SAMUDRA	01/AA/BS/V/2003	568/93/SP/436.328/V/2003	33
20	BASIS AKADEMI KEBIDANAN	01/AA/BS/V/2003	568/94/SP/436.328/V/2003	201
21	BASIS WISMILAK	078/AA/BS/V/2003	568/96/SP/436.328/VII/2003	44
22	BASIS KPRI UNEJ	079/AA/BS/V/2003	568/97/SP/436.328/VII/2003	51
23	BASIS PERCETAKAN TRISAKTI	080/AA/BS/V/2003	568/98/SP/436.328/VII/2003	39
24	BASIS TJOKRO BERSAUDARA	093/AA/BS/V/2003	568/101/SP/436.328/VIII/2003	66
25	BASIS REJEKIJ/ TOKO KACA	092/AA/BS/V/2003	568/102/SP/436.328/VIII/2003	71
26	BASIS JAMU IBOE	0/A/BS/N/2003	568/105/SP/436.328/IX/2003	75
27	BASIS PORENG JAYA	001/AA/BS/V/2003	568/106/SP/436.328/X/2003	63
28	BASIS PT. ARTA BOGA CEMERLANG	001/AA/BS/V/2003	568/107/436.328/X/2003	60
29	BASIS PPI (PERSH. PERDGNNGN IND.)	110/AA/BS/III/2004	568/110/SP/436.328/II/2004	226
30	BASIS SUZUKI TRUNOJOYO	01/B/AA/BS/V/2004	568/111/SP/436.328/IV/2004	49
31	BASIS HARTA MAS	001/AA/BS/V/2004	568/115/SP/436.328/VI/2004	22

NO	NAMA BASIS / PERUSAHAAN	NOMOR PENDAFTARAN	NOMOR PENCATATAN	ANGGOTA
32	BASIS SPBU 54.681.10 MANGLI	01/A/SBM/V/2004	568/115/SB/436.328/VI/2004	25
33	BASIS LIVIA MANDIRI SEJATTI/AQUA	01/A/SBM/I-1/2004	568/116/SB/436.328/VII/2004	93
34	BASIS SIGNORA	01/A/SBM-I/2004	568/117/SB/436.328/VII/2004	70
35	BASIS PDP. KALIMRAWAN	01/A/SBM/VII/2004	568/118/SB/436.328/VII/2004	350
36	BASIS SEGER ALAM	01/A/SBM/I-2/2004	568/119/SB/436.328/VIII/2004	172
37	BASIS CV. INMASH TEHNIK	01/A/SBM/I-2/2004	568/120/SB/436.328/VII/2004	209
38	BASIS JAGUNG HIBRIDA SULAWESI	01/A/SBM/I/2005	568/129/SBM/436.322/II/2005	125
39	BASIS PT. UNIRAMA DUTA NIAGA	01/A/SBM/XII/2004	568/130/436.322/II/2005	53
40	BASIS PT. SND	01/SBSJ-XI/PNT/1/2005	568/131/436.322/III/2005	71
41	BASIS SINAR ASIA TAXI	01/A/SBM/III/2005	568/135/SBM/436.322/2005	291
42	BASIS PT. RAJAWALI KONSTRUKSI	01/A/SBM/III/2005	568/136/SBM/436.322/IV/2005	81
43	BASIS JA. WATTIE CORAHMAS	01/A/SBM/2005	568/137/SBM/436.322/IV/2005	75
44	BASIS UD. XOXO	01/A/SBM/IV/2005	568/138/SBM/436.322/V/2005	15
45	BASIS PT. SAKTI SETIA SENTOSA	01/1/SBM/V/2005	568/140/SBM/436.322/2005	35
46	BASIS PT. SARI AYU INDONESIA	01/A/SBM/2005	568/141/SBM/436.322/2005	54
47	BASIS PT. ATRI DISTRIBUSINDO	01/A/SBM/V/2005	568/142/SBM/436.322/2005	70
48	BASIS PT. INTERMAS TATA TRADING	01/A/SBM/VI/2005	568/143/SBM/436.322/2005	25
49	BASIS ASIA STATIONERY	01/A/SBM/V/2005	568/144/SBM/436.322/VII/2005	37
50	BASIS PT. GUNA	-	568/151/SBM/436.322/III/2006	105
51	BASIS UD. SUMBER MANIS/ KAC. KOBO	01/A/SBM/V/2006	568/152/SBM/436.322/VI/2006	35
52	BASIS UD. KARUNIA	01/A/SBM/VI/2006	568/153/SBM/436.322/VII/2006	40
53	BASIS PT. HIPSTA	-	568/156/SBM/436.322/II/2007	94
54	BASIS MULTI BANGUNAN	-	568/156/SBM/436.322/I/2007	57
55	BASIS MAKMUR JAYA REJEKI	-	-	25
56	BASIS YONGBEE	-	-	67
57	BASIS UD. JAYA SUBUR	-	-	90
58	BASIS BORWITA CITRA PRIMA	10 April 2013	568/709/IV/421/2013	143
59	BASIS ROKOK FLAME	-	-	37
60	BASIS CV. BINA BALANSTARA	-	-	109
61	BASIS JURU PARKIR JEMBER	18 Maret 2013	568/483/421/III/2013	375
62	BASIS KOPKAR KARTANEGARA	November 2014	568/4095/421/XI/2014	18
63	BASIS PT. MUROCCO	-	-	207

NO	NAMA BASIS / PERUSAHAAN	NOMOR PENDAFTARAN	NOMOR PENCATATAN	ANGGOTA
64	BASIS PT. SEMAR KENCANA SAKTI	Februari 2015	568/309/421/10/2015	15
65	BASIS PT. SUMBER AL-FANJA TRIDAYA, Tbk	Februari 2015	568/310/421/10/2015	84
66	BASIS PT. TEKAD KARYA PUTERA	03/17/A/1/DPC/JR/III/2016	568/825/421/10/2016	57
67	PT. TRIITA PRIMA RASA (Walis)	Masih proses		11
68	PT. PRISKILA PRIMA MAKHUR	Masih proses		7
69	PT. SINAR MAKMUR SEJAHTERA MANDIRI	Masih proses		15
70	PT. FOUR COUNTINENTAL TRADING (Aice)	Masih proses		29
71	PT. KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL	0379/A/1/DPC/JR/II/2017	568/20/421/10/2017	24
72	PT. SURYA SINAR BERLIAN (SIDOMUNCUL)	Masih proses		13
73	PT. BANGUN INDOPARALON SUKSES (MPOIN)	Masih proses		12
74	PT. FAJAR SUKSES BERSAMA	Masih proses		18
75	PT. PANCA PILAR	Masih proses		14
76	PT. PUTERA LAUTAN SEJAHTERA (PLS)	Masih proses		17
77	CV. BUANA MAS	Masih proses		14
78	PT. FAJAR JAYA	Masih proses		21
79	Anggota Free Line (Anggota Luar Biasa)			371
<b>TOTAL ANGGOTA SARBUMUSI KABUPATEN JEMBER</b>				<b>7.531</b>

Homat, Kam!,  
DPC SARBUMUSI JEMBER

UMAR FARUK  
Ketua

ROFIAN PRASETYO  
Sekretaris

Mengetahui,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN JEMBER  
(Sebagai Ketua DEPKAB Jember)  
**Drs. BILANG HJ. SANTOSO, MM**  
NIP. 19611113 199103 1 003

Sumber: Tanda Bukti Pencatatan. Pemerintah Kabupaten Jember Dinas Tenaga Kerja. No.031/VI/DPC JR/01 Tanggal 15 Juni 2001. Jember, 29 Juni 2001.